

**IMPLEMENTASI PSAK 63 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN DALAM EKONOMI HIPERINFLASI
(STUDI KASUS: PT WASKITA KARYA TBK)**

SKRIPSI



Oleh

ADAM AXELRIO HARTOYO

NIM : 16520087

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**IMPLEMENTASI PSAK 63 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN DALAM EKONOMI HIPERINFLASI
(STUDI KASUS: PT WASKITA KARYA TBK)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ADAM AXELRIO HARTOYO

NIM : 16520087

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PSAK 63 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN DALAM EKONOMI HIPERINFLASI
(STUDI KASUS: PT WASKITA KARYA TBK)

SKRIPSI

Oleh

ADAM AXELRIO HARTOYO

NIM : 16520087

Telah disetujui 8 Mei 2020
Dosen Pembimbing,

Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PSAK 63 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN DALAM EKONOMI HIPERINFLASI
(STUDI KASUS: PT WASKITA KARYA TBK)

SKRIPSI

Oleh

ADAM AXELRIO HARTOYO

NIM : 16520087

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 18 Mei 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA

NIP. 19720322 200801 2 005

()

2. Sekretaris/Pembimbing

Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak

: ()

3. Penguji Utama

Zuraidah, SE., MSA

NIP. 19761210 200912 2001

: ()

()

Mengetahui :
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Axelrio Hartoyo
NIM : 16520087
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : “IMPLEMENTASI PSAK 63 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DALAM EKONOMI HIPERINFLASI (STUDI KASUS: PT WASKITA KARYA TBK)” adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Mei 2020
Hormat saya,



Adam Axelrio Hartoyo
NIM : 16520087

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrabal'alamin, syukur ku ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi hamba-Nya rahmat, hidayah dan anugerah. Seiring berjalannya kehidupan yang penuh dengan perjuangan, maka terciptalah sebuah karya.

Karya ini ku persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta “**Ternes Hartoyo**” dan “**Tanti Mulyani**” atas segala pengorbanan, nasehat, kasih sayang dan dukungan serta doa yang tiada henti. Adik-adikku “**Tevi Berliana Hartoyo, dan Rafi Satria Hartoyo**” yang selalu memberikan motivasi, semangat warna dan keceriaan didalam hidupku.



Motto

“Bismillahirrahmannirrahim”



KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan judul, "Implementasi PSAK 63 Tentang Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi (Studi Kasus: PT Waskita Karya Tbk)"

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA selaku Kepala Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak selaku dosen pembimbing saya dalam melaksanakan penelitian skripsi saya ni.
5. Keluarga besar saya, yang saya cintai dan saya banggakan dan senantiasa mendukung saya baik jasmani maupun spritual untuk menyelesaikan pendidikan saya ini
6. Teman-teman Akuntansi angkatan 2016 yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh pihak baik terlibat secara langsung maupun tidak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan ada masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak Amin ya Robbal'Alamin...

Malang, 18 Mei 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.4.1 Aspek Teoritis	13
1.4.2 Aspek Praktis	13
1.5 Batasan Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	15
2.2 Kajian Teoritis	18
2.2.1 Implementasi atau Penerapan	18
2.2.2 Laporan Keuangan	19
2.2.3 Standar Akuntansi Keuangan	32
2.2.4 Standar Akuntansi Keuangan Hiperinflasi (PSAK 63)	35
2.3 Integrasi Islam	43
2.4 Kerangka Berfikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Subjek Penelitian.....	48
3.4 Data dan Jenis Data	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Analisis Data	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	51
4.1 Paparan Data	51
4.1.1 Latar Belakang PT Waskita Karya Tbk	51

4.1.2 Ruang Lingkup Kegiatan PT Waskita Karya Tbk	52
4.1.3 Visi Dan Misi Perusahaan	53
4.1.4 Lokasi PT Waskita Karya Tbk	54
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	54
4.2.1 Penyebab Terjadinya Inflasi di Sebuah Negara dan Cara Indonesia Mengantisipasinya	54
4.2.1.1 Penyebab Terjadinya Inflasi di Sebuah Negara	54
4.2.1.2 Cara Indonesia Mengantisipasinya	55
4.2.2 Analisis Rasio Profitabilitas PT Waskita Karya Tbk Tahun 2019 / Ketika Dalam Inflasi Normal (3,39%)	58
4.2.3 Analisis Rasio Profitabilitas PT Waskita Karya Tbk Dengan Diasumsikan Terjadi Hiperinflasi (33,32%) dan Analisis Perbandingan Dengan Rasio Profitabilitas Ketika Dalam Inflasi Normal (3,39%).....	63
4.2.3.1 Analisis Rasio Profitabilitas PT Waskita Karya Tbk Setelah Hiperinflasi	63
4.2.3.2 Perbandingannya Rasio Profitabilitas Ketika Sebelum dan Sesudah Hiperinflasi.....	65
4.2.4 Penerapan PSAK 63 Terhadap PT Waskita Karya Tbk Ketika Diasumsikan Sedang Terkena Hiperinflasi Di Indonesia dan Manfaat Bagi Perusahaan Ketika Menerapkannya	67
4.2.4.1 Penerapan PSAK 63 Terhadap PT Waskita Karya Tbk Ketika Diasumsikan Sedang Terkena Hiperinflasi Di Indonesia	67
4.2.4.1.1 Dasar Perhitungan Indeks Harga Umum	68
4.2.4.1.2 Penentuan Pos Moneter dan Pos Non Moneter	70
4.2.4.1.3 Analisis Kertas Kerja Hiperinflasi	71
4.2.4.1.4 Laporan Keuangan PT Waskita Karya Tbk Dalam Ekonomi Hiperinflasi	75
4.2.4.2 Manfaat PT Waskita Karya Tbk Menerapkan PSAK 63 Dalam Kondisi Hiperinflasi	84
4.2.5 Kajian Keislaman Mengenai Topik Penelitian	84

BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Perbandingan Analisis Profitabilitas Laporan Keuangan PT Waskita Karya Tbk Ketika Terjadi Hiperinflasi (33,32%) dan Ketika Inflasi Normal (3,39%)	65
Tabel 4.2 Kurs Rata-Rata Rupiah Terhadap Dollar	68
Tabel 4.3 Tingkat Inflasi Tahun 1972-1974 dan 2008-2010	68
Tabel 4.4 Indeks Harga Umum Hiperinflasi	69
Tabel 4.5 Penentuan Pos Moneter dan Pos Non Moneter	71
Tabel 4.6 Laporan Posisi Keuangan Dalam Kondisi Hiperinflasi	76
Tabel 4.7 Laporan Laba / Rugi Dalam Kondisi Hiperinflasi	78
Tabel 4.8 Laporan Arus Kas Dalam Kondisi Hiperinflasi	80
Tabel 4.9 Laporan Perubahan Ekuitas Dalam Kondisi Hiperinflasi	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Neraca Perdagangan Luar Negeri Indonesia 1987-1993.....	5
Gambar 2.1 Konsep Implementasi	19
Gambar 2.2 Peta Konsep Laporan Keuangan Berbasis PSAK	22
Gambar 2.3 Peta Konsep Laporan Posisi Keuangan	26
Gambar 2.4 Peta Konsep Standar Akuntansi di Indonesia	35
Gambar 2.5 Kerangka Berfikir Penelitian	45
Gambar 4.1 Jumlah Utang Negara Indonesia Hingga November 2019	56
Gambar 4.2 Tingkat Inflasi April 2019 – Februari 2020	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kertas Kerja Kas Dan Setara Kas
- Lampiran 2. Kertas Kerja Piutang Usaha Bersih, Kertas Kerja Piutang Retensi, Kertas Kerja Piutang Lain-Lain. Dan Kertas Kerja Piutang Ventura Bersama
- Lampiran 3. Kertas Kerja Tagihan Bruto
- Lampiran 4. Kertas Kerja Investasi Jangka Pendek, Kertas Kerja Persediaan. Kertas Kerja Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi
- Lampiran 5. Kertas Kerja Pajak Dibayar Dimuka, Kertas Kerja Uang Muka Dibayar Dimuka
- Lampiran 6. Kertas Kerja Aset Tetap, dan Kertas Kerja Goodwill
- Lampiran 7. Kertas Kerja Aset Tak Berwujud (Hak Penguasaan Jalan Tol), dan Kertas Kerja Aset dan Liabilitas Pajak Tangguha
- Lampiran 8. Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Lampiran 9. Kertas Kerja Properti Investasi, Kertas Kerja Investasi Jangka Panjang Lainnya, Kertas Kerja Aset Lain-lain
- Lampiran 10. Kertas Kerja Piutang Lain Lain Tak Lancar, Kertas Kerja Utang Usaha, dan Kertas Kerja Utang Bruto Subkontraktor - Jk Pendek
- Lampiran 11. Kertas Kerja Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Kertas Kerja Utang Pajak Jangka Pendek, dan Kertas Kerja Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
- Lampiran 12. Kertas Kerja Utang Bank Jangka Pendek
- Lampiran 13. Kertas Kerja Utang Lembaga Keuangan Non Bank dan Kertas Kerja Utang Uang Muka Kontrak Jangka Pendek
- Lampiran 14. Kertas Kerja Utang Pembelian Aset Tetap, Kertas Kerja Surat Utang Jangka Menengah, dan Kertas Kerja Utang Obligasi
- Lampiran 15. Kertas Kerja Utang Bank Jangka Panjang
- Lampiran 16. Kertas Kerja Utang Ventura Bersama Jangka Panjang dan Kertas Kerja Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang
- Lampiran 17. Kertas Kerja Utang Bruto Jangka Panjang dan Kertas Kerja Utang Muka Kontrak Jangka Panjang
- Lampiran 18. Kertas Kerja Utang Lain-lain Jangka Panjang dan Kertas Kerja Liabilitas Imbalan Kerja
- Lampiran 19. Komponen Ekuitas
- Lampiran 20. Komponen Laba / Rugi
- Lampiran 21. Halaman Biodata Peneliti
- Lampiran 22. Halaman Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Adam Axelrio Hartoyo. 2020, SKRIPSI. Judul: "Implementasi PSAK 63 Tentang Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi (Studi Kasus: PT Waskita Karya Tbk)"

Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Hiperinflasi, PSAK 63

Inflasi merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang dapat terjadi di sebuah negara. Ketika sebuah negara terkena inflasi sektor akuntansi termasuk yang terkena dampaknya. Ketika terjadi inflasi nilai-nilai dalam laporan keuangan menjadi tidak bernilai lagi, sehingga akan berbanding terbalik dengan manfaat laporan keuangan yang menyediakan nilai yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. PSAK 63 hadir sebagai solusi dalam permasalahan ini ketika mata uang fungsional perusahaan terjadi hiperinflasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berpengaruh yang menyebabkan inflasi dan cara Indonesia mengantisipasinya, lalu mengetahui rasio profitabilitas ketika diasumsikan terjadi hiperinflasi maupun ketika dalam kondisi normal, dan mengetahui penerapan PSAK 63 dalam mengatur perubahan nilai di kondisi hiperinflasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kemudian data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik Analisis data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data, mereduksinya, melakukan analisis perbandingan dan teknik implementasi, sehingga dan pemaparan data kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia yang memiliki persamaan peristiwa dengan tahun 1998 ternyata memiliki tingkat inflasi di di bawah 4%, Rasio profitabilitas perusahaan sebelum hiperinflasi memiliki angka yang baik dan berbanding terbalik ketika setelah hiperinflasi, sehingga berdampak pada keyakinan investor dalam berinvestasi. Dampak dari penerapan PSAK 63 dalam laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk adalah nilai dalam laporan keuangan menjadi berubah. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Perusahaan mencatatkan kerugian yang terjadi karena penurunan nilai yang terdapat di dalam laporan keuangan. Meskipun demikian nilai yang terdapat dalam laporan keuangan mencerminkan nilai kini dan informasi yang disajikan menjadi relevan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

ABSTRACT

Adam Axelrio Hartoyo. 2020, THESIS. Title: "Implementation of PSAK 63 Regarding Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Case Study: PT Waskita Karya Tbk)"

Supervisor : Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak

Keyword : Financial Report, Hyperinflationary, PSAK 63

Inflation is a complex problem that can occur in a country. When a country is exposed to inflation many sectors that experience the impact, including the accounting sector. When there is inflation, the values in the financial statements become no longer valuable. This is certainly inversely proportional to the benefits of financial statements that provide relevant and reliable value for use in decision making. PSAK 63 exists as a solution to problems with companies whose hyperinflationary currencies occur. The purpose of this study is how the application of PSAK 63 in regulating changes in values under conditions of hyperinflation. Therefore this research was conducted with the title "Implementation of PSAK 63 Regarding Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Case Study: PT Waskita Karya Tbk)"

This research is a qualitative research with a descriptive approach to describe what happens when companies apply PSAK 63. The data used is secondary data. Data analysis, first by collecting data, reducing, comparative analysis, implementation methods, data exposure, and conclusions drawn.

Based on the research results, the impact of the adoption of PSAK 63 in PT Waskita Karya Tbk's financial statements is that the values in the financial statements change. There was a significant increase, it was considered normal because in a hyperinflationary condition all prices went up. But the company recorded a loss, different from before the hyperinflation conditions. The loss is due to an impairment in the value of the financial statements. Although the values contained in the financial statements have reflected the present value and the information presented is relevant and can be used for decision making.

المستخلص

أدام أكسلري هارتويو. 2020. البحث الجامعي. الموضوع: "تنفيذ PSAK 63 بخصوص إعداد التقارير المالية في الاقتصادات شديدة التضخم (دراسة حالة: PT Waskita Kary Tbk)"

المشرف : الدكتور. الجاج. عبد القادر عرشي, MM., Ak.
الكلمات المفتاحي : القوائم المالية ، التضخم المفرط ، PSAK 63

التضخم مشكلة معقدة يمكن أن تحدث في بلد ما. عندما تتعرض الدولة للتضخم العديد من القطاعات التي تعاني من التأثير ، بما في ذلك قطاع المحاسبة. عندما يكون هناك تضخم ، فإن القيم في البيئات المالية لم تعد ذات قيمة. وهذا لتأكيد يتناسب عكسياً مع فوائد البيئات المالية التي توفر قيمة ذات صلة وموثوقة للاستخدام في صنع القرار. يوجد PSAK 63 كحل للمشاكل مع الشركات التي تحدث عملائها ذات التضخم المرتفع. الغرض من هذه الدراسة هو كيفية تطبيق PSAK 63 في تنظيم التغيرات في القيم تحت ظروف التضخم المفرط. لذلك ، تم إجراء هذا البحث بعنوان "تنفيذ PSAK 63 بشأن إعداد التقارير المالية في اقتصادات التضخم المرتفع (دراسة حالة: PT Waskita Kary Tbk)".

النوع هذا البحث هو بحث نوعي مع نهج وصفي لوصف ما يحدث عندما تطبق الشركات PSAK 63. البيئات المستخدمة هي بيئات نوية. يتم تحليل البيئات عن طريق جمع البيئات الثانوية ، ثم تقليلها ، وطرق التحليل المقارن والتنفيذ ، والتعرض للبيئات وفوائد نتائج التنفيذ ، والاستنتاجات المستخلصة.

بناءً على نتائج البحث ، فإن تأثير اعتماد PSAK 63 في البيئات المالية PT Waskita Kary Tbk هو أن القيم في البيئات المالية تتغير. كانت هناك زيادة كبيرة ، واعتبرت طبيعية لأنه في حالة التضخم المرتفع ارتفعت جميع الأسعار. لكن الشركة سجلت خسارة ، تختلف عما كانت عليه قبل ظروف التضخم المرتفع. يعود سبب الخسارة إلى انخفاض قيمة البيئات المالية. على الرغم من أن القيم الواردة في البيئات المالية قد عكست القيمة الحالية والمعلومات المقدمة ذات الصلة ويمكن استخدامها لصنع القرار.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang, setiap negara di dunia khususnya negara berkembang menginginkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki parameter positif untuk negaranya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Dalam sistem perekonomian terbuka akan menciptakan dampak positif antar negara dengan saling membantu negara satu dengan negara yang lain. Namun tidak dapat dipungkiri dibalik usaha yang dilakukan untuk memajukan kepentingan ekonomi akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang muncul seiring berjalannya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah masalah inflasi. Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga-harga umum yang berlaku di suatu negara secara terus menerus dari suatu periode ke periode yang lainnya. Inflasi dapat disebabkan beberapa hal seperti uang beredar yang terlalu banyak, pengaruh politik dan ekonomi, serta permintaan barang yang tinggi. Kemudian inflasi dibedakan menjadi inflasi rendah ketika tingkat inflasi dibawah 10%, sedang ketika tingkat inflasi 10-30%, tinggi ketika inflasi mencapai angka 30-100%, dan hiperinflasi ketika tingkat inflasi diatas 100%. Inflasi memiliki peran vital, yakni menjadi salah satu indikator stabilitas perekonomian dalam suatu negara (Mankiw, 2018: 76).

Tingkat inflasi baik rendah maupun tinggi akan menjadikannya sebagai cermin dari pertumbuhan ekonomi dalam negara tersebut. Hal

tersebut terbukti, tingkat inflasi akan stabil apabila suatu negara memiliki kondisi perdagangan ekspor impor yang menunjukkan neraca *surplus*, nilai tukar mata uang stabil, dan tidak terjadi suatu konflik sosial dan politik dalam negara tersebut. Sedangkan tingkat inflasi akan tinggi apabila dalam suatu negara terjadi gejolak konflik sosial, ritme kebijakan politik yang berubah-ubah, neraca perdagangan ekspor impor yang *defisit* dan masalah-masalah lain yang timbul akibat faktor internal maupun eksternal. Selain itu inflasi memiliki efek domino dalam perekonomian di suatu negara. Ketika tingkat inflasi tidak stabil maka akan terjadi kenaikan harga barang/jasa secara keseluruhan dalam suatu periode ke periode lainnya. Sehingga apabila hal itu terjadi akan menyebabkan juga turunnya daya beli masyarakat karena harga barang yang terdapat di pasar relatif tinggi. Turunnya daya beli masyarakat juga akan berdampak kerugian pada produsen karena barang hasil produksi tak habis terjual sehingga tak dapat menutupi biaya produksi. Apabila produsen merugi tentunya mereka akan mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah produksi. Dampaknya sedikit demi sedikit akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional di negara yang terkena dampak inflasi tersebut. Selain dari segi konsumen dan produsen, dampak inflasi juga berpengaruh negatif pada investor. Para investor akan beranggapan *risk averse*, yakni ketika berinvestasi di negara yang sedang mengalami inflasi akan memiliki resiko yang cukup tinggi maka mereka lebih baik menghindarinya. Akibat dari perilaku investor tersebut maka investor akan cenderung melakukan aksi jual pada saham mereka, apabila mereka telah

terlanjur berinvestasi pada saham di negara yang sedang inflasi dan lebih menahan harta mereka untuk diinvestasikan hingga dirasa perekonomian di negara tersebut sudah mulai membaik (Sri Haryani, 2018: 54).

Fenomena hiperinflasi pernah terjadi 11 tahun yang lalu di Zimbabwe. Awalnya pada tahun 2000 Zimbabwe mulai menjalin kerjasama dengan Tiongkok/China melalui Forum For China-Africa Cooperation (FOCAC). FOCAC berdiri agar bertujuan pemerintah China semakin banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada negara-negara di Afrika termasuk Zimbabwe. (Wiwit, 2017: 87). Selain ketergantungan tersebut, ditambah dengan keguncangan politik yang terjadi di Zimbabwe yakni diawali dengan peristiwa “*Land Reform Mugebe*”, yaitu perampasan tanah milik orang kulit putih kepada orang kulit hitam pendukung presiden terpilih Robert Mugabe. Hal tersebut membuat Zimbabwe hilang kendali atas harga pangan dan hasil-hasil pertanian. Kemudian ditambah lagi dengan pengelolaan ekonomi yang buruk oleh Presiden Mugabe, yakni mereka melakukan mencetak uang secara besar-besaran. Uang dipakai untuk membayar gaji pegawai, tentara, dan belanja pemerintah. Uang beredarpun tumbuh tak terkendali menjadi akar dari hiperinflasi (Medriamel, 2017: 231)

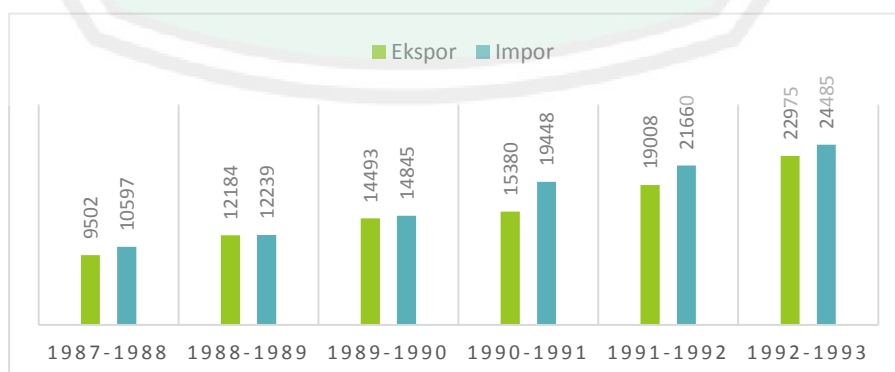
Indonesia memiliki sejarah buruk tentang inflasi. Menurut Bank Indonesia (1999) Pada tahun 1959, fenomena inflasi dimulai dengan kesalahan kebijakan pemerintah dalam pengetatan moneter sebagai upaya mengatasi tekanan inflasi. Kebijakan pengetatan moneter 1959 tersebut antara lain dilaksanakan dengan mengeluarkan beberapa ketentuan yakni dengan

menurunkan nilai uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 50 dan Rp 100. Kemudian dilakukan devaluasi nilai tukar rupiah sebesar 74,7% dari Rp11,40 per USD menjadi Rp 45 per USD. Faktor utama lain adalah pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia lebih cenderung berpihak kepada blok timur. Kedekatan Indonesia dengan Cina dan Rusia menyebabkan renggangnya hubungan Indonesia dengan negara-negara blok barat. Kemudian, dengan alasan semangat revolusi dan berdikari, pada tanggal 17 Agustus 1965, pemerintah memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan IMF, Bank Dunia, dan PBB. Dengan penarikan diri tersebut, rencana-rencana pengembalian utang atas *Outstanding Drawing* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati- diganti dengan persetujuan *Settlement of Account*. Utang kepada IMF sejumlah USD 61,9 juta menjadi USD 63,5 juta. Jumlah tersebut, termasuk bunga utang yang akan dilunasi dalam 10 kali angsuran per 6 bulan, Akibatnya Indonesia mengalami dampak inflasi sangat tinggi hingga mencapai 635% pada 1966, Kejadian ini diakhiri oleh turunnya Presiden Soekarno di era demokrasi terpeimpinnya

Kemudian melangkah lebih maju pada tahun 1998 merupakan krisis ekonomi dan politik sedang melanda indonesia sehingga mengakibatkan tingkat inflasi pada tahun 1997 ke 1998 mencapai angka 57,94%. Bahkan pada saat fluktuasi bulanan menyentuh angka 123%. (Kementrian Perdagangan, 2019). Inflasi di era Presiden Soeharto tersebut terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor-faktor. Salah satu faktor utamanya adalah pada tahun tersebut Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan transformasi

ekonomi yang merupakan proyek berkelanjutan sejak awal tahun 1980-an. Kebijakan transformasi tersebut adalah Indonesia ingin mengganti roda perekonomian yang bersandar pada sektor hasil-hasil alam seperti pertanian dan perkebunan menjadi perekonomian yang bersandar pada sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Untuk mewujudkan rencana pembangunan tersebut Indonesia melibatkan pihak swasta dalam pembangunan tersebut. Sehingga terdapat konsekuensi bahwa keuntungan yang didapat dari sektor industri yang dibangun akan dibagi oleh kedua belah pihak yakni pemerintah dan swasta. Namun pada kenyataannya tak sesuai dengan perkiraan awal, sektor industri yang diandalkan ternyata dianggap gagal dalam memberikan kontribusi optimal terhadap pembiayaan pembangunan di dalam negeri. Kegagalan pada sektor industri ini didasarkan pada fakta bahwa pada tahun 1986-1992 nilai ekspor industri di sektor non-migas, tidak pernah mampu mengalahkan nilai impor non-migas sehingga menyebabkan defisit dalam perdagangan luar negeri.

Gambar 1.1
Neraca Perdagangan Luar Negeri Indonesia 1987-1993
(Dalam Jutaan US Dollar)



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019

Menurut Andrinof A. Chaniago (2001: 101) di era saat itu agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya Indonesia harus mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% per tahun. Selain itu selama Rancangan Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) ke-VI pemerintah membutuhkan investasi sebesar 815 triliun rupiah. Kenyataannya dari jumlah tersebut pemerintah hanya sanggup mensuplai kurang dari 30% nya, sedangkan sisanya diharapkan dari pihak swasta dan dana masyarakat berupa tabungan, deposito, obligasi, saham, dan sebagainya. Kedua faktor inilah yang menjadi latar belakang pemerintah memiliki ketergantungan pinjaman kepada pihak swasta. Akibatnya Indonesia memiliki kondisi utang yang tak sehat sehingga pada akhirnya turut menyeret Indonesia dalam krisis ekonomi Asia pada tahun 1998

Namun terdapat beberapa kesamaan antara kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Indonesia 21 tahun lalu dengan era saat ini. Saat ini Indonesia di era Presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga bulan Oktober 2018. Pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km dan jalan tol sepanjang 941 km. Kemudian terdapat 65 bendungan baru dan jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektare. (Kementerian PUPR, 2018). Kejadian ini sama dengan kebijakan Presiden Soeharto dengan program REPELITA ke 6-nya tahun 1994-1999 dengan fokus meningkatkan pembangunan sektor industri manufaktur. Pemerintah dalam mengupayakan sumber dana untuk pembangunan tersebut dengan

melakukan kebijakan fiskal. Selain memperketat dalam sektor perpajakan, pemerintah juga mengambil kebijakan seperti 21 tahun silam dengan menerapkan pinjaman ke pihak swasta. Per bulan November 2019, Indonesia memiliki utang negara sebesar Rp4.814,31 Triliun hal tersebut naik sebesar 9,8% dibanding Oktober 2019 yakni sebesar Rp4.756,13 Triliun. Berdasarkan data tersebut rasio utang Indonesia terhadap *Gross Domestic Bruto* (GDP) yaitu sebesar Rp15.833,8 Triliun memiliki rasio ketergantungan di angka 30,28% (Badan Pusat Statistik, 2019). Angka tersebut merupakan angka siaga karena sudah menyentuh angka diatas 30% atau lebih dari $\frac{1}{4}$ GDP kita memiliki ketergantungan dengan utang negara. Pada 21 tahun silam rasio utang terhadap GDP senilai 57,7% (Kementerian Keuangan, 2019). Berbagai kesamaan fenomena-fenomena yang muncul ini membuktikan bahwa peluang terjadinya inflasi di Indonesia masih sangat memungkinkan terulang kembali seperti kejadian 21 tahun silam. Menurut Primawan dan Umar Basuki (2012: 55) Indonesia pada saat itu memiliki nilai tukar rupiah tak sering digunakan akibatnya pada saat itu Indonesia sempat mengalami inflasi di angka 77,63%.

Terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan inflasi khususnya di era saat ini, faktor ini di latar belakang oleh terjadinya globalisasi ekonomi yang merupakan dampak dari Revolusi Industri 4.0. Sehingga saat ini mulai timbul revolusi digital. Salah satu produknya adalah *e-commerce*, untuk saat ini banyak perusahaan-perusahaan *e-commerce* di Indonesia diantaranya adalah go-jek, grab, bukalapak, shopee, dan tokopedia.. *E-commerce* sendiri merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli

dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah. (Hutami Endang, 2019). Kemudian fenomena ini semakin diperkuat dengan adanya peraturan tentang Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang mencakup delapan aspek regulasi mengenai *e-commerce* meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan sumber daya manusia, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan *cyber*, dan pembentukan manajemen pelaksana (Kemenko Bidang Perekonomian, 2016).

Inflasi dapat terjadi ketika masyarakat Indonesia lebih cenderung memilih berbelanja secara *konsumtif* menggunakan *e-commerce* luar negeri. Kondisi tersebut dapat terjadi karena selisih harga yang cukup *significant* antara harga yang terpaut di *e-commerce* luar negeri dengan yang tertera di *e-commerce* milik Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia secara *konsumtif* cenderung menggunakan platform *e-commerce* luar negeri akibatnya transaksi jual beli antara konsumen dengan produsen menggunakan kurs mata uang negara tempat *e-commerce* tersebut berdomisili, secara tidak langsung juga akan mengurangi jumlah rupiah yang beredar di masyarakat sesuai dengan teori uang beredar (Heru Perlambang, 2010: 120).

Berkaitan dengan lingkup mikro, perusahaan tentunya juga ikut terdampak dari pengaruh inflasi ini, perusahaan harus menyesuaikan berbagai komponen harga yang mereka gunakan dengan nilai kini saat terjadinya

inflasi. Hal tersebut dikarenakan nilai *historis* dari sebuah aset/barang yang dimiliki perusahaan tidak bernilai lagi karena dampak dari inflasi ini. Sebagai contohnya apabila perusahaan memiliki aset mereka yang berupa peralatan berupa mesin, aset tadi dicatat perusahaan dimulai dari nilai buku pada saat beli, kemudian mesin tersebut memiliki masa manfaat sehingga dikurangi oleh akumulasi penyusutan dan jadilah nilai buku mesin. Ketika terjadi hiperinflasi, nilai buku peralatan tersebut tidak sebanding dengan nilai wajar yang terdapat di pasar. Padahal seharusnya nilai buku perusahaan biasanya memiliki nilai nominal yang tidak jauh dengan nilai wajar yang terdapat di pasar. Akibatnya saat hiperinflasi nilai buku akan memiliki *range* jarak cukup jauh dengan nilai wajar, sehingga aset mesin yang dimiliki perusahaan menjadi tidak bernilai sebelum dinilai kembali. (PSAK 63, 2019).

Pada 8 April 2011 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan sebuah kebijakan ekonomi, khususnya akuntansi dengan membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 63 Tentang Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi yang merupakan adopsi dari *International Accounting Standards (IAS) 29: Financial Reporting Hyperinflationary Economies*. Standar Akuntansi ini dibuat didasari oleh akuntansi belum bisa menjawab ketika terjadi hiperinflasi di sebuah negara yang tentunya berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh peristiwa hiperinflasi yang terjadi di Zimbabwe pada tahun 2008-2009. Kemudian pedoman ini menjadi antisipasi apabila suatu saat terjadi hiperinflasi di Indonesia. Menurut PSAK 63 (2019) PSAK ini

dapat digunakan ketika kondisi inflasi di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut mencapai angka 100%. Dengan kondisi inflasi Indonesia saat ini memungkinkan 3 tahun kedepan tingkat inflasi di Indonesia bisa mencapai 100% dimana saat ini nilai tukar dan harga barang di dalam negeri melambung tinggi. Nantinya PSAK ini akan sangat berguna bagi perusahaan pada saat negara tempat perusahaan berdomisili sedang terkena hiperinflasi. Di dalam PSAK ini terdapat kebijakan-kebijakan yang harus diambil perusahaan agar tetap mengakui, mengungkapkan, dan menyajikan laporan keuangannya yang berupa aset, liabilitas, dan ekuitas berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya dan merupakan nilai terkini akibat dari hiperinflasi. (PSAK 63, 2019)

PT Waskita Karya Tbk merupakan perusahaan di bidang jasa khususnya adalah jasa konstruksi. Perusahaan ini merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan ini juga memiliki aset yang bermacam-macam yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, seperti pembelian dan persediaan material-material pembangunan, kontrak dari alat berat antara beli/sewa, dan kontrak-kontrak yang mengikat antara hak dan kewajiban perusahaan. Selain faktor tersebut, perusahaan ini untuk beberapa waktu belakangan sedang mengalami peningkatan dalam berbagai aspek dikarenakan merupakan tangan kanan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang terjadi kelonjakan sejak 2014 silam setelah pemerintah memfokuskan programnya untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan tersebut seperti pembangunan jalan tol, bendungan, jembatan, dan program

terbaru pemerintah yakni pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur yang baru diresmikan di akhir 2019. Tentunya dengan lonjakan akibat keselarasan dengan tujuan pemerintah dalam membangun infrastruktur, akan berdampak pada rasio-rasio keuangan yang baik bagi perusahaan.

Meskipun dirasa PT Waskita Karya Tbk memiliki kondisi yang sangat baik, namun fenomena hiperinflasi dapat saja terjadi. Hal tersebut dikarenakan persamaan beberapa peristiwa yang terjadi saat ini dengan 10 tahun silam seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Apabila terjadi hiperinflasi perusahaan ini juga tetap harus menerapkan standar yang berlaku. Kemudian dalam penerapannya, perusahaan di bidang jasa konstruksi akan memiliki ketentuan-ketentuan penerapan yang beragam, hal tersebut berbanding lurus karena aset dan liabilitas perusahaan ini juga beragam. Berbagai aset dan liabilitas ini harus dinilai kembali dengan nilai kini berdasarkan kondisi hiperinflasi tentunya dengan ketentuan yang beragam juga yang telah diatur dalam PSAK 63.

Berdasarkan fenomena yang sedang terjadi, PSAK 63 memberikan solusi kepada berbagai perusahaan yang sedang mengalami kondisi hiperinflasi. Solusi tersebut berupa arahan kepada perusahaan agar tetap mengakui, mengungkapkan, dan menyajikan nilai kini pada saat hiperinflasi. Berdasarkan analisis dan fenomena yang sedang berkembang tersebut peneliti mengangkat topik "*Implementasi PSAK 63 Tentang Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi (Studi Kasus: PT Waskita Karya Tbk)*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menyebabkan inflasi dari sebuah negara dan bagaimana dengan kondisi di Indonesia saat ini untuk mengatasi inflasi?
2. Bagaimana Analisis Rasio Profitabilitas PT Waskita Karya Tbk Ketika Sebelum Hiperinflasi?
3. Bagaimana Analisis Rasio Profitabilitas PT Waskita Karya Tbk Setelah Terjadi Hiperinflasi dan Analisis Perbandingan Ketika Sebelum Hiperinflasi?
4. Bagaimana Penerapan PSAK 63 Terhadap PT Waskita Karya Tbk Ketika Diasumsikan Sedang Terkena Hiperinflasi Di Indonesia dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan setelah menerapkannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh yang mengakibatkan terjadinya inflasi dan kondisi Indonesia saat ini dalam mengantisipasinya.
2. Untuk mengetahui rasio profitabilitas dan kondisi perusahaan ketika sebelum terjadinya hiperinflasi

3. Untuk mengetahui rasio profabilitas dan kondisi perusahaan ketika setelah terjadinya hiperinflasi sehingga dapat mengetahui analisis perbandingan antara sebelum dan setelah hiperinflasi
4. Untuk mengidentifikasi penerapan PSAK 63 yang terjadi di perusahaan, kemudian untuk mengetahui perbedaan nominal pada pos-pos di laporan keuangan ketika sebelum maupun setelah hiperinflasi, dan untuk mengetahui manfaat perusahaan ketika menerapkan PSAK 63 di laporan keuangannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan teoritis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Output penelitian ini adalah berupa “skripsi” yang dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk peneliti nan selanjutnya
2. Untuk memenuhi syarat dalam menempuh sarjana S1 Akuntansi
3. Sebagai dasar kemunculan teori baru yang akan berguna bagi peneliti selanjutnya

1.4.2 Aspek Praktis

1. Informasi tentang PSAK 63 sebagai dasar dalam menentukan kebijakan perusahaan khususnya saat terjadi hiperinflasi

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus terhadap implementasi/penerapan PSAK 63 bagi perusahaan akibat terjadinya dampak inflasi beserta analisis rasio profitabilitasnya. Penelitian ini tidak menjelaskan dampak inflasi secara luas dan tidak menjelaskan dampak inflasi terhadap perusahaan yang belum menerapkan PSAK.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2,1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novia Nur Handayani, 2019, Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Inflasi Di Indonesia Periode 1999-2018	Inflasi, BI Rate, nilai tukar (IDR/USD), jumlah uang beredar (M1), pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak	Kuantitatif menggunakan model OLS (Ordinary Least Square)	Variabel BI Rate dan Penerimaan Pajak (Tx) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia, sedangkan variabel nilai tukar (KURS), jumlah uang beredar (M1), dan Pengeluaran pemerintah (G) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia
2	Sri Haryani, 2018, Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Per Dolar As, Tingkat Suku Bunga Bi, Der, Roa, Cr, Dan Npm Terhadap Return Saham Industri Real Estate And Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2012-2016	Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Per Dolar AS, Tingkat Suku Bunga BI, Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Real Estate and Property	Kuantitatif dengan data runtut waktu (time series) serta pengumpulan dokumentasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham. (2) Nilai Tukar Rupiah Per Dolar AS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham. (3) Tingkat Suku Bunga BI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham, (4) Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham, (5) Return on Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham, (6) Current Ratio (CR) berpengaruh negatif

				dan tidak signifikan terhadap Return Saham, (7) Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham, dan (8) Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Per Dolar AS, Tingkat Suku Bunga BI, Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Current Ratio (CR), dan Net Profit Margin (NPM) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham
3	Dini Yuniarti Erdah Litriani, 2017, Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Di Sektor Industri Barang Konsumsi Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Tahun 2012-2016	Nilai Tukar Rupiah, Saham Syaiah, Inflasi, dan Harga Saham,	Kuantitatif data runtun waktu (time series) dan Metode yang digunakan adalah metode historis yang bersifat kausal <i>distributif</i>	Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial, variabel inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hal ini menunjukkan bahwa apabila Inflasi naik maka investasi saham di sektor industri barang konsumsi pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) akan meningkat dan sebaliknya.
4	Siska Sukasna, 2017, Fenomena Inflasi Di Indonesia	Fenomena Moneter, Fenomena Fiskal, Harga Minyak, Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Kurs, Output Gap, Pengeluaran Pemerintah	Kuantitatif dengan model regresi berganda dengan metode Error Correction Model (ECM).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar, kurs dan harga minyak berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah dan output gap tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa

				inflasi di Indonesia merupakan fenomena moneter dikarenakan jumlah uang beredar dan kurs yang merupakan variabel yang mewakili fenomena moneter berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah yang merupakan variabel yang mewakili fenomena fiskal tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia
5	Herman Ardiansyah, 2017, Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi	Kuantitatif dengan analisis regresi sederhana.	Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun dan sebaliknya jika inflasi turun maka pertumbuhan ekonomi akan naik.
6	Berlian Karlina, 2017, Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia Pada Tahun 2011-2015	PDB, IHK, tingkat inflasi	kuantitatif dengan multiple regression dan memperlihatkan pengaruh beberapa faktor independen dan faktor dependen	Hasil dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat inflasi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan PDB, dan IHK (Indeks Harga Konsumen) tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Untuk memaksimalkan kesehatan ekonomi melalui pertumbuhan PDB.
7	Adam Axelrio Hartoyo, 2019, Implementasi PSAK 63 Tentang Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi (Studi Kasus: PT Waskita	Implementasi, PSAK 63, Hiperinflasi	Kualitatif Deskriptif dengan studi dokumen.	-

	Karya Tbk)			
--	------------	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagian penelitian hanya mengacu dan menggunakan metode kuantitatif dalam penelitiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Selain itu data yang digunakan adalah data laporan terbaru perusahaan yang sudah *go public*, yakni laporan keuangan tahun 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif maka hasil penelitian ini nantinya akan menjelaskan bagaimana penerapan PSAK 63 ini dapat digunakan di perusahaan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Implementasi atau Penerapan

Ditinjau dari sudut kata, implementasi merupakan perbuatan penerapan (KBBI, 2019). Implementasi merupakan bentuk nyata dalam menjalankan sebuah rencana/program yang telah disusun sebelumnya. Definisi implementasi adalah sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas monoton belaka, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu (Usman dan Purnomo, 2017: 45). Maka dari itu secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapann. Kemudian terdapat konsep dalam implementasi.

Gambar 2.1
Konsep Implementasi



Sumber: Bambang Sunggono, 2010

Dijelaskan bahwa implementasi merupakan gambaran secara umum dalam meninjau sebuah kebijakan yang berlaku. Implementasi akan menghasilkan hasil dan dampak yang berguna ketika peristiwa yang memungkinkan sebuah kebijakan tersebut diterapkan. Implementasi juga dapat menilai suatu kebijakan tersebut layak/tidak diterapkan di masyarakat. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan implementasi/penerapan merupakan kegiatan melaksanakan suatu kebijakan/ aturan yang dilakukan dan berpedoman pada kebijakan/aturan yang berlaku untuk memberikan gambaran apakah kebijakan/aturan yang berlaku tersebut dapat bermanfaat kepada pengguna kebijakan/aturan tersebut dikemudian hari.

2.2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sebuah sarana komunikasi yang menjadi penghubung antara informasi keuangan yang dimiliki perusahaan utama dengan pihak-pihak diluar perusahaan yang juga memiliki kepentingan di perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini akan menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantitatifikasi dalam nilai moneter (Donald E. Kieso, 2017: 187). Ditinjau dari sudut keilmuan akuntansi, tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan mengenai perubahan aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi (Lahu dan Sumarauw, 2017: 79)

Sedangkan menurut Rahman Pura (2018: 77) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi. Laporan ini mengikhtisarkan data transaksi dalam bentuk yang berguna bagi pengambilan keputusan. Argumen ini didukung oleh Kasmir (2018: 102) dengan berpenapat bahwa laporan keuangan juga harus didukung informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misalnya jika perusahaan tersebut bergerak dibidang industri dan geografis maka diperlukan informasi tambahan mengenai industri dan geografis yang mendukung informasi keuangan. Sehingga dalam arti lain laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah informasi yang berasal dari sebuah proses akuntansi yang isinya menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Menurut PSAK 1 (2019) Laporan Keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya

maupun dengan Laporan Keuangan entitas lain. Menurut Kasmir (2018: 104) terdapat 8 tujuan pembuatan atau penyusunan Laporan Keuangan yaitu

1. Memberikan informasi tentang aktiva yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
5. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
7. Memberikan informasi keuangan lainnya. Laporan Keuangan yang dibuat perusahaan perusahaan sangat bermanfaat bagi stakeholder. Stakeholder perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Laporan Keuangan yang baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu.

Gambar 2.2
Peta Konsep Laporan Keuangan Berbasis PSAK



Sumber: Data diolah, 2020

Sebuah laporan keuangan yang berbasis pada PSAK memiliki 5 jenis laporan keuangan. Kelima tersebut adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (PSAK 1, 2019). Dalam pelaksanaannya perusahaan saat pembuatan laporan keuangan, laporan yang pertama kali dibuat adalah laporan laba rugi komprehensif. Dalam laporan laba rugi akan menimbulkan akun yang bernama pendapatan dan beban. Definisi pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (PSAK 23, 2019). Pendapatan akan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal (Dwi Martani, 2016: 90). Pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional dan pendapatan lain-lain. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang

diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan (Soemarso, 2014: 111). Sedangkan sumber-sumber pendapatan di perusahaan dapat diperoleh melalui beberapa sumber seperti:

1. Transaksi modal atau endapan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham.
2. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa “Barang dagangan” seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan.
3. Hadiah, Sumbangan, atau Penemuan
4. Revaluasi Aktiva
5. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk.

(Rizal Yaya, 2017: 67)

Menurut PSAK 26 (2019) menyatakan beban merupakan penurunan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Dalam klasifikasi akun beban akan menimbulkan beberapa akun beban seperti:

1. Beban Akrua

Beban akrual adalah beban yang masih harus dibayar (beban tertentu mungkin telah terjadi), tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai pada periode berikutnya. Pada akhir periode akuntansi adalah

perlu untuk menentukan dan mencatat beban-beban yang telah terjadi ini meskipun belum dibayarkan.

2. Beban Kredit Macet

Beban kredit macet adalah beban yang timbul atas tindakan tertagihnya piutang usaha. Contohnya beban piutang yang tidak dapat ditagih

3. Beban Lain-lain

Beban lain-lain adalah beban yang berasal dari transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

4. Beban Operasional

Beban operasional adalah beban-beban yang terdiri dari beban penjualan, beban umum dan beban administrasi. Laba operasi dihitung dengan cara mengurangkan laba kotor dengan beban operasional.

5. Beban Penjualan

Beban penjualan adalah beban-beban yang terkait langsung dengan segala aktivitas toko atau aktivitas yang mendukung operasional penjualan barang dagang. Contohnya adalah beban gaji atau beban upah karyawan, beban iklan, beban perlengkapan

6. Beban Penyusutan

Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aktiva. Sifat beban penyusutan secara konsep tidak berbeda dengan baban yang mengakui pemanfaatan atas premi asuransi ataupun sewa yang dibayar di muka selama periode berjalan. Beban penyusutan adalah beban yang tidak memerlukan pengeluaran uang kas. Alokasi

harga perolehan aktiva tetap dilakukan dengan cara mendebet akun beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan. Akun beban penyusutan akan tampak dalam laporan laba-rugi, sedangkan akun akumulasi penyusutan akan terlihat dalam neraca.

7. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan beban administrasi merupakan beban-beban yang dikeluarkan dalam rangka mendukung aktiva/urusan kantor (administrasi) dan operasi umum. Contohnya beban gaji, beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan.

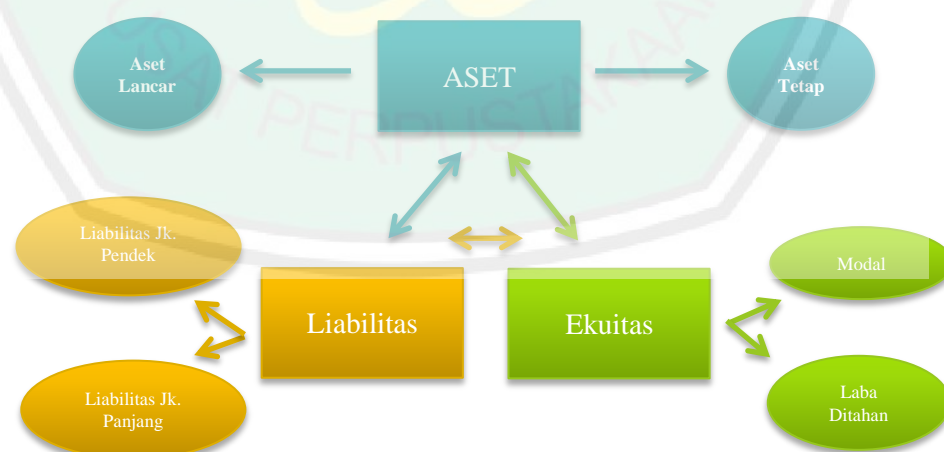
8. Beban yang Ditangguhkan.

Beban yang ditangguhkan adalah beban dibayar di muka pengeluaran-pengeluaran tertentu yang telah dibayarkan namun atas barang atau jasa yang belum digunakan. Untuk bagian dari pengeluaran-pengeluaran yang baru akan digunakan dalam periode berikutnya memerlukan pengakuan sebagai aktiva. Contohnya adalah beban pajak tangguhan.

Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan ekuitas akan menyajikan sumber-sumber yang mengakibatkan ekuitas perusahaan mengalami perubahan yakni berasal dari:

1. Total laba rugi komperhensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diaatribusikan secara terpisah total jumlah yang dapat diaatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali.
2. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 - a) Laba rugi
 - b) Masing-masing pos pendapatan komperhensif lain.
 - c) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

Gambar 2.3
Peta Konsep Laporan Posisi Keuangan



Sumber: Data diolah, 2020

Laporan posisi keuangan memiliki beberapa komponen-komponen penting untuk menggambarkan sebuah kondisi keuangan perusahaan seperti ilustrasi pada (Gambar 2.3). Selain itu laporan posisi keuangan juga menggambarkan nominal posisi keuangan sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di dalamnya akan menggambarkan posisi aset (harta), liabilitas (utang), dan ekuitas (modal). Klasifikasi yang digambarkan ini memang timbul sebagai akibat dari konsep *double entry accounting system* yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akuntansi keuangan. Pertama adalah pos aset, aset/aktiva bisa diartikan sebagai bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha. (Soemarso, 2014: 113). Terdapat 2 komponen aset, yakni aset lancar dan aset tetap. Aset *Lancar (Current Assets)* merupakan sumber-sumber ekonomis yang memiliki *fluktuasi* perputaran di perusahaan dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun. Perputaran tersebut dapat berupa dicairkan menjadi kas, dijual, atau habis dipakai. Contohnya adalah kas, piutang, persediaan, dan perlengkapan. Sedangkan aset tetap adalah aset yang dapat berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal.

Selanjutnya adalah liabilitas (utang). Liabilitas adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain dimasa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Sama

halnya dengan aset, liabilitas juga dibedakan menjadi 2 berdasarkan jangka waktu jatuh temponya. Liabilitas jangka pendek untuk utang kurang dari satu tahun dan liabilitas jangka panjang untuk utang yang lebih dari 1 tahun. Yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas terbagi menjadi 2 yakni Modal dan Laba ditahan. Ekuitas merupakan sumber pendanaan perusahaan yang diperoleh dari pemilik/pemegang saham perusahaan sebagai bentuk kontribusi untuk mendapatkan masa manfaat di masa mendatang atau bisa disebut dengan modal. Selanjutnya ekuitas bisa diperoleh dari selisih lebih antara pendapatan dan beban setelah dikurangi oleh deviden sesuai dengan kebijakan perusahaan. Baik liabilitas maupun ekuitas merupakan sumber utama perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Laporan arus kas. Informasi perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. (PSAK 2, 2019). Menurut Nastalina dkk (2018: 77) laporan arus kas berisi seluruh kegiatan perusahaan selama periode tertentu. Untuk para pengguna laporan keuangan, laporan arus kas bermanfaat untuk menilai kinerja suatu perusahaan atas aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan serta untuk mengetahui aktifitas mana yang menghasilkan dana terbesar bagi perusahaan itu sendiri. Disisi para pengguna laporan keuangan berguna untuk menilai kinerja perusahaan dari perputaran kas setiap aktivitas perusahaan. Kemudian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Catatan atas laporan keuangan menyajikan Informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan

kebijakan akuntansi. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam Laporan Keuangan. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam Laporan Keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami Laporan Keuangan.

Berdasarkan berbagai komponen yang telah dipaparkan. Menurut Kasmir (2018: 110) ada 5 *stakeholder* yang berkepentingan terhadap Laporan Keuangan yang meliputi pemilik, manajemen, kreditor, pemerintah, dan investor.

1. Pemilik

Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil Laporan Keuangan yang telah dibuat adalah

- a) Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b) Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode.
- c) Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

2. Manajemen

Bagi pihak manajemen Laporan Keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting Laporan Keuangan bagi manajemen:

- a) Dengan Laporan Keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.

- b) Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c) Laporan Keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d) Laporan Keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kepentingan pihak kreditor terhadap Laporan Keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pinjaman kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a) Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut. Oleh karena itu, pihak kreditor sebelum mengucurkan kreditnya terlebih dahulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dilihat dari Laporan Keuangan perusahaan yang sudah dibuat.

- b) Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.
- c) Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan

4. Pemerintah

Arti penting Laporan Keuangan bagi pemerintah adalah:

- a) Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b) Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil Laporan Keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor dari hasil Laporan Keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya serta perkembangan nilai saham kedepan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak

2.2.3 Standar Akuntansi Keuangan

Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI sendiri adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. IAI didirikan pada tahun 1957 selain mewadahi para akuntan juga memiliki peran yang lebih besar dalam dunia akuntansi di Indonesia Peran tersebut adalah peran dalam rangka penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di dunia bisnis Indonesia, selain itu menurut PMK No 76 / PMK No 05 Tahun 2008 tentang *Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki definisi prinsip akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha. Pada dasarnya SAK yang dijadikan pedoman dalam penyajian laporan keuangan mengatur dua hal, yaitu standar pengukuran dan standar pengungkapan. Standar pengukuran mengatur tentang bagaimana mengukur transaksi yang terjadi. Standar pengungkapan mengatur tentang apa dan bagaimana suatu kejadian, transaksi, maupun informasi keuangan harus diungkapkan supaya tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan. dikeluarkan oleh badan yang berwenang.

Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAI. Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Standar akuntansi keuangan merupakan pengumuman resmi yang laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu:

1. Pengakuan unsur laporan keuangan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika :

- a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
- b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan

3. Pengukuran unsur laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi.

Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu

4. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan.

Gambar 2.4
Peta Konsep Standar Akuntansi di Indonesia



Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan ilustrasi diatas Setelah hingga tahun 2019 terdapat 4 standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. PSAK, SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah. Keempat standar ini memiliki klasifikasi tersendiri dalam menentukan perusahaan mana yang dapat menggunakan standar akuntansi keuangan. PSAK digunakan untuk perusahaan yang *go public* di bursa efek, SAK ETAP untuk klasifikasi usaha kecil menengah yang memiliki omset pertahun diatas 500 juta, SAK EMKM untuk klasifikasi usaha kecil menengah yang memiliki omset dibawah 500 juta/tahun, dan SAK Syariah untuk perusahaan berbasis syariah.

2.2.4 Standar Akuntansi Keuangan Hiperinflasi (PSAK 63)

Pada tanggal 8 April 2011, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan PSAK 63 tentang Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi. Kemudian dilakukan penyesuaian terhadap PSAK tersebut dan disahkan kembali pada 27 Agustus 2014. PSAK ini hampir keseluruhan merupakan adopsi dari IAS: 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies.

PSAK 63 diterapkan untuk laporan keuangan dari setiap entitas yang mata uang fungsionalnya mengalami kondisi hiperinflasi. Ekonomi suatu negara dapat dikatakan inflasi apabila terindikasi

1. Penduduknya lebih memilih untuk menyimpan kekayaan dalam aset non moneter atau dalam valuta asing yang relatif stabil
2. Penduduknya lebih memilih jumlah moneter dalam mata uang asing yang relatif stabil ketimbang mata uang lokal
3. Tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati 100%

Pernyataan ini diterapkan sejak awal periode pelaporan ketika entitas mengidentifikasi terjadi hiperinflasi dan dianjurkan seluruh entitas menerapkan pada tanggal yang sama. Terdapat beberapa mekanisme penting dalam penyusunan laporan keuangan hiperinflasi yakni :

1. Penyusunan Kembali Laporan Keuangan
 - a) Entitas yang menyusun laporan keuangan dengan dasar biaya historis melakukan perubahan nominal ke mata uang hiperinflasi tanpa mempertimbangan perubahan tingkat harga umum. Ataupun kenaikan harga dari aset atau liabilitas yang diakui. Pengecualian kepada aset dan liabilitas yang diisyaratkan untuk diukur pada nilai wajar. Contoh: aset tetap yang direvaluasi.
 - b) Dalam ekonomi hiperinflasi, laporan keuangan yang disusun menggunakan pendekatan biaya historis maupun biaya kini hanya akan berguna jika dinyatakan dalam unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Selain itu entitas tidak diizinkan

- menyajikan secara terpisah laporan yang tidak disajikan kembali walaupun melampirkan informasi ini.
- c) Apabila terjadi keuntungan/kerugian yang terjadi atas pengukuran pada akhir periode pelaporan atas posisi moneter neto dimasukkan kedalam laba rugi dan diungkapkan secara terpisah.
 - d) Penyajian kembali laporan keuangan mensyaratkan adanya penerapan prosedur dan pertimbangan tersebut secara konsisten dari periode ke periode lebih penting daripada ketepatan presisi dalam menghasilkan jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan yang disajikan kembali.
 - e) Jumlah dalam laporan posisi keuangan yang belum dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan, disajikan kembali dengan menerapkan indeks harga umum.
 - f) Dalam menerapkan indeks harga umum pos-pos moneter tidak disajikan kembali karena sudah dinyatakan dalam unit moneter kini. Pos-pos moneter merupakan uang/item yang dimiliki, akan diterima, dan dibayarkan dalam bentuk uang.
 - g) Aset dan liabilitas melalui perjanjian yang terhubung dengan perubahan harga, disesuaikan dalam laporan keuangan yang disajikan kembali berdasarkan dengan perjanjian untuk memastikan besaran jumlah saldo pada akhir periode pelaporan.
 - h) Untuk pos-pos non moneter disajikan kembali dengan indeks harga umum kecuali nilai realisasi neto dan nilai wajar akibat terjadi

revaluasi.

- i) Pos-pos moneter diperoleh dari biaya perolehan dikurangi penyusutan. Maka disajikan pada biaya kini menggunakan indeks dari tanggal akuisisi dikurangi penyusutan.
- j) Untuk periode saat penyajian kembali banyak hal-hal yang mungkin tak tersedia. Seperti catatan rinci mengenai tanggal akuisisi dan indeks harga umum yang digunakan. Untuk catatan rinci dalam periode pertama kali menggunakan PSAK 63 dibutuhkan penilaian profesional independen sedangkan untuk indeks harga umum menggunakan estimasi berdasarkan pergerakan kurs mata uang fungsional dengan valuta asing yang relatif stabil
- k) Untuk pos non moneter ketika jumlah yang disajikan kembali melebihi jumlah terpulihkan maka diturunkan nilainya sesuai PSAK terkait. Perlakuan persediaan juga sama, yakni diturunkan ke nilai realisasi neto
- l) *Investee* yang dicatat dengan metode ekuitas dapat membuat laporan keuangan hiperinflasi khususnya laporan laba/rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan indeks harga umum untuk menghitung bagian investor atas aset neto dan laba/rugi. Ketikan laporan keuangan *investee* dinyatakan dalam valuta asing, maka laporan tersebut dijabarkan pada kurs penutupan.
- m) Entitas yang memiliki aset dalam suatu perjanjian yang mengizinkan untuk menangguhkan pembayaran tanpa menimbulkan beban bunga

eksplisit. Apabila penentuan jumlah bunga implisit tidak praktis, maka aset tersebut disajikan kembali dari tanggal pembayaran dan bukan tanggal pembelian.

- n) Pada saat periode pertama kali penerapan, komponen ekuitas kecuali saldo laba dan surplus revaluasi disajikan kembali menggunakan indeks harga umum saat tanggal komponen ekuitas tersebut dikonstruksikan atau saat muncul. Sedangkan untuk surplus revaluasi mengeliminasi revaluasi yang timbul pada periode sebelumnya, dan saldo laba yang disajikan ditentukan berdasarkan seluruh jumlah lain dalam laporan posisi keuangan yang disajikan kembali
- o) Pernyataan ini mensyaratkan bahwa seluruh pos dalam laporan laba/rugi dan penghasilan komprehensif lain dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Maka dari itu disajikan menggunakan indeks harga umum sejak penghasilan dan beban tersebut dicatat dalam laporan keuangan.

2. Keuntungan atau Kerugian Posisi Moneter Neto

- a) Dalam suatu periode inflasi, jika entitas memiliki aset moneter melebihi liabilitas moneter, maka daya beli entitas menurun dan sebaliknya. Sepanjang aset dan liabilitas tersebut tidak terkait dengan suatu tingkat harga.
- b) Keuntungan/kerugian posisi moneter neto tersebut dapat ditentukan dari selisih yang timbul atas penyajian kembali aset nonmoneter, ekuitas, dan pos-pos dalam laporan laba rugi beserta penghasilan

komprehensif lain serta penyesuaian aset dan liabilitas yang terkait dengan indeks. Keuntungan/kerugian tersebut dapat diestimasi dengan menerapkan perubahan indeks harga umum terhadap rata-rata tertimbang selama periode dari selisih antara aset moneter dan liabilitas moneter

- c) Keuntungan/kerugian posisi moneter neto dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Penyesuaian terhadap aset dan liabilitas yang terkait dengan perubahan harga (sesuai dengan paragraf sebelumnya) disalinghapuskan dengan keuntungan/kerugian pososo moneter neto.
- d) Keuntungan/kerugian posisi moneter neto dimasukkan ke dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selisih yang ditimbulkan juga mempengaruhi jumlah pajaknya. Maka dicatat sesuai *dengan PSAK 46 : Pajak Penghasilan*
- e) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang menggunakan biaya kini, sebelum penyajian kembali, melaporkan biaya kini pada waktu terjadinya transaksi/peristiwa yang mendasari. Beban pokok penjualan dan penyusutan dicatat pada biaya kini pada waktu pemakaian. Sedangkan penjualan dan beban lain dicatat pada jumlah uang ketika terjadinya. Oleh karena itu seluruh jumlah tersebut perlu disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan dengan menggunakan indeks harga umum

3. Laporan Arus Kas

- a) Seluruh pos dalam laporan arus kas dinyatakan dalam unit

pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. \

4. Laporan Keuangan Konsolidasian

- a) Entitas induk yang membuat laporan keuangan dalam mata uang hiperinflasi dapat memiliki entitas anak yang juga membuat laporan keuangan dalam mata uang hiperinflasi. Laporan keuangan entitas anak perlu disajikan kembali dengan indeks harga umum dari negara yang mata uangnya dilaporkan sebelum dimasukkan dalam laporan konsolidasian yang diterbitkan entitas induk. Jika entitas anak merupakan entitas asing maka laporan keuangan dijabarkan pada kurs penutupan sesuai PSAK 10: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*
- b) Jika laporan keuangan dengan akhir periode pelaporan yang berbeda dikonsolidasikan, maka seluruh pos moneter dan nonmoneter perlu disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada tanggal laporan keuangan konsolidasian

5. Pemilihan dan Penggunaan Indeks Harga Umum

- a) Penyajian kembali laporan keuangan sesuai dengan pernyataan ini mensyaratkan penggunaan indeks harga umum yang mencerminkan perubahan daya beli umum. Dianjurkan seluruh entitas yang menerapkan PSAK ini menerapkan indeks harga yang sama

6. Ekonomi Hiperinflasi Berakhir

- a) Jika ekonomi hiperinflasi berakhir dan entitas menghentikan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan

pernyataan ini maka entitas memperlakukan jumlah yang dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan sebelumnya sebagai dasar jumlah tercatat dalam laporan keuangan selanjutnya

7. Pengungkapan

- a) Entitas membuat pengungkapan sebagai berikut
 - 1) Fakta bahwa laporan keuangan dan angka yang terkait dalam periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk perubahan dalam daya beli umum dari mata uang fungsional, dan sebagai akibatnya disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan
 - 2) Laporan keuangan berdasarkan pada pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini
 - 3) Nama dan tingkat indeks harga pada akhir periode pelaporan dan pergerakan dalam indeks tersebut selama periode pelaporan kini dan sebelumnya
- b) Pengungkapan yang diisyaratkan oleh pernyataan ini diperlukan untuk menjelaskan dasar atas perlakuan pengaruh inflasi dalam laporan keuangan. Pengungkapan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan informasi lain yang diperlukan untuk memahami dasar yang digunakan dari jumlah yang dihasilkan. (PSAK 63, 2019)

2.3 Integrasi Islam

Inflasi merupakan fenomena yang merugikan berbagai kalangan masyarakat. Namun dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam beberapa Surah Al-Quran sebagai berikut:

1. QS Al-Isra: 30

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya”.

2. QS Al-A'raf: 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya:

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

3. Hadist Riwayat Ahmad dan ad-Darimi

Kemudian diperkuat dengan hadist lainnya yakni:

بَلَّ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ

Artinya:

“Akan Tetapi, Allahlah yang menurunkan dan menaikkan harga”

4. Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi

مَا لِي وَلَا دَمٍ فِي مَعْظَمَةِ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ وَلَيْسَ - أَلْقَى أَنْ - لِأَرْجُو وَإِنَّ الرِّزْقَ البَاسِطُ القَابِضُ المُسَعِّرُ هُوَ - إِنَّ

Artinya:

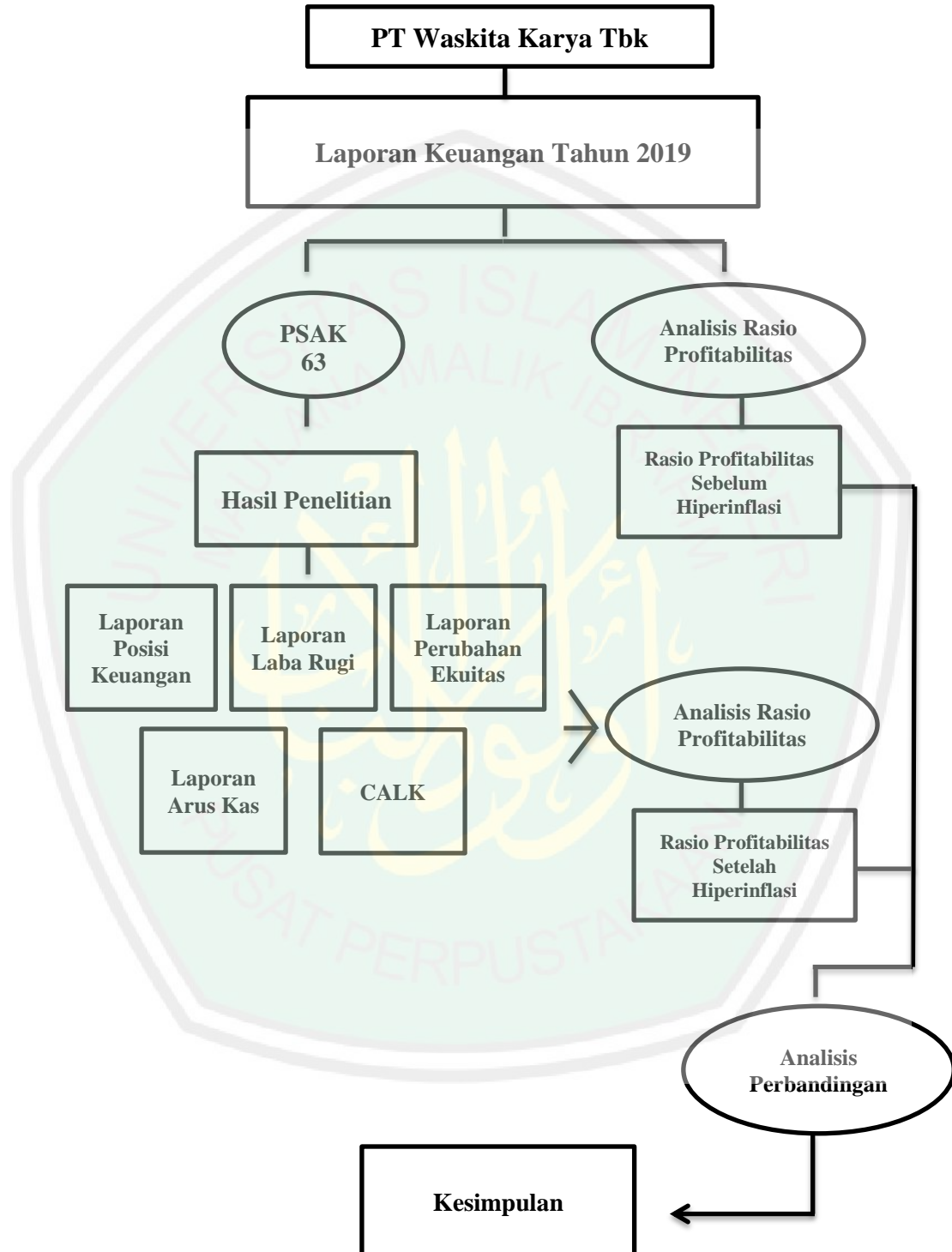
“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi)

Berdasarkan Tafsir dari Ayat dan hadist diatas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan pemikiran konsep antar konsep yang dirumuskan oleh peneliti dari tinjauan tinjauan yang berdasarkan fenomena, teori, dan penelitian penelitin yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan kerangka berfikir untuk penelitian ini:

Gambar 2.5
Kerangka Berfikir Penelitian



Penelitian ini dimulai dari laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk tahun 2019. Kemudian berdasarkan laporan tersebut akan dihitung dahulu rasio profitabilitasnya. Setelah itu laporan keuangan tahun 2019 akan disesuaikan dengan PSAK 63 sebagai acuan dasar penerapan laporan keuangan Hiperinflasi. Setelah itu menyesuaikan dengan indikator-indikator yang terdapat di dalam PSAK 63. Dari hasil menyesuaikan antara PSAK 63 dengan laporan keuangan sebelum hiperinflasi (laporan tahun 2019) akan menghasilkan perbedaan-perbedaan khususnya nominal yang terdapat di laporan keuangan sesuai dengan penerapan indikator yang terdapat dalam PSAK 63. Perbedaan nominal tersebut juga di implementasi sesuai dengan indikator yang menjelaskan di PSAK 63 sehingga menghasilkan hasil penelitian berupa Laporan Keuangan Setelah Hiperinflasi. Kemudian dari laporan keuangan setelah hiperinflasi akan dihitung rasio profitabilitasnya. Maka dari itu timbullah 2 rasio profitabilitas yakni rasio profitabilitas dari tahun 2019 (sebelum hiperinflasi) dan rasio profitabilitas setelah hiperinflasi. Berdasarkan kedua rasio tersebut akan dilakukan analisis perbandingan dan akan menghasilkan analisis rasio profitabilitas antara sebelum dan sesudah hiperinflasi. Kemudian ditariklah sebuah kesimpulan yang akan mencakup seluruh hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dalam teknik implementasi PSAK 63, dibutuhkan sebuah penelitian yang tidak luas namun bersifat representasi mendalam berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di objek penelitian. Sehingga nantinya penelitian ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam sebuah objek tersebut dan jawaban tersebut tidak bersifat generalisasi. Penelitian kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini dikarenakan menurut definisinya penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan terhadap obyek yang alamiah. Obyek dari penelitian kualitatif berkembang dengan sendirinya. Kemudian instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti diharuskan memiliki kemampuan dibidang teori dan wawasan yang luas agar dapat menganalisis dan mengkonstruksi situasi yang terjadi dalam penelitian menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiyono, 2016: 88)..

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif digunakan karena nantinya peneliti akan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang muncul di objek penelitian. Kemudian akan mendeskripsikan bagaimana laporan keuangan menurut dengan kajian ilmiah PSAK 63 untuk menjawab sekaligus menyelesaikan permasalahan yang terdapat di objek penelitian dan fenomena yang beredar saat ini.

Sedangkan pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. (Sugiyono, 2016: 90).

3.2 Lokasi Penelitian

Total Lokasi Penelitian : 1 Perusahaan
Nama Perusahaan : PT Waskita Karya Tbk
Lokasi Penelitian : Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jl. Gajayana No. 50
Kecamatan : Lowokwaru
Kabupaten/Kota : Kota Malang

3.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sasaran-sasaran penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah bagian keuangan yang membuat laporan keuangan di PT Wakita Karya Tbk yang diyakini sangat mengerti dengan kondisi teknis dan problematika dari perusahaan..

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari halaman resmi PT Waskita Karya Tbk (<http://www.waskita.co.id>). Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya karena sudah *Go Public* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode studi dokumen. Studi dokumen diyakini sesuai dengan penelitian ini dikarenakan tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan pula oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. Maka dari itu peneliti mencoba mengkaji teknik studi dokumen dalam penelitian yang dilakukan dikarenakan sesuai dengan teknik yang diambil yakni teknik implementasi. Berdasarkan teori studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016: 94)

3.6 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016: 99) analisis data merupakan kegiatan setelah data tersedia untuk diteliti. Analisis data diawali dengan mengelompokkan data, kemudian merangkum dan menyajikan data, lalu melakukan perhitungan berdasarkan kajian teori yang digunakan untuk menjawab dari permasalahan yang terdapat di rumusan masalah.

.Berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan beberapa langkah yakni:

1. Pertama penulis mengumpulkan data berdasarkan informasi mengenai laporan keuangan PT Waskita Karya yang terdapat di halaman resmi perusahaan (<http://www.waskita.co.id>).
2. Kemudian penulis merangkum hal-hal dan informasi-informasi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan hiperinflasi (reduksi data).
3. Berikutnya penulis melakukan penyajian data dengan metode analisis perbandingan yakni penulis menyajikan data yang telah direduksi kemudian dibandingkan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam PSAK 63 Tentang Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi.
4. Selanjutnya penulis akan menerapkan PSAK 63 berdasarkan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan untuk mengetahui laporan keuangan saat terjadi ekonomi hiperinflasi.
5. Berdasarkan hasil penerapan yang diperoleh, penulis juga memaparkan manfaat dan analisis profitabilitas perusahaan menerapkan PSAK ini baik dilihat dari faktor teknis maupun non teknis.
6. Kemudian setelah menghasilkan sebuah data penelitian berdasarkan dari beberapa metode yang telah dilakukan, penulis akan menarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan memberikan masukan berupa saran bermanfaat.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang PT Waskita Karya Tbk

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Waskita Karya didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1961. Terbentuknya perusahaan ini merupakan dampak dari program pemerintah dalam mengkuisisi perusahaan milik kolonial yang terdapat di Indonesia, perusahaan kolonial tersebut bernama "*Volker Aanemings Maatschappij NV*". Pada masanya, perusahaan ini merupakan perusahaan Hindia-Belanda yang bergerak di bidang konstruksi. Kemudian setelah berganti nama menjadi Perusahaan Negara (PN) Waskita Karya, perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1 Januari 1961.

Pada awal tahun 1970, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1970 status Perusahaan berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan (Persero) dan berganti pula namanya menjadi PT Waskita Karya (Persero). Kemudian pada akhir tahun 2012 yakni tanggal 10 Desember 2012, perusahaan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham/*Initial Public Offering (IPO)* kepada masyarakat sebanyak 3.082.315.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100/saham dan dengan harga penawaran Rp380/saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 19 Desember 2012, dan pada saat itu juga perusahaan

berganti nama menjadi PT Waskita Karya Tbk. Pada akhir tahun 2019 perusahaan mencatatkan 66,04% kepemilikan saham milik Pemerintah Replublik Indonesia dan 33,96% milik swasta.

4.1.2 Ruang Lingkup Kegiatan PT Waskita Karya Tbk

PT Waskita Karya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak sebagian besar dibidang jasa konstruksi. Konstruksi yang dikerjakan meliputi konstruksi sipil dan konstruksi gedung. Konstruksi sipil merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai BUMN ikut serta dalam pembangunan insfrastruktur negara seperti jalan tol, pembangkit listrik, irigasi, bendungan, dan fasilitas negara lainnya. Kemudian konstruksi bangunan merupakan pekerjaan perusahaan yang bekerjasama dengan sipil maupun swasta dalam pembangunan gedung, apartemen, hotel, mall, dan fasilitas lainnya.

Selain jasa konstruksi perusahaan juga bergerak dibidang jasa properti. Perlu diketahui PT Waskita Karya juga melakukan kegiatan dari pembangunan hingga pemasaran properti yang sebagian besar berkedudukan di Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Melalui anak perusahaan yakni PT Waskita Toll Road, perusahaan ikut serta dalam jasa jalan tol. Saat ini terdapat 2 jalan tol yang menjadi tanggung jawab PT Waskita, yakni Jalan Tol Pejagan – Batang dan Jalan Tol Kriyan – Legundi – Bunder.

4.1.3 Visi Dan Misi Perusahaan

Visi :

Menjadi Perusahaan Indonesia Terpercaya Dan Berkelanjutan Di Bidang Konstruksi Terintegrasi Dan Investasi

Misi :

Meningkatkan nilai perusahaan yang berkelanjutan dengan:

1. Mengembangkan sistem dan teknologi yang terintegrasi
2. Membangun fundamental keuangan yang kuat
3. Menerapkan Enterprise Risk Management yang prima
4. Membentuk SDM yang kompeten dan berkinerja unggul
5. Mencapai portofolio yang seimbang melalui investasi di bidang usaha baru.

Motto Perusahaan: IPTEx

1. Integrity : Jujur, Adil, Disiplin, Beretika Kehidupan, Berdedikasi
2. Professionalism : Perencanaan yang Detail, Eksekusi yang Efektif dan Efisien, Mengevaluasi terus menerus, Melakukan Perbaikan terus menerus, Militan
3. Team Work : Terbuka, Peduli, Komunikatif, Partisipatif, Flexible
4. Excellence : Mencintai Pekerjaan, Berorientasi QDC (Quality, Delivery, Cost) dan QHSE (Quality, Health, Safety, Environment)

4.1.4 Lokasi PT Waskita Karya Tbk

Kantor pusat PT Waskita Karya Tbk terletak di Jl. Letjen M.T Haryono Kav. 10 RT 11 / RW 11, Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan data yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya. Maka dalam subbab ini akan menjelaskan tentang analisis mengenai rumusan masalah dan penjelasan mengenai paparan data yang telah disajikan, berikut pembahasannya:

4.2.1 Penyebab Terjadinya Inflasi di Sebuah Negara dan Cara Indonesia Mengantisipasinya

4.2.1.1 Penyebab Terjadinya Inflasi di Sebuah Negara

Inflasi secara garis besar merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus, di dalam sebuah negara dapat terjadi inflasi ketika beberapa kejadian. Berdasarkan beberapa teori, terdapat beberapa yang menjadi penyebab inflasi yaitu :

1. Jumlah Uang Beredar

Ketika jumlah uang pada mata uang fungsional semakin banyak dalam sebuah negara, dan uang tersebut tidak banyak digunakan karena ketergantungan negara terhadap negara lain (utang). Maka uang tersebut juga semakin tidak bernilai lagi. Hal tersebut seperti yang mendasari terjadinya hiperinflasi di Zimbabwe pada 2008 silam. (Medriamel, 2017: 231)

2. Pengaruh Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi (Penawaran dan Penawaran) sangat berpengaruh pada inflasi. Ketika 2008 Indonesia juga pernah terkena inflasi sebesar 11,7%. Menurut Bank Indonesia (2008) hal tersebut dikarenakan dampak ekonomi secara global dan krisis yang terjadi di Asia. Penyebabnya adalah kelangkaan minyak dunia sehingga memicu harga minyak dunia mengalami kenaikan. Karena kelangkaan inilah seperti dalam hukum penawaran dan permintaan, inflasi juga dapat menjadi penyebab dalam sebuah negara.

3. Faktor Eksternal Non Ekonomi

Selain faktor ekonomi, pengaruh dalam bidang non ekonomi juga cukup kuat. Terbukti hiperinflasi juga pernah melanda Indonesia pada krisis ekonomi 1998 sebesar 77,63% (Umar Basuki, 2012: 65) yang salah satu penyebabnya adalah faktor politik yang ketidakpuasan dengan kinerja pemerintah sehingga turunnya Presiden Soeharto pada kala itu.

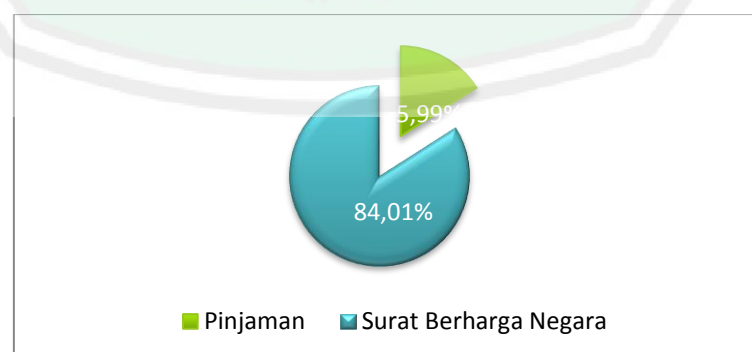
Sama halnya faktor politik berupa pemilu yang terjadi beberapa waktu kemarin di tahun 2019. Pada saat itu inflasi sempat menguat, hal tersebut karena selama masa pemilu antara awal 2019 hingga pertengahan 2019. Terdapat isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti isu ekonomi, agama, ras, dan politik yang secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat harga di pasar. Namun semua itu dapat dikontrol pemerintah sehingga hanya naik 1% dari bulan-bulan sebelumnya karena keguncangan politik yang terjadi di Indonesia.

4.2.1.2 Cara Indonesia Mengantisipasi Inflasi

Indonesia sebagai negara berkembang sangat rentan terkena sebuah inflasi. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki faktor ketergantungan terhadap negara lain yang cukup tinggi. Untuk mengontrol berbagai hal tersebut pemerintah menggunakan sebuah kebijakan yang bernama kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa sektor seperti bahan makanan, elektronik, otomotif, dan dalam beberapa investasi pembangunan negara masih bergantung kepada negara lain. Namun berkaitan dengan kestabilan inflasi Indonesia memiliki kebijakan yang tepat dalam mengantisipasinya

Pertama dalam mengontrol pembangunan infrastruktur yang mendapat perhatian signifikan beberapa tahun terakhir ini tentunya membutuhkan investasi dari beberapa pihak salah satunya ketergantungan terhadap negara lain. Terbukti hingga akhir 2019 utang Indonesia kepada negara lain hanya 15,99% dari keseluruhan hutang negara dan 84,01% adalah penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Sukuk Syariah berikut ilustrasinya :

Gambar 4.1
Jumlah Utang Negara Indonesia
Hingga November 2019

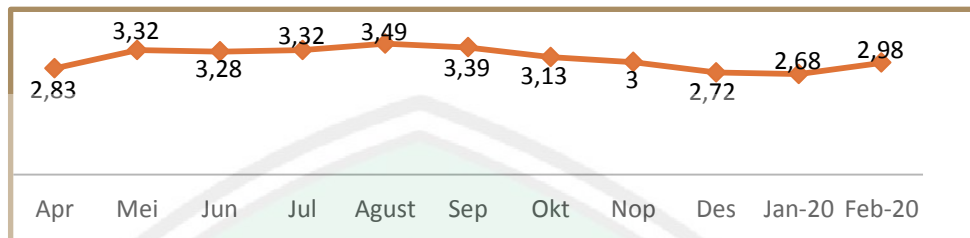


Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Hal tersebut tentunya akan mengontrol jumlah uang beredar khususnya rupiah di Indonesia. Kemudian yang kedua dalam mengontrol impor barang seperti alat elektronik, otomotif, alat kesehatan, alat kelistrikan, dan alat-alat lain yang memang kenyataannya Indonesia belum bisa membuatnya pemerintah dalam hal ini menerapkan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN merupakan regulasi yang mengharuskan perusahaan asing untuk berkontribusi menggunakan komponen hasil produksi Indonesia dalam membuat barang jadi yang nantinya akan dijual di Indonesia. Seperti alat kesehatan yang memiliki TKDN sebesar 60%, alat pertanian 43%, dan alat kelistrikan memiliki rata-rata TKDN 40% (Kementrian Perindustrian, 2020). Ketiga dalam mengontrol stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan budaya, seperti diketahui beberapa waktu belakangan Indonesia diterpa isu politik, agama, dan budaya. Namun secara garis besar pemerintah dapat mengantisipasi keguncangan tersebut dengan cara tarik ulur kebijakan politik dan regulasi antara pihak legislatif dan pihak eksekutif berdasarkan kepentingan rakyat.

Dengan berbagai upaya tersebut menghasilkan dampak positif untuk Indonesia terbukti tingkat inflasi Indonesia tergolong stabil. Berikut ilustrasinya

Gambar 4.2
Tingkat Inflasi
Periode April 2019 – Februari 2020



Sumber: Bank Indonesia, 2020

Tentunya dengan adanya kondisi seperti ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomu melalui indikator inflasi yang terjadi di Indoensia. Tetapi dalam waktu dekat belakangan dunia sedang mengalami kondisi yang tidak terduga yang membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi tidak baik. Yaitu kita sedang berusaha untuk menanggulangi *Virus SARS-CoV-2 (Corona Virus)* yang menyebar di seluruh dunia. Secara tidak langsung dengan adanya musibah mendunia tersebut juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Terbukti hingga 20/03/2020 nilai tukar rupiah tembus Rp16.420,00 terhadap 1 Dollar. Tentunya hal ini akan membuat tingkat inflasi akan semakin tinggi pada bulan ini.

4.2.2 Analisis Rasio Profitabilitas PT Waskita Karya Tbk Tahun 2019 Saat Kondisi Inflasi Normal (3,39%)

Berdasarkan topik penelitian ini penulis memperkuat argumentasi mengenai perubahan yang terjadi pada nilai laporan yang terjadi saat penerapan PSAK 63 menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas akan membantu menghasilkan persentase mengenai kinerja perusahaan,

persentase tersebut akan menilai kelayakan perusahaan bagi pihak yang membutuhkan. Maka dari itu penilaian rasio profitabilitas akan sangat berpengaruh dalam perbedaan yang terjadi atas penilaian kembali laporan keuangan sebelum menggunakan PSAK 63 dan sesudahnya. Sebelum membahas rasio profitabilitas, Indonesia pada tahun 2019 memiliki tingkat inflasi berjalan di angka 3,39%. Perusahaan PT Waskita Karya Tbk merupakan perusahaan BUMN yang telah *Go Public* atau memiliki saham tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Maka dari itu PT Waskita Karya Tbk menggunakan laporan keuangan berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengadopsi dari *International Finance Reporting Standar (IFRS)*. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pelaku investor di BEI, dikarenakan laporan keuangan akan menyajikan informasi yang terstruktur mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas, dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen, sehingga informasi-informasi tersebut akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik (PSAK 1, 2019).

Sehingga yang menjadi dasar perhitungan rasio profitabilitas adalah laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk yang berbasis PSAK dan periode terakhir (Tahun 2019). Kemudian Tingkat profitabilitas PT Waskita Karya Tbk sebelum hiperinflasi dihitung dari 6 metode perhitungan, berikut perhitungannya:

1. *Gross Profit Margin* (Laba Kotor / Pendapatan)

Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan, yang artinya persentase yang dihasilkan merupakan bagian seluruh pendapatan terhadap laba kotor (%). Semakin tinggi persentase akan semakin baik pula untuk perusahaan, berikut perhitungannya:

$$\text{Rp}4.156.289.201.939 / \text{Rp}22.014.896.412.104 = 18,8\%$$

Berdasarkan perhitungan dapat diartikan bahwa dari seluruh pendapatan yang dihasilkan perusahaan, menghasilkan 18,8% bagian laba kotor dan 82,2% merupakan beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian angka ini memiliki arti yang baik karena rata-rata rasio GPM adalah 15% dan perusahaan ini memiliki nilai di atas rata-rata.

2. *Net Profit Margin* (EAT / Pendapatan)

Jika GPM merupakan margin seluruh pendapatan terhadap laba kotor, maka NPM adalah margin/bagian yang dihasilkan pendapatan terhadap laba bersih. Pengukurannya juga sama, bahwa semakin tinggi persentase yang dihasilkan semakin baik, berikut perhitungannya:

$$\text{Rp}1.102.950.087.235 / \text{Rp}22.014.896.412.104 = 5,01\%$$

Berdasarkan perhitungan dapat diartikan bahwa dari seluruh pendapatan yang dihasilkan perusahaan, menghasilkan 5,01% bagian laba bersih, sisanya merupakan beban-beban untuk memperoleh pendapatan tersebut baik secara langsung dan tidak langsung. Angka yang dihasilkan sangatlah bagus, karena perusahaan jasa konstruksi memiliki rata-rata NPM di angka 4%.

3. *Return On Asset Ratio* (EAT / Total Aset)

Rasio keuangan yang menunjukkan hasil tingkat pengembalian atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan dan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam kegiatan operasi dalam penggunaan asetnya, kemudian semakin tinggi rasio ini akan semakin baik juga bagi perusahaan

$$\text{Rp}1.102.950.087.235 / \text{Rp}124.391.581.623.636 = 0,88\%$$

Berdasarkan perhitungan yang dihasilkan angkanya masih dibawah 1%, perusahaan ini memiliki aset yang cukup besar namun belum bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau alasan lainnya adalah karena perusahaan jasa konstruksi memiliki jatuh tempo pembayaran kemungkinan perusahaan telah menyelesaikan proyek pekerjaan namun termin pembayaran yang dilakukan konsumen belum dilakukan pada tahun ini sehingga membuat nilai ROA menjadi sangat kecil, seharusnya perusahaan jasa konstruksi yang baik memiliki angka 5%

4. *Return On Equity Ratio* (EAT / Total Ekuitas)

Sama halnya dengan ROA, ROE juga merupakan tingkat pengembalian laba namun terhadap ekuitas yang dimiliki perusahaan, berikut perhitungannya:

$$\text{Rp}1.102.950.087.235 / \text{Rp}29.226.593.980.323 = 3,77\%$$

Angka yang dihasilkan cukup kecil karena rata-rata tingkat pengembalian ekuitas perusahaan jasa konstruksi adalah 10% dan perusahaan masih 3,77%, mungkin tingkat pengembalian terhadap ekuitas belum maksimal karena termin pembayaran belum jatuh tempo sekarang.

5. *Return On Capital Employed (EBIT / (Aset-Liabilitas))*

Merupakan tingkat pengembalian terhadap modal kerja yang dihasilkan, berikut perhitungannya:

$$\text{Rp}1.301.747.458.429 / \text{Rp}16.378.215.589.599 = 7,94\%$$

Berdasarkan perhitungan bahwa perusahaan memiliki tingkat pengembalian diatas rata-rata (5%). Hal tersebut dirasa baik untuk perkembangan perusahaan kedepannya karena tingkat pengembalian modal kerja yang dilakukan perusahaan sebesar 7,94% dari modal kerja.

6. *Return On Investment (Laba Kotor / Modal Saham)*

ROI merupakan tingkat pengembalian investasi yang menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Kemudian rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan

$$\text{Rp}4.156.289.201.939 / \text{Rp}6.909.416.522.436 = 60,15\%$$

Berdasarkan perhitungan yang dihasilkan perusahaan mencatatkan 60,15%, hal tersebut diatas rata-rata yang hanya 50%. Perusahaan memiliki arti memiliki tingkat efektifitas yang baik sebesar 60,15%, dari investasi yang diberikan dalam melaksanakan operasi perusahaan.

7. *Earning Per Shares ((EAT-Deviden) / Jumlah Saham Beredar)*

Perusahaan memiliki tingkat pengembalian atas saham yang dihasilkan adalah sebesar Rp84,75/lembar saham. Artinya setiap saham yang diatribusikan untuk kepentingan operasional perusahaan akan

menghasilkan Rp84,75 bagi investor. Angka ini cukup baik dan dianggap akan menguntungkan investor ketika menanamkan sahamnya di perusahaan ini.

4.2.3 Analisis Rasio Profitabilitas PT Waskita Karya Tbk Dengan Diasumsikan Terjadi Hiperinflasi (33,32%) dan Analisis Perbandingan Dengan Rasio Profitabilitas Ketika Dalam Inflasi Normal (3,39%)

4.2.3.1 Analisis Rasio Profitabilitas PT Waskita Karya Tbk Dengan Diasumsikan Terjadi Hiperinflasi (33,32%)

Setelah laporan keuangan di nilai kembali (Pada pembahasan 4.2.4) laporan keuangan hiperinflasi menjadi berbeda dengan laporan keuangan sebelumnya. Berdasarkan data tersebut berikut analisis rasio profitabilitas untuk laporan keuangan dalam kondisi hiperinflasi:

1. *Gross Profit Margin* (Laba Kotor / Pendapatan)

$$\text{Rp}2.772.244.897.693 / \text{Rp}14.683.935.906.873 = 18,8\%$$

Sama halnya ketika sebelum hiperinflasi, angka yang dihasilkan juga 18,8% karena seluruh pos laba/rugi mengalami penurunan sehingga menghasilkan persentase yang sama. Angka tersebut sudah termasuk bagus untuk kinerja perusahaan karena diatas rata-rata dari GPM perusahaan jasa konstruksi yang di angka 15%.

2. *Net Profit Margin* (EAT / Penjualan)

$$\text{Rp}(13.934.791.917.248) / \text{Rp}14.683.935.906.873 = -94,8\%$$

Berdasarkan angka yang dihasilkan menghasilkan angka -94,8%. Artinya terdapat negatif 94,8% bagian laba bersih terhadap seluruh pendapatan yang dihasilkan perusahaan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan masih kurang 94,8% untuk menutupi laba bersih. Perbedaan ini disebabkan oleh keuntungan/kerugian posisi moneter neto yang harus disesuaikan ketika hiperinflasi

3. *Return On Asset Ratio* (EAT / Total Aset)

$$\text{Rp}(13.934.791.917.248) / \text{Rp}151.212.940.222.537 = -9,21\%$$

Berdasarkan perhitungan dapat diartikan bahwa perusahaan tidak dapat menghasilkan tingkat pengembalian terhadap aset yang dimiliki, bahkan angkanya menunjukkan -9,21% setelah terjadi hiperinflasi.

4. *Return On Equity Ratio* (EAT / Ekuitas)

$$\text{Rp}(13.934.791.917.248) / \text{Rp}4.792.075.602.031 = -290,7\%$$

Sama halnya dengan ROA, berdasarkan perhitungan dapat diartikan bahwa perusahaan tidak dapat menghasilkan tingkat pengembalian terhadap ekuitas yang dimiliki, bahkan angkanya menunjukkan -290,7%, artinya terdapat pengurangan ekuitas bagi perusahaan sebesar -290,7% untuk menutupi rugi perusahaan akibat hiperinflasi.

5. *Return On Capital Employed* (EBIT / (Aset-Liabilitas))

$$\text{Rp}868.248.456.200 / 4.792.075.602.031 = 18,1\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki tingkat pengembalian akibat modal kerja yang baik yakni dapat

menghasilkan tingkat pengembalian terhadap modal kerja yang dihasilkan, bahkan angkanya menunjukkan 18,1% diatas rata-rata perusahaan jasa konstruksi lainnya yang hanya sebesar 5%.

6. *Return On Investment* (Laba Kotor / Modal Saham)

$$\text{Rp}1.102.950.087.235 / \text{Rp}4.608.580.820.465 = 60,15\%$$

Berdasarkan perhitungan dapat diartikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian terhadap investasi yang telah cukup baik bagi perusahaan. Sehingga menunjukkan tingkat efektifitas terhadap kinerja perusahaan sebesar 60,15% bahkan angkanya diatas rata-rata perusahaan jasa konstruksi lainnya yakni sebesar 50%

7. *Earning Per Shares* ((EAT-Deviden) / Jumlah Saham Beredar)

Dari analisis EPS perusahaan mencatatkan nilai sebesar Rp-1027 per lembar saham menurut laporan laba/rugi setelah hiperinflasi. Artinya perlembar saham yang dihasilkan perusahaan bagi investor harus menanggung kerugian Rp-1027 sebagai efek dari kerugian hiperinflasi.

4.2.3.2 Perbandingan Antara Rasio Profitabilitas Ketika Diasumsikan Terjadi

Hiperinflasi (33,32%) dan Ketika Dalam Inflasi Normal (3,39%)

Tabel 4.1
Perbandingan Analisis Profitabilitas
Laporan Keuangan PT Waskita Karya Tbk
Ketika Terjadi Hiperinflasi (33,32%) dan Ketika Inflasi Normal (3,39%)

Nama Analisis	Sebelum Hiperinflasi	Setelah Hiperinflasi	Keterangan
Gross Profit Margin	18,8%	18,8%	Tetap
Net Profit Margin	5,01%	-94,8%	Turun
Return On Asset Ratio	0,88%	-9,21%	Turun
Return On Equity Ratio	3,77%	-290,7%	Turun

Return On Capital Employed	7,94%	18,1%	Naik
Return On Investment	60,15%	60,15%	Tetap
Earning Per Shares	Rp 84,75	Rp -1027	Turun

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan analisis dari perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi hiperinflasi sangat mempengaruhi kondisi analisis pada laporan keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk, ketika sebelum hiperinflasi perusahaan mengalami tingkat rasio profitabilitas yang baik. Terbukti dengan NPM, GPM, ROCE, dan ROI perusahaan memiliki nilai diatas rata-rata ketimbang perusahaan jasa konstruksi lainnya. Artinya perusahaan memiliki tingkat pengembalian (*return*) yang baik berdasarkan hasil laba yang diperoleh. Dari hasil laba tersebut memunculkan rasio tingkat pengembalian atas kepemilikan aset, liabilitas, dan ekuitasnya dan menunjukkan angka di atas rata-rata. Sehingga merupakan keuntungan bagi investor ketika memiliki saham di PT Wakita Karya.

Kemudian ketika dalam kondisi hiperinflasi tingkat rasio profabilitas perusahaan menjadi yang cenderung turun bahkan negatif. Hal tersebut disebabkan perusahaan yang sebelumnya menghasilkan keuntungan, ketika kondisi hiperinflasi justru mengalami penurunan nilai di berbagai akun perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Dampaknya perusahaan mengalami tingkat rasio profabilitas yang negatif, artinya perusahaan memiliki tingkat pengembalian (*return*) yang buruk atas aset, ekuitas, dan liabilitas yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut tentunya berdampak pada tingkat investor yang ingin menanamkan investasinya.

Padahal perusahaan harus mengambil kebijakan antara menerbitkan saham beredar bagi investor baru atau pemerintah menambahkan setoran modal untuk menutupi kerugian yang dihasilkan sehingga perusahaan dapat melaksanakan kinerjanya seperti saat sebelum hiperinflasi.

4.2.4 Penerapan PSAK 63 Terhadap PT Waskita Karya Tbk Ketika Diasumsikan Sedang Terkena Hiperinflasi (33,32%) di Indonesia dan Manfaat Bagi Perusahaan Ketika Menerapkannya

4.2.4.1 Penerapan PSAK 63 Terhadap PT Waskita Karya Tbk Ketika

Diasumsikan Sedang Terkena Hiperinflasi (33,32%) di Indonesia

Dalam laporan keuangan ekonomi hiperinflasi berdasarkan PSAK 63 haruslah memperhatikan beberapa hal baru dalam penilaian kembali laporan keuangan. Pertama-tama dalam penilaian kembali haruslah menentukan indeks harga umum yakni, laporan keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya merupakan mata uang hiperinflasi, baik berdasarkan pendekatan biaya historis pendekatan biaya kini disajikan dengan unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode pelaporan (PSAK 63:8, 2019). Jumlah dalam laporan posisi keuangan yang belum dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan, disajikan kembali dengan menerapkan indeks harga umum (PSAK 63:11, 2019). Berikut merupakan perhitungan indeks harga umum :

4.2.4.1.1 Dasar Perhitungan Indeks Harga Umum

Tabel 4.2
Kurs Rata-Rata Rupiah Terhadap Dollar
Tahun 2013 – 2019

Tahnn	Kurs Rupiah Rata-Rata Terhadap USD
2019	Rp 14.217,06
2018	Rp 13.882,62
2017	Rp 13.384,13
2016	Rp 13.307,38
2015	Rp 13.391,97
2014	Rp 11.878,30
2013	Rp 10.451,37

Sumber : Bank Indonesia, 2020

Setelah mendapatkan kurs rata-rata tiap tahun berjalan, kemudian digunakan asumsi bahwa Indonesia sedang mengalami kenaikan harga secara tiba-tiba dan signifikan/hiperinflasi seperti yang pernah terjadi pada di Indonesia pada tahun 1972-1974 yang ketika dikalkulasi menyentuh angka 82,46%. Sebenarnya Indonesia di tahun 2008-2010 juga mengalami inflasi secara signifikan karena kenaikan harga minyak global, namun berdasarkan tingkat kumulatif 3 tahun berturut-turut angkanya masih 20,74%. Hal tersebut masih jauh dibawah kriteria dalam PSAK 63, maka dari itu penulis mengangkat inflasi ditahun 1972-1974. Berikut data dan teori yang mendasarinya:

Tabel 4.3
Tingkat Inflasi
Tahun 1972-1974 dan 2008-2010

Tahun	Tingkat Inflasi
1972	25,84
1973	23,30
1974	32,33
2008	11,06
2009	2,78

Mendekati
100%
kumulatif
3 tahun

2010	6,96
------	------

Sumber; Data diolah, 2020

Berdasarkan data diatas tingkat yang digunakan adalah tingkat inflasi akhir tahun 1974 sebesar 33,32%. Asumsi tersebut didasari oleh PSAK 63 Paragraf ke-3 yakni, pernyataan ini tidak menetapkan tingkat inflasi tertentu bahwa inflasi dianggap terjadi. Karakteristik dari lingkungan ekonomi dalam suatu negara ketika hiperinflasi antara lain tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati/melebihi 100%. Ketika digunakan tahun 2008-2010 maka syarat tersebut belum terpenuhi, maka dari itu penulis menggunakan kejadian di tahun 1972-1974 di Indonesia.

Berikut perhitungan indeks harga umum :

Cara perhitungan Indeks :

Kurs rupiah rata-rata tahun 2019	= Rp14.217,06
(14.217,06 x 33,32% = 18.954,18)	
Kurs rupiah jika terjadi hiperinflasi	= Rp18.854,18
Indeks Harga Saat ini	= Rp18.854,18
Indeks Harga Sebelum Terjadinya Hiperinflasi	Rp14.217,06
Indeks Harga Umum 2019	= 1,333

Tabel 4.4
Indeks Harga Umum Hiperinflasi
Tahun 2013-2019

Nilai Saat Ini (Hiperinflasi)	Tahun	Nilai Rata-rata Rupiah Tahun ke-N	Indeks Harga Umum
Rp18.854,18	2019	Rp 14.217,06	1,333
Rp18.854,18	2018	Rp 13.882,62	1,365
Rp18.854,18	2017	Rp 13.384,13	1,416
Rp18.854,18	2016	Rp 13.307,38	1,424
Rp18.854,18	2015	Rp 13.391,97	1,415
Rp18.854,18	2014	Rp 11.878,30	1,595

Rp18.854,18	2013	Rp 10.451,37	1,813
Rp18.854,18	2012	Rp 9.380,39	2,020
Rp18.854,18	2011	Rp 8779,49	2,158
Rp18.854,18	2010	Rp 9084,55	2,086

Sumber: Data diolah, 2020

Dipilih kurs rupiah terhadap US Dollar dikarenakan US Dollar merupakan mata uang paling stabil terhadap rupiah selama beberapa tahun terakhir sesuai dengan ketentuan, pada saat awal penyajian kembali indeks harga umum mungkin tidak tersedia, mungkin perlu menggunakan estimasi pergerakan kurs mata uang fungsional dan valuta asing yang stabil (PSAK 63:17, 2019).

4.2.4.1.2 Penentuan Pos Moneter dan Pos Non Moneter

Dalam penerapan hiperinflasi yang dikerjakan pertama kali adalah laporan posisi keuangan untuk menentukan besarnya keuntungan/kerugian posisi moneter neto akibat hiperinflasi. Kemudian setelah menentukan indeks harga umum, dalam penilaian kembali hiperinflasi diperlukan pemisahan antara pos moneter dan pos non moneter. Hal tersebut berdasar pada PSAK paragraf 12 dan 14 PSAK 63, yang berkesimpulan bahwa beberapa pos moneter tidak disajikan kembali dengan indeks harga umum karena sudah mencerminkan nilai kini pada akhir periode pelaporan, sedangkan pos non moneter disajikan kembali dengan indeks harga umum. Meskipun terdapat ketentuan lain yang akan dijelaskan di subbab selanjutnya. Berikut merupakan pemisahan akun pos moneter dan pos non moneter dalam laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk.

Tabel 4.5
Penentuan Pos Moneter dan Pos Non Moneter

Pos Moneter	Pos Non Moneter
Kas Setara Kas	Persediaan
Piutang Usaha	Aset Konsesi
Tagihan Bruto	Pajak Dibayar Dimuka
Surat Utang	Biaya Dibayar Dimuka
Utang Obligasi	Properti Investasi
Utang Usaha	Aset Tetap
Utang Bank	Aset Tak Berwujud
Utang Lembaga Keuangan Non Bank	Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan
Utang Bruto	Aset Lain-lain
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Uang Muka dan Utang Uang muka
Utang Pajak	Komponen Ekuitas
Liabilitas Imbalan kerja	Komponen Laba / Rugi
Liabilitas Lain-lain	

Sumber: Data diolah, 2020

4.2.4.1.3 Analisis Kertas Kerja Hiperinflasi

Dalam penerapan nilai kini berdasarkan indeks harga umum, pos moneter dan pos non moneter kedua-duanya akan dibedakan menjadi 2 jenis menurut PSAK 63, berikut karakteristik perbedaannya :

1. Pos Moneter Terhubung Indeks Dinilai Sebesar Nilai Wajar

Terdapat pernyataan bahwa pos moneter merupakan yang tidak disesuaikan kembali berdasarkan indeks harga umum (PSAK,63:12, 2019). Namun diperkuat dengan pernyataan, pos moneter dan liabilitas moneter (piutang dan pinjaman) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur sebesar nilai wajar (PSAK 55:9, 2019). Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dirasa cukup benar karena ketika kita memiliki piutang pokok sebesar Rp10.000.000 yang terjadi saat 10 tahun yang lalu, nilai pokok tersebut akan turun ketika 10 tahun yang akan mendatang, bahkan ketika terjadi hiperinflasi nilai tersebut menjadi tidak bernilai apa-

apa/turun drastis. Hal tersebut berbanding terbalik ketika kita memiliki utang. Ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud paragraf 12 PSAK 63 adalah akun kas, karena kas memiliki nilai tetap meskipun di berbeda kondisi. Nominal kas sudah merupakan nilai kini pada akhir periode pelaporan. Berikut beberapa akun dan kertas kerjanya dengan klasifikasi pos moneter terhubung dengan indeks dinilai sebesar nilai wajar:

- a. Piutang Usaha (Lampiran 2 dan 10)
 - b. Tagihan Bruto Jk Pendek (Lampiran 3)
 - c. Utang Usaha (Lampiran 10)
 - d. Utang Bruto Sub Kontraktor Jk Pendek (Lampiran 10)
 - e. Utang Bruto Sub Kontraktor Jk Panjang (Lampiran 17)
 - f. Utang Pajak Jk Pendek (Lampiran 11)
 - g. Utang Lainnya Jk Pendek (Lampiran 11)
 - h. Utang Lainnya Jk Panjang (Lampiran 18)
 - i. Biaya Yang Masih Harus Dibayar (Lampiran 11)
 - j. Utang Ventura Bersama (Lampiran 16)
 - k. Liabilitas Imbalan Kerja (Lampiran 18)
 - l. Utang Uang Muka Subkontraktor Jk Pendek (Lampiran 13)
 - m. Utang Uang Muka Subkontraktor Jk Panjang (Lampiran 17)
2. Pos Moneter Yang Terhubung Dengan Perlakuan Khusus

Setelah diapaparkan akun-akun pos moneter yang dikaitkan dengan indeks dikarenakan nilai wajar. Hampir sama dengan pos moneter sebelumnya, akun-akun dalam pos moneter kali ini ada kaitannya dengan

perubahan harga yang akan disesuaikan dengan indeks harga umum pada tahun sebelumnya. Sesuai dengan PSAK 63 yang menyebutkan, aset dan liabilitas melalui perjanjian yang terhubung perubahan harga (pinjaman dan obligasi) dikaitkan dengan indeks dan disesuaikan berdasarkan perjanjian untuk memastikan besaran saldo pada akhir pelaporan (PSAK 63:13, 2019). Dalam hal ini dapat disimpulkan akun-akun yang terkait merupakan akun yang akan mengurangi/memberi manfaat pada masa mendatang seperti obligasi dan pinjaman bank. Berikut merupakan akun-akun dengan klasifikasi tersebut:

- a. Utang Bank Jangka Pendek (Lampiran 12)
 - b. Utang Bank Jangka Panjang (Lampiran 17)
 - c. Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Pendek (Lampiran 13)
 - d. Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang (Lampiran 16)
 - e. Utang Pembelian Aset Tetap (Lampiran 14)
 - f. Surat Utang Jangka Menengah (Lampiran 14)
 - g. Utang Obligasi (Lampiran 14)
3. Pos Non Moneter Yang Terhubung Dengan Indeks

Sesuai dengan PSAK 63, seluruh aset dan liabilitas lain (yang tak termasuk kriteria dalam kedua pos moneter diatas) merupakan pos non moneter dan dinilai kembali menggunakan indeks harga umum (PSAK 63:14, 2019) Berikut merupakan akun-akun dengan pos non moneter yang terhubung dengan indeks :

- a. Investasi Jangka Pendek (Lampiran 4)

- b. Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi (Lampiran 4)
 - c. Pajak Dibayar Dimuka (Lampiran 5)
 - d. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka (Lampiran 5)
 - e. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan (Lampiran 7)
 - f. Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura (Lampiran 8)
 - g. Invenstasi Jangka Panjang Lainnya (Lampiran 18)
 - h. Aset Lain-lain (Lampiran 9)
 - i. Komponen Ekuitas (Lampiran 19)
 - j. Komponen Laba / Rugi (Lampiran 20)
4. Pos Non Moneter Yang Terhubung Dengan Perlakuan Khusus

Berdasarkan PSAK 63, terdapat 2 pernyataan yang berkaitan dengan aset tetap. Sebagian besar pos non moneter dicatat pada biaya perolehan dikurangi penyusutan. Oleh sebab itu, pos tersebut dinyatakan jumlah kini dari tanggal akuisisi sampai akhir periode pelaporan (PSAK 63:15, 2019), kemudian beberapa pos non moneter dicatat pada jumlah kini selain tanggal akuisisi seperti aset tetap yang telah di revaluasi (PSAK 63:18, 2019). Berdasarkan 2 pernyataan tersebut maka akun-akun yang termasuk kriterianya adalah :

- a. Aset Tetap (Lampiran 6)
- b. Persediaan (Lampiran 4)
- c. Goodwill (Lampiran 6)
- d. Aset Tak Berwujud / Hak Penguasaan Jalan Tol (Lampiran 7)
- e. Properti Investasi (Lampiran 9)

4.2.4.1.4 Laporan Keuangan PT Waskita Karya Tbk Dalam Ekonomi Hiperinflasi

Setelah diaparkan teknik penilaian kembali berdasarkan 4 kriteria yang dimaksud PSAK 63, kemudian laporan keuangan disusun kembali dengan dan menghasilkan pos baru yakni kerugian/keuntungan posisi moneter neto. Kemudian perlakuan khusus juga terjadi pada Laporan Arus Kas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa nominal kas tidak berubah, namun seluruh komponen di dalam Laporan Arus Kas akan disesuaikan dengan indeks harga umum. Penyajian tersebut sesuai paragraf 33 di PSAK 63, maksud dari penyajian tersebut dimaksudkan agar nilai dalam Laporan Arus Kas akan mencerminkan penurunan nilai ketika hiperinflasi, ketika perusahaan memiliki nominal sebesar Rp 3.496.054.056.402, saat hiperinflasi nilainya turun menjadi Rp2.331.868.055.620. Berikut merupakan penyajian laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk dalam kondisi hiperinflasi

Tabel 4.6
PT Waskita Karya Tbk
Laporan Posisi Keuangan Dalam Kondisi Hiperinflasi

ASET LANCAR				CURRENT ASSETS		
Kas dan Setara Kas	3, 51, 54	Rp	3.496.054.056.402	Rp	3.496.054.056.402	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka-Pendek	4	Rp	8.448.200.000	Rp	5.634.949.400	Short-Term Investments
Piutang Usaha - Bersih						Accounts Receivable - Net
Pihak Berelasi	5, 54	Rp	6.222.694.024.900	Rp	4.150.536.914.608	Related Parties
Pihak Ketiga	5	Rp	1.663.957.851.050	Rp	1.109.859.886.650	Third Parties
Piutang Retensi - Bersih						Retention Receivables - Net
Pihak Berelasi	7, 54	Rp	1.163.873.403.181	Rp	776.303.559.922	Related Parties
Pihak Ketiga	7	Rp	336.205.040.617	Rp	224.248.762.091	Third Parties
Piutang Lain-lain lancar - Bersih						Other Current Receivable - Net
Pihak Berelasi	8, 54	Rp	4.632.885.232.690	Rp	3.090.134.450.204	Related Parties
Pihak Ketiga	8	Rp	6.081.616.185.428	Rp	4.058.384.400.217	Third Parties
Piutang Ventura Bersama	6	Rp	2.079.324.266.573	Rp	1.386.909.285.804	Joint Ventures Receivables
Persediaan	9	Rp	4.642.199.255.674	Rp	5.602.901.880.937	Inventories
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa						Gross Amount Due From Customers
Bagian Lancar						Current Portion
Pihak Berelasi	10, 54	Rp	25.645.068.542.574	Rp	17.105.260.717.897	Related Parties
Pihak Ketiga	10	Rp	4.357.305.665.809	Rp	2.906.322.879.094	Third Parties
Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi						Financial Asset From Concession Project -
Bagian Lancar	20	Rp	3.365.302.879	Rp	2.244.657.020	Current Portion
Pajak Dibayar Dimuka	11	Rp	4.348.829.367.249	Rp	2.900.669.187.955	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	12	Rp	1.559.413.271.874	Rp	1.040.128.652.340	Advances and Prepayments
TOTAL ASET LANCAR		Rp	66.989.129.822.191	Rp	47.855.594.240.542	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS		
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	13	Rp	7.687.625.148.306	Rp	5.127.645.973.921	Investment in Associates and Joint Ventures
Piutang Lain-lain Tidak Lancar						
Pihak Berelasi	8, 54	Rp	38.681.366.117	Rp	25.800.471.200	Related Parties
Pihak Ketiga	8	Rp	40.363.436.530	Rp	26.922.412.166	Third Parties
Properti Investasi	14	Rp	126.279.404.689	Rp	172.371.387.400	Investment Properties
Investasi Jangka Panjang Lainnya	15	Rp	360.506.923.000	Rp	240.458.117.641	Other Long-Term Investments
Aset Tetap - Bersih	16	Rp	7.936.440.182.644	Rp	10.806.190.640.573	Fixed Assets - Net
Goodwill	17	Rp	1.995.908.825.753	Rp	2.827.617.596.616	Goodwill
Aset Tak Berwujud						Intangible Assets
Hak Pengusahaan Jalan Tol	19	Rp	51.149.405.567.177	Rp	82.145.700.740.314	Toll Road Concession Rights
Aset Keuangan atas Proyek Konsesi	20	Rp	349.578.847.341	Rp	233.169.091.176	Financial Assets from Concession Project
Aset Pajak Tangguhan	11	Rp	1.219.284.809	Rp	1.625.306.650	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	18	Rp	1.312.711.361.094	Rp	1.749.844.244.338	Other Assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		Rp	70.998.720.347.460	Rp	103.357.345.981.995	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		Rp	124.391.581.623.636	Rp	151.212.940.222.537	TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS			2019	SETELAH HIPERINFLASI	LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES	
Utang Usaha	21	Rp	12.912.997.224.235	Rp	17.213.025.299.905	Accounts Payable
Utang Bank Jangka Pendek					Short-Term Bank Loans	
Pihak Berelasi	22, 54	Rp	19.294.931.223.555	Rp	26.007.990.716.415	Related Parties
Pihak Ketiga	22	Rp	16.170.304.061.331	Rp	22.598.169.434.594	Third Parties
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Bagian Jangka Pendek					Loan to Financial Institution Non-Bank Short-Term Portion	
Pihak Berelasi	23, 54	Rp	508.845.493.920	Rp	690.854.774.940	Related Parties
Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek Pihak Berelasi	24	Rp	1.752.071.991.068	Rp	2.335.511.964.094	Short-Term Gross Amount Due to Subcontractors
Biaya yang Masih Harus Dibayar	26	Rp	755.869.338.569	Rp	1.007.573.828.312	Accrued Expenses
Utang Pajak Jangka Pendek	11	Rp	3.758.782.664.335	Rp	5.010.457.291.559	Short-Term Taxes Payables
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek					Advances on Short-Term Contract	
Pihak Berelasi	25, 54	Rp	96.454.399.437	Rp	123.991.544.690	Related Parties
Pihak Ketiga	25	Rp	195.222.589.204	Rp	269.114.887.305	Third Parties Current Maturities of
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	30	Rp	416.500.000.000	Rp	555.194.500.000	Long-Term Bank Loan
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Lancar	32	Rp	68.075.729	Rp	90.744.947	Debt Purchases of Fixed Assets - Current Portion
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	27	Rp	1.050.878.282.542	Rp	1.400.820.750.628	Short-Term Medium Term Notes
Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih	28	Rp	747.000.000.000	Rp	995.751.000.000	Short-Term Bonds Payable - Net
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	29	Rp	1.217.875.938.108	Rp	1.623.428.625.498	Other Short-Term Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		Rp	58.877.801.282.033	Rp	79.831.975.362.888	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES	
Utang Bank Jangka Panjang					Long-Term Bank Loans	
Pihak Berelasi	30, 54	Rp	16.918.823.660.317	Rp	22.823.180.895.631	Related Parties
Pihak Ketiga	30	Rp	13.155.048.012.022	Rp	17.060.335.296.656	Third Parties
Utang Ventura Bersama Jangka Panjang	31	Rp	770.564.755.648	Rp	1.027.162.819.279	Long-Term Joint Venture Payable
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang					Long Term Loan to Financial Institution Non Bank	
Pihak Ketiga	23	Rp	355.412.409.460	Rp	817.813.259.334	Third Parties
Utang Bruto Subkontraktor Jangka Panjang					Long-Term Gross Amount	
Pihak Ketiga	24	Rp	1.424.477.398.203	Rp	1.898.828.371.805	Third Parties
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang					Advances on Long-Term Contract	
Pihak Berelasi	34, 54	Rp	4.985.756.856	Rp	6.646.013.889	Related Parties
Pihak Ketiga	34	Rp	147.263.647.577	Rp	196.302.442.220	Third Parties
Liabilitas Pajak Tangguhan	11	Rp	92.177.409.072	Rp	122.872.486.293	Deferred Tax Liabilities
Utang Pajak Jangka Panjang	11				Long-Term Taxes Payable	
Utang Lain-lain Jangka Panjang					Other Long-Term Payables	
Pihak Berelasi	33, 54	Rp	825.671.398.210	Rp	1.100.619.973.814	Related Parties
Pihak Ketiga	33	Rp	1.600.818.227.144	Rp	2.133.890.696.783	Third Parties
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	27	Rp	300.000.000.000	Rp	476.625.858.470	Long-Term Medium Term Notes
Utang Obligasi Jangka Panjang - Bersih	28	Rp	13.445.120.532.349	Rp	18.797.700.933.178	Long-Term Bonds Payable - Net
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Jangka Panjang	32	Rp	360.736	Rp	7.031.448	Debt Purchases of Fixed Assets - Long-Term Portion
Liabilitas Imbalan Kerja	35	Rp	95.201.184.410	Rp	126.903.178.819	Employee Benefit Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		Rp	49.135.564.752.004	Rp	66.588.889.257.618	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		Rp	108.013.366.034.037	Rp	146.420.864.620.506	TOTAL LIABILITIES

EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Share Capital
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per Saham pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 Modal Dasar - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 25.999.999.999 Saham Seri B pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 13.573.902.599 Saham Seri B pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018	36	1.357.390.259.999	Rp	905.379.303.419
Tambahan Modal Disetor	37	5.552.026.262.437	Rp	3.703.201.517.045
Saldo Laba	38			
Telah Ditentukan Penggunaannya		1.672.393.928.212	Rp	1.115.486.750.117
Belum Ditentukan Penggunaannya		8.838.449.000.097	Rp	(8.806.817.099.779)
Komponen Ekuitas Lainnya		739.633.269.559	Rp	493.335.390.796
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan				Total Equity Attributable to
 Kepada Pemilik Entitas Induk		18.159.892.720.304	Rp	(2.589.414.138.401)
 Kepentingan Non-Pengendali	46	11.066.701.260.019	Rp	7.381.489.740.433
JUMLAH EKUITAS		29.226.593.980.323	Rp	4.792.075.602.031
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		137.239.960.014.360	Rp	151.212.940.222.537

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.7
PT Waskita Karya Tbk
Laporan Laba / Rugi Dalam Kondisi Hiperinflasi

	Notes	2019	SETELAH HIPERINFLASI	
Pendapatan Usaha	39, 55	Rp 22.014.896.412.104	Rp 14.683.935.906.873	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	40	Rp (17.858.607.210.165)	Rp (11.911.691.009.181)	Cost of Revenues
LABA BRUTO		Rp 4.156.289.201.939	Rp 2.772.244.897.693	GROSS PROFIT
Beban Penjualan	41	Rp (38.009.723.714)	Rp (25.352.485.717)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	41	Rp (736.789.674.525)	Rp (491.438.712.908)	General and Administrative Expenses
Beban Pajak Final	11	Rp (478.192.215.198)	Rp (318.971.306.109)	Final Tax Expenses
Pendapatan Bunga		Rp 689.146.394.743	Rp 459.660.645.294	Interest Income
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih		Rp (9.341.247.028)	Rp (6.230.611.768)	Gain (Loss) on Foreign Exchange Rates - Net
Pendapatan Lain - lain	42	Rp 376.022.155.899	Rp 250.806.777.985	Other Income
Beban Lain-lain	43	Rp (61.879.183.447)	Rp (41.273.415.359)	Other Expenses
LABA SEBELUM BEBAN KEUANGAN, BAGIAN LABA BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA		Rp 3.897.245.708.669	Rp 2.599.445.789.110	PROFIT BEFORE FINANCIAL CHARGES, EQUITY IN NET INCOME OF ASSOCIATES AND JOINT VENTURES
Beban Keuangan	44	Rp (2.589.169.641.158)	Rp (1.726.976.150.652)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	45	Rp (6.328.609.082)	Rp (4.221.182.258)	Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures
LABA SEBELUM PAJAK		Rp 1.301.747.458.429	Rp 868.248.456.200	PROFIT BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	11	Rp (198.797.371.194)	Rp (132.597.846.586)	Income Tax Expenses
Keuntungan (Kerugian) Posisi Moneter Neto			Rp (14.670.442.526.861)	
LABA PERIODE BERJALAN		Rp 1.102.950.087.235	Rp (13.934.791.917.248)	PROFIT FOR THE PERIOD

Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi				Items that Will Not Be Reclassified Subsequently to Profit and Loss
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Bersih		Rp 3.817.342.992	Rp 2.546.167.776	Remeasurement of Defined Benefit Obligations - Net
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi				Items that Will Be Reclassified Subsequently to Profit and Loss
Selisih Kurs Penjabaran				Exchange Difference on Translation
Laporan Keuangan dari Kegiatan Operasi Luar Negeri		Rp (4.662.013.077)	Rp (3.109.562.722)	of Financial Statements in Foreign Operational
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Periode Berjalan		Rp (844.670.085)	Rp (563.394.947)	Total Other Comprehensive Income (Expenses) For The Period
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN		Rp 1.102.105.417.150	Rp (13.935.918.707.141)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		Rp 1.150.330.832.978	Rp (13.903.188.959.837)	Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	46	Rp (47.380.745.743)	Rp (31.602.957.411)	Non-Controlling Interest
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		Rp 1.102.950.087.235	Rp (13.934.791.917.248)	PROFIT FOR THE PERIOD
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		Rp 1.149.486.162.893	Rp (13.904.315.749.731)	Owners of the Parent
Kepentingan Non-Pengendali	46	Rp (47.380.745.743)	Rp (31.602.957.411)	Non-Controlling Interest
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN		Rp 1.102.105.417.150	Rp (13.935.918.707.141)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
Laba (Rugi) Per Saham) per saham Dasar	47	84,75	-1027	Earnings per share Basic

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.8
PT Waskita Karya Tbk
Laporan Arus Kas Dalam Kondisi Hiperinflasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES	
Penerimaan dari Ventura Bersama	1,333	Rp	522.627.859.275	Rp	348.592.782.136	Receipt from Joint Ventures
Penempatan pada Ventura Bersama	1,333	Rp	(1.696.055.390.141)	Rp	(1.131.268.945.224)	Placement of Joint Ventures
Penempatan Deposito	1,333	Rp	(107.500.000.000)	Rp	(71.702.500.000)	Placement of Time Deposits
Penerimaan Pencairan Deposito	1,333	Rp	3.218.230.908.849	Rp	2.146.560.016.202	Receipt from Time Deposits
Penerimaan Dividen dari Entitas Anak						Receipt Dividend from Subsidiaries
Perolehan Aset Tetap						Acquisition of Fixed Assets
Penambahan Penyertaan Entitas Anak	1,333	Rp	(1.887.926.305.710)	Rp	(1.259.246.845.909)	Acquisition of Subsidiaries
Penambahan Properti Investasi				Rp	-	Addition of Investment Properties
Perolehan Aset Tak Berwujud	1,333	Rp	(12.313.115.769.759)	Rp	(8.212.848.218.429)	Acquisition of Intangible Assets
Penempatan Investasi Jangka Pendek						Placement of Short-Term Investments
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Jangka Panjang Lainnya	1,333	Rp	(1.202.443.504.130)	Rp	(802.029.817.255)	Placement of Investment in Associates and Long-Term Investments
Penerimaan atas Pelepasan Penyertaan Pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi						Receipt from Disposal of Investment in Subsidiaries and Associates
Pinjaman Diberikan kepada Entitas Asosiasi						Loans to Associates
Pengurangan Penyertaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	1,333	Rp	(2.188.900.868)	Rp	(1.459.996.879)	Reduction of Investment in Subsidiaries and Associates
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	1,333	Rp	(13.468.371.102.484)	Rp	(8.983.403.525.357)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pelunasan Utang Obligasi	1,333	Rp	(2.000.000.000.000)	Rp	(1.334.000.000.000)	Payment of Bonds Payable
Pembayaran Emisi Obligasi	1,333	Rp	(23.809.585.700)	Rp	(15.880.993.662)	Bonds Issuance Costs
Penerimaan Penerbitan Obligasi	1,333	Rp	2.341.795.843.747	Rp	1.561.977.827.779	Receipt from Bonds Issuance
Penerimaan Pinjaman Bank	1,333	Rp	80.404.597.166.057	Rp	53.629.866.309.760	Receipt from Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank	1,333	Rp	(69.710.447.492.279)	Rp	(46.496.868.477.350)	Payment of Bank Loans
Pembayaran Dividen Tunai	1,333	Rp	(794.449.156.029)	Rp	(529.897.587.071)	Payment of Cash Dividend
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	1,333	Rp	309.854.474.357	Rp	206.672.934.396	Receipt from Financial Institution Non Bank
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank						Payment to Financial Institution Non Bank
Penerimaan Surat Utang Jangka Menengah	1,333	Rp	749.711.893.798	Rp	500.057.833.163	Receipt from Medium Term Notes
Pembayaran Surat Utang Jangka Menengah						Payment to Medium Term Notes
Penerimaan Setoran dari Entitas Non-Pengendali	1,333	Rp	(500.852.934.774)	Rp	(334.068.907.494)	Receipt from Non-controlling Interest
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1,333	Rp	11.004.479.529.449	Rp	7.339.987.846.142	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1,333	Rp	(7.339.695.877.488)	Rp	(4.895.577.150.285)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KEUNTUNGAN SELISIH KURS YANG BELUM DIREALISASI	1,333	Rp	(9.928.283.312)	Rp	(6.622.164.969)	UNREALIZED GAIN ON FOREIGN EXCHANGE RATE
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	1,333	Rp	10.845.678.217.202	Rp	7.234.067.370.874	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	1,333	Rp	3.496.054.056.402	Rp	2.331.868.055.620	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF PERIOD

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.9
PT Waskita Karya Tbk
Laporan Perubahan Ekuitas Dalam Kondisi Hiperinflasi

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Shares Capital	Tambah Modal Disetor/	Saldo laba/ Retained earnings			Selisih Penjabaran			Kepentingan	
				Ditentukan	Belum Ditentukan	Jumlah/ Total	Laporan Dalam	Surplus Revaluasi/	Jumlah/ Total	Non-Pengendali/ Non-Controlling	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
				Penggunaannya/ Appropriated	Penggunaannya/ Unappropriated		Mata Uang Asing/ Translation Adjustment	Revaluasi/ Surplus		Interest	
SALDO PER 31 DESEMBER 2018		Rp 1.357.390.259.999	Rp 5.552.026.262.437	Rp 1.583.494.837.349	Rp 8.763.909.422.956	Rp 10.347.404.260.305	Rp 11.388.092.112	Rp 732.907.190.524	Rp 18.001.116.065.377	Rp 10.886.002.685.490	Rp 28.887.118.750.867
Cadangan Umum	39			Rp 59.295.693.606	Rp (59.295.693.606)						
Dividen Tunai					Rp (660.803.241.813)	Rp (660.803.241.813)			Rp (660.803.241.813)		Rp (660.803.241.813)
Kepentingan Non-Pengendali	47									Rp 152.128.906.621	Rp 152.128.906.621
Laba Periode Berjalan					Rp (13.934.791.917.248)	Rp (13.934.791.917.248)			Rp (13.934.791.917.248)	Rp (31.602.957.411)	Rp (13.966.394.874.658)
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti					Rp 2.546.167.776	Rp 2.546.167.776			Rp 2.546.167.776		Rp 2.546.167.776
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri							Rp (3.109.562.722)		Rp (3.109.562.722)		Rp (3.109.562.722)
Estimasi Nilai Penjabaran Dalam Mata Uang Asing											
Saldo Awal Sblm Penyesuaian		Rp 1.357.390.259.999	Rp 5.552.026.262.437	Rp 1.583.494.837.349	Rp 8.763.909.422.956	Rp 10.347.404.260.305	Rp 11.388.092.112	Rp 732.907.190.524	Rp 18.001.116.065.377	Rp 10.886.002.685.490	Rp 28.887.118.750.867
Penyesuaian Indeks	1,333	Rp 905.379.303.419	Rp 3.703.201.517.045	Rp 1.056.191.056.512	Rp 5.845.527.585.112	Rp 6.901.718.641.623	Rp 7.595.857.439	Rp 488.849.096.080	Rp 12.006.744.415.607	Rp 7.260.963.791.222	Rp 19.267.708.206.828
Penambahan/Pengurangan Tahun Berjalan		Rp -	Rp -	Rp 59.295.693.606	Rp (14.652.344.684.891)	Rp (14.593.048.991.286)	Rp (3.109.562.722)	Rp -	Rp -	Rp 120.525.949.211	Rp (14.475.632.604.797)
Saldo Akhir Setelah Hiperinflasi		Rp 905.379.303.419	Rp 3.703.201.517.045	Rp 1.115.486.750.117	Rp (8.806.817.099.779)	Rp (7.691.330.349.662)	Rp 4.486.294.716	Rp 488.849.096.080	Rp (2.589.414.138.401)	Rp 7.381.489.740.433	Rp 4.792.075.602.031

Sumber: Data diolah, 2020

PT Waskita Karya Tbk
Catatan Atas Laporan Keuangan
Dalam Kondisi Ekonomi Hiperinflasi

Semua deskripsi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam kondisi hiperinflasi sama dengan laporan keuangan komersial sebelum hiperinflasi, namun ditambahkan nominal sebelum dan setelah hiperinflasi. Kemudian secara spesifik CALK hiperinflasi menambahkan ayat untuk menjelaskan pengaruh dan dasar pembuatan laporan keuangan hiperinflasi. (PSAK 63: 39&40, 2019) Berikut ayat tambahan yang sesuai menurut PSAK 63 paragraf 39 dan 40 :

59) Pengaruh dan Dasar Pembuatan Laporan Keuangan Hiperinflasi

(Melanjutkan Nomor di CALK di laporan keuangan sebelumnya)

Laporan keuangan ini disajikan karena perubahan mata uang fungsional yang digunakan sebagai kegiatan usaha perusahaan menjadi naik secara signifikan. Akibatnya laporan keuangan harus disajikan kembali agar nilai yang terdapat pada laporan keuangan mencakup nilai yang berlaku saat ini. Pengaruh akibat penilaian kembali ini adalah nilai-nilai yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi naik signifikan, sejalan dengan kondisi dalam ekonomi hiperinflasi. Kenaikan tersebut berdasarkan hasil perhitungan indeks dari pergerakan mata uang fungsional dengan pergerakan mata uang yang dianggap stabil yakni US Dollar. Berikut merupakan indeks harga umum 10 tahun terakhir yang digunakan untuk penilaian kembali dalam ekonomi hiperinflasi :

Nilai Saat Ini (Hiperinflasi)	Tahun	Nilai Rata-rata Rupiah Tahun ke-N	Indeks Harga Umum
Rp18.854,18	2019	Rp 14.217,06	1,333
Rp18.854,18	2018	Rp 13.882,62	1,365
Rp18.854,18	2017	Rp 13.384,13	1,416
Rp18.854,18	2016	Rp 13.307,38	1,424
Rp18.854,18	2015	Rp 13.391,97	1,415
Rp18.854,18	2014	Rp 11.878,30	1,595
Rp18.854,18	2013	Rp 10.451,37	1,813
Rp18.854,18	2012	Rp 9.380,39	2,020
Rp18.854,18	2011	Rp 8779,49	2,158
Rp18.854,18	2010	Rp 9084,55	2,086

Berdasarkan hasil penilaian kembali dengan menggunakan indeks harga umum, perusahaan mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp13.934.791.917.248. Angka tersebut didapat dari:

- a) Laba Periode Berjalan Sebesar Rp735.650.609.613
- b) Kerugian Posisi Moneter Neto Sebesar Rp14.670.442.526.861

Kerugian posisi moneter neto terjadi akibat penilaian kembali seluruh akun dalam laporan keuangan. Kerugian ini telah diatribusikan ke saldo laba dan mengurangi ekuitas pada periode berjalan. Seluruh perhitungan di dalam laporan keuangan ini telah menggunakan dasar PSAK : 63 Tentang Pelaporan Keuangan Dalam Kondisi Hiperinflasi sebagai pedoman dalam penilaian kembali sebuah laporan keuangan. Penilaian kembali ini sangat penting dilakukan karena nilai mata uang fungsional sudah tidak bernilai lagi. Maka dari itu diperlukan penilaian kembali yang berdasar pada indeks harga yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, agar membuat nilai dalam laporan keuangan benar-benar sesuai dengan nilai wajar yang sedang terjadi. Demikian pernyataan ini disampaikan tanggal efektif per 1 Januari 2020

4.2.4.2 Manfaat PT Waskita Karya Tbk Menerapkan PSAK 63 Dalam Kondisi Hiperinflasi (33,32%)

Pada saat kondisi hiperinflasi, ketika perusahaan menerapkan PSAK 63 perusahaan akan memperoleh nilai wajar yang sesungguhnya akibat pengaruh hiperinflasi. Nominal-nominal dalam laporan keuangan menjadi *real time*. PSAK ini menjawab kelemahan laporan keuangan ketika terjadi kondisi perekonomian yang tidak stabil, sehingga tetap dapat menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Meskipun nilai di dalam laporan keuangan menjadi berubah, namun ketika ekonomi kembali normal nilai ini tetap dijadikan acuan terhadap penyusunan kembali laporan keuangan di mata uang fungsionalnya seperti paragraf ke 38 PSAK 63.

4.2.5 Kajian Keislaman Mengenai Topik Penelitian

Terdapat surah maupun Hadist mengenai inflasi yang merupakan fenomena yang merugikan berbagai kalangan masyarakat. Namun dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam beberapa Surah Al-Quran sebagai berikut:

1. QS Al-Isra: 30

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya”.

2. QS Al-A'raf: 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرُجِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya:

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

3. HR Ahmad dan ad-Darimi

Kemudian diperkuat dengan hadist lainnya yakni:

بَلَّ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ

Artinya:

“Akan Tetapi, Allahlah yang menurunkan dan menaikkan harga”

Tafsir hadist diatas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah.

Kemudian Dalam Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi, ketika masyarakat muslim telah berhijrah ke Medinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau *al-muhtasib*. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Medinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara islami. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan

harga manakala tingkat harga di Medinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan *monopolistik* maupun *monopsonistik*. Maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar yang sedang berlaku, berikut sabda Rasulullah SAW:

4. HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi

مَالٍ وَلَا دَمٍ فِي مَعْظَمَةِ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ وَلَا يَسْ - أَلْقَى أَنْ - لَأَرْجُو وَإِنَّ الرَّزَاقُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِّرُ هُوَ - إِنَّ

Artinya:

“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntuku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi)

Dalam pandangan islam tentang inflasi, kenaikan harga merupakan kehendak Allah SWT. Siapapun penguasa tidak boleh menentukan sebuah harga sendiri di pasaran, biarlah pasar yang berjalan dengan sendirinya. Hal tersebut seperti yang terjadi di Zimbabwe, yang merupakan latar belakang mengapa PSAK 63 ini disusun. Saat itu penguasa disana hendak mengendalikan suatu komoditas di pasar dengan mencetak uang besar-besaran, kondisi tersebut membuat negara tersebut terkena hiperinflasi dan merugikan berbagai pihak. Sesungguhnya para penguasa disana telah berbuat kezaliman dengan mengatas namakan harta, kemudian Allah memberikan cobaan hiperinflasi besar-besaran di Zimbabwe akibat

kezlimannya tersebut. Maka dari itu kita tidaklah boleh menzalimi siapapun meskipun kita memiliki kuasa yang lebih seperti hadist yang disampaikan Rasulullah SAW.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas tentang Implementasi PSAK 63 Tentang Pelaporan Keuangan Dalam Kondisi Hiperinflasi peneliti menyimpulkan beberapa hal :

1. Dalam kondisi Indonesia saat ini pemerintah sangat baik dalam menekan laju inflasi dengan kebijakan beberapa stabilitas ekonominya. Sehingga inflasi dapat ditekan meskipun terdapat beberapa fenomena yang memiliki kesamaan saat tahun 1998 silam, ketika Indonesia terjadi Hiperinflasi
2. Sebelum kondisi Hiperinflasi PT Waskita Karya Tbk memiliki rasio profitabilitas yang baik, terbukti dengan nilai GPM, NPM, ROCE, dan ROI memiliki rasio diatas rata-rata perusahaan jasa konstruksi lainnya. Sehingga dapat menjamin ketika investor ingin berinvestasi di perusahaan ini.
3. Ketika kondisi Hiperinflasi PT Waskita Karya TBK memiliki rasio profitabilitas yang buruk. Terbukti rasio NPM, ROA, ROE, dan EPS memiliki angka yang negatif. Artinya perusahaan memiliki tingkat pengembalian (*return*) yang buruk terhadap sumber daya yang dimiliki. Sehingga akan berdampak pada investor yang ingin menginvestasikan dananya ke perusahaan. Padahal dalam kondisi hiperinflasi perusahaan sangat membutuhkan tambahan dana untuk menutupi kerugian yang dihasilkan akibat hiperinflasi.

4. Dalam penerapan PSAK 63, perusahaan dengan nilai aset moneter berupa kas, investasi, dan piutang yang cukup besar dalam kondisi hiperinflasi akan memiliki kerugian yang cukup besar, karena nilai tersebut mengalami penurunan nilai kini yang disesuaikan dengan indeks harga umum yang berlaku. Sehingga dampak dari penilaian kembali ini nilai dalam laporan keuangan menjadi berubah, namun laporan tersebut telah menggambarkan nilai wajar yang terjadi pada tahun berjalan. Hal tersebut membuat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi relevan dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan, peneliti memberi saran kepada :

1. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini merupakan yang pertama dalam implementasi PSAK 63, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dasar dalam melakukan implementasi selanjutnya. Sehingga apabila nanti terjadi hiperinflasi, penelitian ini dapat menjadi pedoman akademis maupun praktis dalam penerapan di laporan keuangan dalam kondisi hiperinflasi yang sesungguhnya. Kemudian penelitian selanjutnya dapat berfokus pada rasio yang lain, tidak hanya pada rasio profitabilitas saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Herman. (2017). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5 (3)
- Andi Hutami Endang, (2019). Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar : *Jurnal Uin Alaudin Hal 2*
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Inflasi Umum, Inti Harga Yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergejolak Inflasi Indonesia, Januari 2019-Desember 2013, Januari 2014-Desember 2018, Januari-Agustus 2019*. Jakarta. Diperoleh 22 November 2019 dari <https://www.bps.go.id/statictable/2012/02/02/908/inflasi-umum-inti-hargayangdiatur-pemerintah- dan-barang-bergejolak-inflasi-indonesia-2009- 2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen*. Diperoleh 21 Mei dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi -indonesia-2019- tumbuh-5-02-persen.html>
- Bank Indonesia. (2019). *Statistik Sistem Keuangan Indonesia*. Jakarta . Diperoleh pada 2 Desember 2019 dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents /Default.aspx>
- Bank Indonesia. (1999). *Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia*. Diperoleh pada 7 Februari 2020 dari <https://www.bi.go.id/sejarah-bi/ Contents /Default.aspx>
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen)*. diperoleh 21 Maret 2020 dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>
- Bank Indonesia. (2008). *Tinjauan Ekonomi Regional*. Diperoleh pada 21 Mei 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/25/1541526/inflasi.2008.diperkirakan.capai.117.persen..>
- Bursa Efek Indonesia. (2020). *Panduan Go Public* diperoleh 22 Maret 2020 dari <https://gopublic.idx.co.id/homepage/panduan-go-public-2/>
- Chaniago, Andrinof A. (2001). *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Dini Yuniarti Erdah Litriani. (2017). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Di Sektor Industri Barang Konsumsi Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2012-2016, *Jurnal I-Finance*, Vol. 1 (1)

- Donald E., Kieso, dkk (2017). *Intermediate Accounting: IFRS Edition, 3rd Edition*. Jakarta: Salemba Empat
- Dwi Martani, dkk., (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta : Salemba Empat
- Haryani, Sri. (2018). **Pengaruhinflasi, Nilai Tukar Rupiah Per Dolar As, Tingkat Suku Bunga Bi, Der, Roa, Cr, Dan Npm terhadap Return sahami ndustri Real Estate And Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Handayani, Novia Nur (2019). **Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Inflasi Di Indonesia Periode 1999-2018**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Heru Perlambang. (2010). Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi Media Ekonomi. Jakarta: *Tinjauan Ekonomi Regional Vol. 19 No. 2: Hal 2*
- Karlina, Berlian. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia Pada Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 6 (1), Hal 20.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Anggara Pendapatab Belanja Negara (APBN) Kita 2019*. Jakarta Diperoleh 12 November 2019 dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/12830/apbn-kita-juli-2019.pdf>
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. (2016). *Paket Kebijakan Ekonomi XIV*, Jakarta. Diperoleh 12 November 2019 dari <https://ekon.go.id/ekliping/view/paket-kebijakan-ekonomi- xiv.2862.html>
- Kementrian Perdagangan. (2019). *Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah*. Jakarta Diperoleh 27 November 2019 dari <https://www.kemendag.go.id/id/economicprofile/economicindicators/exchange-rates>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Neraca Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta Diperoleh 10 Desember 2019 dari <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/>
- Kementrian Perindustrian. (2020). *Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri* diperoleh 21 Maret 2020 dari <http://tkdn.kemenperin.go.id/regulasi.php>

- Lahu,. Enggar Paskhalis dan Sumarauw,. Jacky S.B (2017). Analisis Pengendalian Bahan BakuGuna Meminimalkan Biaya Persediaan Pada Dunkin Donuts Manado. *Jurnal EMBA*, Volume. 5 (3)
- Martawireja,. AE, Yaya,. Rizal, dan Abdurahim. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat
- Medriamel. (2017). Dampak Kebijakan Land Reform Terhadap Pinjaman Luar Negeri Zimbabwe Kepada Imf Tahun 2008. *JOM FISIP* Volume.4 No. 1
- N. Gregory Mankiw. (2018). *Principles of Microeconomics | 8th Edition*. Cengage: Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 / Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Pura, Rahman. (2018). *Pengantar Akuntansi 1 : Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Primawan Wisda Nugroho dan Maruto Umar Basuki . (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Periode 2000-2011. Semarang: *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 2*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 Tentang Laporan Arus Kas. Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 Tentang Pendapatan. Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 26 Tentang Biaya Pinjaman. Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 Pajak Penghasilan. Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 63 Tentang Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi, Jakarta: IAI

Simangunsong., Natalina Tiur Angel., dkk. (2018). Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Pada PT. BPR Prisma Dana Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (2)

Siska Sukasna. (2017). **Fenomena Inflasi Di Indonesia**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Soemarso. (2014). *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sunggono., Bambang. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Tri Rahayu., Wiwit. (2017). Strategi Tiongkok dalam Mendominasi Hubungan Kerjasama Ekonomi dengan Zimbabwe (2000-2015). *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Volume. 6 No. 2

Usman., Husaini dan Akbar., Purnomo Setiady. (2017). *Metodologi Penelittian Sosial Edisi Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara



LAMPIRAN

Lampiran 1. Kertas Kerja Kas Dan Setara Kas

Keterangan	2019	Setelah Hiperinflasi
Kas/ Cash on Hand	Rp 2.781.880.609	Rp 2.781.880.609
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp 1.580.163.710.049	Rp 1.580.163.710.049
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rp 453.093.673.820	Rp 453.093.673.820
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp 141.346.910.647	Rp 141.346.910.647
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rp 17.568.587.521	Rp 17.568.587.521
PT Bank Syariah Mandiri	Rp 7.719.397.707	Rp 7.719.397.707
PT Bank BRISyariah Tbk	Rp 6.579.540.449	Rp 6.579.540.449
Indonesia Eximbank	Rp 217.125.880	Rp 217.125.880
PT Bank BNI Syariah		
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar	Rp 212.542.805	Rp 212.542.805
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rp 9.195.605.646	Rp 9.195.605.646
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp 3.596.463.008	Rp 3.596.463.008
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp 1.005.498.033	Rp 1.005.498.033
Yen Jepang/ Japanese Yen		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rp 7.756.143.191	Rp 7.756.143.191
Euro		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp 56.601.860	Rp 56.601.860
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 2.228.511.800.616	Rp 2.228.511.800.616
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah		
PT Bank Bukopin Tbk	Rp 42.622.592.515	Rp 42.622.592.515
PT Bank DBS Indonesia	Rp 28.141.100.636	Rp 28.141.100.636
PT Bank Central Asia Tbk	Rp 16.125.437.926	Rp 16.125.437.926
PT Bank Mestika Dharma Tbk	Rp 8.367.862.644	Rp 8.367.862.644
PT Bank UOB Indonesia	Rp 8.150.093.857	Rp 8.150.093.857
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Rp 4.957.912.989	Rp 4.957.912.989
PT Bank OCBC NISP Tbk	Rp 4.673.231.590	Rp 4.673.231.590
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	Rp 4.395.468.289	Rp 4.395.468.289
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Rp 3.384.299.421	Rp 3.384.299.421
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Rp 3.126.338.061	Rp 3.126.338.061
PT Bank Permata Tbk	Rp 2.706.434.379	Rp 2.706.434.379
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	Rp 2.701.637.966	Rp 2.701.637.966
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Rp 2.112.372.818	Rp 2.112.372.818
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Rp 2.034.849.102	Rp 2.034.849.102
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Rp 1.955.710.886	Rp 1.955.710.886
Bank Mizuho	Rp 1.801.857.848	Rp 1.801.857.848
PT Bank CTBC Indonesia	Rp 1.745.440.862	Rp 1.745.440.862
PT Bank of China	Rp 1.678.728.522	Rp 1.678.728.522
PT Bank Pembangunan Daerah Banten	Rp 1.614.164.435	Rp 1.614.164.435
PT Bank Danamon Tbk	Rp 1.526.327.334	Rp 1.526.327.334
PT Bank Mega Tbk	Rp 1.391.508.674	Rp 1.391.508.674
PT Bank DKI	Rp 1.319.831.926	Rp 1.319.831.926
PT Bank HSBC Indonesia	Rp 533.990.608	Rp 533.990.608
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Rp 516.734.049	Rp 516.734.049
PT Bank BCA Syariah	Rp 289.594.035	Rp 289.594.035
Industrial and Commercial Bank of China	Rp 261.764.313	Rp 261.764.313
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	Rp 10.750.326	Rp 10.750.326
PT Bank Pembangunan Daerah KALTIMT	Rp 3.974.250	Rp 3.974.250
Riyal Arab Saudi/ Saudi Arabian Riyal		
The National Commercial Bank - Jeddah	Rp 2.990.946	Rp 2.990.946
Ringgit Malaysia/ Malaysian Ringgit		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Rp 12.328.017	Rp 12.328.017
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 148.165.329.224	Rp 148.165.329.224
Pihak Berelasi/ Related Parties		
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah"		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rp 538.090.045.953	Rp 538.090.045.953
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rp 66.505.000.000	Rp 66.505.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp 30.000.000.000	Rp 30.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp 10.000.000.000	Rp 10.000.000.000
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 644.595.045.953	Rp 644.595.045.953
Pihak Ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jabar & Ba	Rp 315.000.000.000	Rp 315.000.000.000
PT Bank BTPN Tbk	Rp 142.000.000.000	Rp 142.000.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	Rp 10.000.000.000	Rp 10.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
PT Bank CTBC	Rp 3.496.054.056.402	Rp 3.496.054.056.402
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 472.000.000.000	Rp 472.000.000.000
Jumlah/ Total	Rp 3.496.054.056.402	Rp 3.496.054.056.402

Lampiran 2. Kertas Kerja Piutang Usaha Bersih, Kertas Kerja Piutang Retensi, Kertas Kerja Piutang Lain-Lain. Dan Kertas Kerja Piutang Ventura Bersama

Kertas Kerja Piutang Usaha Bersih

Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Jasamarga Semarang Batang	Rp 2.498.905.895.960	1,333	Rp 1.666.770.232.605
PT Cinere Serpong Jaya	Rp 1.135.760.850.551	1,333	Rp 757.552.487.318
PT Transjawa Paspro Jalan Tol	Rp 800.651.763.334	1,333	Rp 534.034.726.144
PT Jasamarga Solo Ngawi	Rp 496.148.787.598	1,333	Rp 330.931.241.328
PT Utama Karya (Persero)	Rp 462.090.588.221	1,333	Rp 308.214.422.343
PT Kertas Leces (Persero)	Rp 86.707.725.121	1,333	Rp 57.834.052.656
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	Rp 58.182.044.638	1,333	Rp 38.807.423.774
KSO/JO WKR - RNI	Rp 27.226.574.264	1,333	Rp 18.160.125.034
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	Rp 26.260.305.600	1,333	Rp 17.515.623.835
PT Istaka Karya (Persero)	Rp 22.527.353.440	1,333	Rp 15.025.744.744
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Rp 19.512.768.204	1,333	Rp 13.015.016.392
PT Angkasa Pura I (Persero)	Rp 5.242.691.802	1,333	Rp 3.496.875.432
PT Prima Multi Terminal			
Lain-lain	Rp 42.559.741.586	1,333	Rp 28.387.347.638
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 5.681.777.090.319		Rp 3.789.745.319.243
Cadangan kerugian Piutang	Rp (138.051.248.129)	1,333	Rp (92.080.182.502)
PT Pertamina (Persero)	Rp 38.166.077.971	1,333	Rp 25.456.774.007
KSO/JO Waskita - Acset	Rp 37.163.120.561	1,333	Rp 24.787.801.414
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Rp 35.742.934.239	1,333	Rp 23.840.537.137
PT Utama Karya (Persero)	Rp 18.090.537.802	1,333	Rp 12.066.388.714
KSO/JO Waskita - Gorip Nanda Guna	Rp 7.924.201.883	1,333	Rp 5.285.442.656
Lain-lain	Rp 543.112.489.802	1,333	Rp 362.256.030.698
Dikurangi: CKPN			Rp -
Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	Rp (1.231.179.548)	1,333	Rp (821.196.759)
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 678.968.182.710		Rp 452.871.777.868
Total Piutang Pihak Berelasi	Rp 6.222.694.024.900		Rp 4.150.536.914.608
Pihak Ketiga/ Third Parties			
PT Broadbiz Asia	Rp 106.596.781.459	1,333	Rp 71.100.053.233
PT Trikarya Graha Utama	Rp 100.650.939.502	1,333	Rp 67.134.176.648
PT Bangun Investa Graha	Rp 93.137.768.963	1,333	Rp 62.122.891.898
PT Royal Abadi Dentalindo	Rp 88.020.000.434	1,333	Rp 58.709.340.289
PT Ade Pede Realty	Rp 53.953.367.794	1,333	Rp 35.986.896.319
Pemerintah Daerah/ District Governments	Rp 53.710.681.966	1,333	Rp 35.825.024.871
Bin Ladin Contractor Group LLC	Rp 53.000.910.399	1,333	Rp 35.351.607.236
PT Kukuh Mandiri Lestari	Rp 39.198.261.049	1,333	Rp 26.145.240.120
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Rp 27.243.155.833	1,333	Rp 18.171.184.941
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation		1,333	Rp -
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	Rp 93.757.691.970	1,333	Rp 62.536.380.544
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 709.269.559.369		Rp 473.082.796.099
Cadangan kerugian Piutang	Rp (488.748.873.871)	1,333	Rp (325.995.498.872)
PT Hakaaston	Rp 255.900.279.800	1,333	Rp 170.685.486.627
Pelanggan dari Apartment The Reiz Condo	Rp 140.907.779.009	1,333	Rp 93.985.488.599
PT Mandiri Bangun Makmur	Rp 127.148.555.928	1,333	Rp 84.808.086.804
PT Modernland Realty Tbk	Rp 83.976.935.398	1,333	Rp 56.012.615.910
KSO/ JO Pembangunan Perumahan	Rp 63.711.079.250	1,333	Rp 42.495.289.860
PT Apical KAO Chemical	Rp 50.602.096.760	1,333	Rp 33.751.598.539
KSO/ JO Shimizu Pembangunan	Rp 46.019.051.153	1,333	Rp 30.694.707.119
Pemerintah Daerah	Rp 36.696.009.613	1,333	Rp 24.476.238.412
PT Kapuk Naga Indah	Rp 32.311.883.019	1,333	Rp 21.552.025.974
PT Girder Indonesia	Rp 29.555.559.140	1,333	Rp 19.713.557.946
PT Hyundai Engineering	Rp 27.204.401.830	1,333	Rp 18.145.336.021
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	Rp 568.849.521.995	1,333	Rp 379.422.631.171
Dikurangi: CKPN	Rp (20.141.910.642)	1,333	Rp (13.434.654.398)
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 1.442.741.242.253		Rp 962.308.408.583
Piutang Sewa	Rp 695.923.299	1,333	Rp 464.180.840
Total Piutang Pihak Ketiga	Rp 1.663.957.851.050		Rp 1.109.859.886.650

Kertas Kerja Piutang Retensi

Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Jasamarga Solo Ngawi	Rp 320.037.209.429	1,333	Rp 213.464.818.689
PT Pejagan Pemalang Tol Road	Rp 185.886.927.455	1,333	Rp 123.986.580.612
PT Transjawa Paspro Jalan Tol	Rp 157.170.764.021	1,333	Rp 104.832.899.602
PT Utama Karya (Persero)	Rp 128.555.666.689	1,333	Rp 85.746.629.682
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	Rp 78.557.749.673	1,333	Rp 52.398.019.032
PT Cinere Serpong Jaya	Rp 59.776.886.871	1,333	Rp 39.871.183.543
PT Angkasa Pura I (Persero)	Rp 55.234.369.025	1,333	Rp 36.841.324.140
PT Prima Multi Terminal	Rp 48.152.664.562	1,333	Rp 32.117.827.263
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Rp 29.249.431.711	1,333	Rp 19.509.370.951
KSO/JV Waskita Karya - Trinita	Rp 26.189.516.546	1,333	Rp 17.468.407.536
PT PAL Indonesia (Persero)	Rp 23.835.098.479	1,333	Rp 15.898.010.685
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Rp 2.421.248.890	1,333	Rp 1.614.973.010
PT Kereta Api Indonesia		1,333	Rp -
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	Rp 70.589.688.872	1,333	Rp 47.083.322.478
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 1.185.657.222.223		Rp 790.833.367.223
Nilai Cadangan Kerugian Piutang	Rp (21.783.819.042)	1,333	Rp (14.529.807.301)
Total Piutang Pihak Berelasi	Rp 1.163.873.403.181		Rp 776.303.559.922
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Kementerian Transportasi Timor Leste	Rp 89.291.878.064	1,333	Rp 59.557.682.669
Kementrian PUPR	Rp 62.511.469.370	1,333	Rp 41.695.150.070
PUPR Timor Leste	Rp 56.424.625.446	1,333	Rp 37.635.225.172
Pemerintah Daerah/ District Governments	Rp 29.763.808.017	1,333	Rp 19.852.459.947
Bin Ladin Contractor Group LLC	Rp 29.577.446.348	1,333	Rp 19.728.156.714
PT Toba Pengembang Sejahtera	Rp 28.076.717.899	1,333	Rp 18.727.170.839
PT Pardika Wisthi Sarana	Rp 23.431.420.350	1,333	Rp 15.628.757.373
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	Rp 186.255.445.752	1,333	Rp 124.232.382.317
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 505.332.811.247		Rp 337.056.985.101
Nilai Cadangan Kerugian Piutang	Rp (169.127.770.630)	1,333	Rp (112.808.223.010)
Total Piutang Pihak Ketiga Berelasi	Rp 336.205.040.617		Rp 224.248.762.091

Kertas Kerja Piutang Lain-Lain			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Waskita Transjawa Toll Road	Rp 2.968.339.868.706	1,333	Rp 1.979.882.692.427
2017 PT Hutama Karya (Persero)	Rp 710.617.069.524	1,333	Rp 473.981.585.373
PT Jasamarga Ngawiertosono Kediri	Rp 278.105.708.320	1,333	Rp 185.496.507.449
KSO/JO WKR - Darma Permai	Rp 210.842.235.783	1,333	Rp 140.631.771.267
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Rp 178.220.547.045	1,333	Rp 118.873.104.879
PT Cinere Serpong Jaya	Rp 129.782.078	1,333	Rp 86.564.646
Lain-lain (dibawahRp 20 Milyar)	Rp 295.706.678.020	1,333	Rp 197.236.354.239
Dikurangi: CKPN	Rp (9.076.656.786)	1,333	Rp (6.054.130.076)
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 4.632.885.232.690		Rp 3.090.134.450.204
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Lembaga Manajemen Aset Negara	Rp 6.083.788.511.920	1,333	Rp 4.057.886.937.451
Lembaga Manajemen Aset Negara	Rp 461.078.798	2,229	Rp (105.587.045)
Dikurangi: CKPN	Rp (2.633.405.290)	2,229	Rp 603.049.811
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 6.081.616.185.428		Rp 4.058.384.400.217
Total Piutang Lain-lain	Rp 10.714.501.418.118		Rp 7.148.518.850.422
Kertas Kerja Piutang Ventura Bersama			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Waskita - Acset (Jalan Layang Cikampek)	Rp 1.922.582.819.871	1,333	Rp 1.282.362.740.854
Waskita - Acset (Tol Terbanggi - Kayu Agung)	Rp 49.026.366.667	1,333	Rp 32.700.586.567
2017 Waskita - Wika (Jalan Tol Bocimi)	Rp 45.009.237.542	1,333	Rp 30.021.161.441
Waskita - Hutama - Wika (Runway Smarinda)	Rp 33.550.685.744	1,333	Rp 22.378.307.391
Waskita - PAL (PLTU Malinau)			
Lain-lain (di bawahRp 20 Milyar)	Rp 29.155.156.749	1,333	Rp 19.446.489.552
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 2.079.324.266.573		Rp 1.386.909.285.804

Lampiran 3. Kertas Kerja Tagihan Bruto

Kertas Kerja Tagihan Bruto			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Berelasi			
PT Utama Karya (Persero)	Rp 13.205.532.704.136	1,333	Rp 8.808.090.313.659
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Rp 5.907.736.252.382	1,333	Rp 3.940.460.080.339
PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek	Rp 4.928.962.929.219	1,333	Rp 3.287.618.273.789
PT Cinere Serpong Jaya	Rp 698.273.526.533	1,333	Rp 465.748.442.198
PT Angkasa Pura II (Persero)	Rp 264.976.502.744	1,333	Rp 176.739.327.330
PT Utama Marga Waskita	Rp 244.280.014.174	1,333	Rp 162.934.769.454
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Rp 107.237.903.443	1,333	Rp 71.527.681.596
PT Prima Multi Terminal	Rp 91.200.280.349	1,333	Rp 60.830.586.993
PT Jasamarga Solo Ngawi	Rp 70.287.855.496	1,333	Rp 46.881.999.616
PT Jasamarga Semarang Batang	Rp 65.899.304.619	1,333	Rp 43.954.836.181
PT Angkasa Pura I (Persero)	Rp 44.947.654.480	1,333	Rp 29.980.085.538
PT PAL Indonesia (Persero)	Rp 37.796.106.830	1,333	Rp 25.210.003.256
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp 28.588.303.372	1,333	Rp 19.068.398.349
KSO/JO RNI Waskita	Rp 2.896.503.803	1,333	Rp 1.931.968.037
PT Pejagan Pemalang Toll Road			
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri			
Lain-lain (di bawah Rp 50 Milyar)	Rp 38.632.876.719	1,333	Rp 25.768.128.772
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 25.737.248.718.299		Rp 17.166.744.895.105
Penurunan Nilai Piutang	Rp (92.180.175.725)	1,333	Rp (61.484.177.209)
Jumlah Saldo	Rp 25.645.068.542.574		Rp 17.105.260.717.897
Pihak Ketiga			
Kementerian Perhubungan/The Ministry of Transportation	Rp 2.281.448.195.922	1,333	Rp 1.521.725.946.680
PT Marga Trans Nusantara	Rp 1.511.353.993.007	1,333	Rp 1.008.073.113.336
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Pemerintah Daerah/ District Governments	Rp 341.252.631.994	1,333	Rp 227.615.505.540
KSO Utama-Marga-Waskita	Rp 110.679.211.659	1,333	Rp 73.823.034.177
KSO Hutama-Marga-Waskita	Rp 87.617.736.239	1,333	Rp 58.441.030.071
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste	Rp 48.766.353.290	1,333	Rp 32.527.157.644
The Ministry of Public Work of the Republic Democratic of Timor Leste	Rp 38.155.960.243	1,333	Rp 25.450.025.482
Telkom Property (PT Graha Sarana Duta)	Rp 1.884.169.840	1,333	Rp 1.256.741.283
PT Cinere Serpong Jaya			
Lain-lain	Rp 241.508.639.612	1,333	Rp 161.086.262.621
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 4.662.666.891.807		Rp 3.109.998.816.835

Lampiran 4. Kertas Kerja Investasi Jangka Pendek, Kertas Kerja Persediaan. Kertas Kerja Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi

Kertas Kerja Investasi Jangka Pendek					
Keterangan	2019	Indeks	2019	Setelah Hiperinflasi	
Jaminan Pinjaman Bank Mandiri	Rp 8.448.200.000	1,333	Rp 8.448.200.000	Rp 5.634.949.400	
Kertas Kerja Persediaan					
Keterangan	2018	Indeks 2018	Indeks 2019	2019	Setelah Hiperinflasi
Bahan Baku		1,365	1,333		
Konstruksi	Rp 820.899.169.547	Rp 820.899.169.547	Rp (374.030.924.974)	Rp 540.305.827.481	Rp 446.868.244.573
Beton Precast	Rp 1.228.429.929.512	Rp 1.228.429.929.512	Rp 188.289.657.357	Rp 1.369.682.485.669	Rp 1.416.719.586.869
Sub Jumlah	Rp 2.049.329.099.059			Rp 1.909.988.313.150	Rp 1.863.587.831.442
Persediaan dlm Pengembangan					
Aset Real Estate	Rp 2.038.845.632.511	Rp 2.783.024.288.378	Rp 459.345.058.341	Rp 2.383.440.575.002	Rp 3.242.369.346.718
Tanah Blm Dikembangkan	Rp 795.739.844	Rp 1.086.184.887		Rp 795.739.844	Rp 1.086.184.887
Sub Jumlah	Rp 2.039.641.372.355			Rp 2.384.236.314.846	Rp 3.243.455.531.605
Persediaan untuk Dijual					
Beton Precast	Rp 999.662.254.602	Rp 1.364.538.977.532	Rp (869.497.200.879)	Rp 347.376.282.450	Rp 495.041.776.653
Tanah Kavling Siap Dijual	Rp 598.345.228	Rp 816.741.236		Rp 598.345.228	Rp 816.741.236
Sub Jumlah	Rp 1.000.260.599.830			Rp 347.974.627.678	Rp 495.858.517.889
Jumlah	Rp 5.089.231.071.244			Rp 4.642.199.255.674	Rp 5.602.901.880.937
Kertas Kerja Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi					
Keterangan	2019	Indeks	2019	Setelah Hiperinflasi	
Pembayaran Kapasitas Minimum di Masa Depan:					
Tidak Lebih dari Satu Tahun	Rp 55.936.980.000	1,333	Rp 55.936.980.000	Rp 37.309.965.660	
Lebih dari Satu Tahun Tetapi Tidak Lebih Dari Lima Tahun	Rp 256.776.980.240	1,333	Rp 256.776.980.240	Rp 171.270.245.820	
Lebih dari Lima Tahun	Rp 631.465.452.640	1,333	Rp 631.465.452.640	Rp 421.187.456.911	
Jumlah Pembayaran Kapasitas Minimum di Masa Depan	Rp 944.179.412.880		Rp 944.179.412.880	Rp 629.767.668.391	
Pendapatan Keuangan yang Belum Diterima	Rp 591.235.262.660	1,333	Rp 591.235.262.660	Rp 394.353.920.194	
Nilai Sekarang dari Pembayaran Kapasitas Masa Depan	Rp 352.944.150.220		Rp 352.944.150.220	Rp 235.413.748.197	
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	Rp 3.365.302.879	1,333	Rp 3.365.302.879	Rp 2.244.657.020	
Bagian Jangka Panjang	Rp 349.578.847.341		Rp 349.578.847.341	Rp 233.169.091.176	

Lampiran 5. Kertas Kerja Pajak Dibayar Dimuka, Kertas Kerja Uang Muka Dibayar Dimuka

Kertas Kerja Pajak Dibayar Dimuka					
	Keterangan	2019	Indeks	2019	Setelah Hiperinflasi
Pasal 4 (2)		Rp 1.158.871.869	1,333	Rp 1.158.871.869	Rp 772.967.537
Pasal 22			1,333		
	2019	Rp 67.568.759.201	1,333	Rp 67.568.759.201	Rp 45.068.362.387
	2018	Rp 13.311.506.242	1,333	Rp 13.311.506.242	Rp 8.878.774.663
	2017	Rp 40.300.500.159	1,333	Rp 40.300.500.159	Rp 26.880.433.606
	2016	Rp 16.150.829	1,333	Rp 16.150.829	Rp 10.772.603
Pasal 23					
	2019	Rp 24.209.513.211	1,333	Rp 24.209.513.211	Rp 16.147.745.312
	2018	Rp 1.634.905.464	1,333	Rp 1.634.905.464	Rp 1.090.481.944
	2017	Rp 2.491.228.447	1,333	Rp 2.491.228.447	Rp 1.661.649.374
	2016	Rp 2.829.513.314	1,333	Rp 2.829.513.314	Rp 1.887.285.380
Pasal 25					
	2019	Rp 104.625.092.901	1,333	Rp 104.625.092.901	Rp 69.784.936.965
	2018	Rp 384.000.000	1,333	Rp 384.000.000	Rp 256.128.000
Pasal 28		Rp 278.170.929.110	1,333	Rp 278.170.929.110	Rp 185.540.009.716
Pajak Pertambahan Nilai					
	2019	Rp 1.358.835.448.284	1,333	Rp 1.358.835.448.284	Rp 906.343.244.005
	2018	Rp 325.180.121.107	1,333	Rp 325.180.121.107	Rp 216.895.140.778
	2017	Rp 1.649.143.045.450	1,333	Rp 1.649.143.045.450	Rp 1.099.978.411.315
	2016	Rp 478.969.781.661	1,333	Rp 478.969.781.661	Rp 319.472.844.368
Jumlah		Rp 4.348.829.367.249		Rp 4.348.829.367.249	Rp 2.900.669.187.955
Kertas Kerja Uang Muka Dibayar Dimuka					
	Keterangan	2019	Indeks	2019	Setelah Hiperinflasi
PPN Keluaran Yang Belum Diterima		Rp 849.138.007.921	1,333	Rp 849.138.007.921	Rp 566.375.051.283
Uang Muka Kontrak		Rp 588.204.545.148	1,333	Rp 588.204.545.148	Rp 392.332.431.614
Biaya Dibayar dimuka		Rp 98.729.237.144	1,333	Rp 98.729.237.144	Rp 65.852.401.175
Pendapatan Yang Harus Diterima					
Uang Muka Beban Umum dan Adm		Rp 9.846.089.693	1,333	Rp 9.846.089.693	Rp 6.567.341.825
Sewa Dibayar dimuka		Rp 5.776.066.407	1,333	Rp 5.776.066.407	Rp 3.852.636.293
Lain-lain		Rp 7.719.325.561	1,333	Rp 7.719.325.561	Rp 5.148.790.149
Jumlah		Rp 1.559.413.271.874		Rp 1.559.413.271.874	Rp 1.040.128.652.340

Lampiran 6. Kertas Kerja Aset Tetap, dan Kertas Kerja Goodwill

Aset Tetap												
Keterangan	Saldo Akhir 2018	Indeks 2018		Total	Penambahan di 2019	Indeks 2019		Total	2019	Setelah Hiperinflasi		
		1,365				1,333						
Dinilai Pada Tahun 2018 Oleh KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan												
Biaya Perolehan												
Tanah	1.591.127.544.038	Rp	2.171.889.097.612	2.171.889.097.612	81.762.441.761	Rp	108.989.334.867	Rp	108.989.334.867	Rp 1.672.889.985.799	Rp 2.280.878.432.479	
Gedung	475.119.538.755	Rp	648.538.170.401	648.538.170.401	11.578.213.861	Rp	15.433.759.077	Rp	15.433.759.077	Rp 486.697.752.616	Rp 663.971.929.477	
Pabrik	547.538.529.005	Rp	747.390.092.092	747.390.092.092						Rp 547.538.529.005	Rp 747.390.092.092	
Perlengkapan Kantor	67.878.540.223	Rp	92.654.207.404	92.654.207.404	10.095.341.853	Rp	13.457.090.690	Rp	13.457.090.690	Rp 77.973.882.076	Rp 106.111.298.094	
Peralatan Proyek	4.142.242.065.703	Rp	5.654.160.419.685	5.654.160.419.685	146.207.875.232	Rp	194.895.097.684	Rp	194.895.097.684	Rp 4.288.449.940.935	Rp 5.849.055.517.369	
Kendaraan	16.629.165.207	Rp	22.698.810.508	22.698.810.508	2.455.093.575	Rp	3.272.639.735	Rp	3.272.639.735	Rp 19.084.258.782	Rp 25.971.450.243	
Jumlah	6.840.535.382.931			9.337.330.797.701	252.098.966.282			Rp 336.047.922.054	Rp 7.092.634.349.213	Rp 9.673.378.719.755		
Aset dalam Pelaksanaan												
Gedung, Pabrik, dan	1.993.392.548.831	Rp	2.720.980.829.154	2.720.980.829.154	989.882.865.619	Rp	1.319.513.859.870	Rp	1.319.513.859.870	Rp 2.983.275.414.450	Rp 4.040.494.689.024	
Akumulasi Penyusutan												
Gedung	103.577.847.944	Rp	141.383.762.444	141.383.762.444	11.941.587.663	Rp	15.918.136.355	Rp	15.918.136.355	Rp 115.519.435.607	Rp 157.301.898.798	
Pabrik	32.354.376.259	Rp	44.163.723.594	44.163.723.594	26.276.325.115	Rp	35.026.341.378	Rp	35.026.341.378	Rp 58.630.701.374	Rp 79.190.064.972	
Perlengkapan Kantor	41.704.951.802	Rp	56.927.259.210	56.927.259.210	9.879.976.941	Rp	13.170.009.262	Rp	13.170.009.262	Rp 51.584.928.743	Rp 70.097.268.472	
Peralatan Proyek	1.552.098.071.484	Rp	2.118.613.867.576	2.118.613.867.576	346.837.270.536	Rp	462.334.081.624	Rp	462.334.081.624	Rp 1.898.935.342.020	Rp 2.580.947.949.200	
Kendaraan	13.071.524.630	Rp	17.842.631.120	17.842.631.120	1.727.648.645	Rp	2.302.955.644	Rp	2.302.955.644	Rp 14.799.173.275	Rp 20.145.586.764	
Jumlah	1.742.806.772.119			2.378.931.243.942	396.662.808.900			Rp 528.751.524.264	Rp 2.139.469.581.019	Rp 2.907.682.768.206		
Nilai Buku	7.091.121.159.643								Rp 7.936.440.182.644	Rp 10.806.190.640.573		
Goodwill												
Entitas Diakuisi	Tahun Akuisisi	2015		2016		2017		2018		2019		
		1,415		1,424		1,416		1,365		1,333		
PT MTD CTP Expressway (CTP)	2017					Rp	853.272.203.352			Rp	602.593.363.949	Rp 853.272.203.352
PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR)	2016		Rp	261.622.316.160						Rp	183.723.536.629	Rp 261.622.316.160
PT Sriwijaya Markmore Persada) (WST)	2016		Rp	83.705.912.169						Rp	58.782.241.692	Rp 83.705.912.169
PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)	2015	Rp	660.260.591.123	Rp	1.281.599.999	Rp	(1.274.399.999)			Rp	466.615.258.744	Rp 660.267.791.123
PT Trans Jabar Tol (TJT)	2015	Rp	968.135.111.007	Rp	109.338.779.499	Rp	(108.724.516.695)			Rp	684.194.424.739	Rp 968.749.373.812
Jumlah/ Total										Rp 1.995.908.825.753	Rp 2.827.617.596.616	

Lampiran 7. Kertas Kerja Aset Tak Berwujud (Hak Penguasaan Jalan Tol), dan Kertas Kerja Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

		Aset Tak Berwujud (Hak Penguasaan Jalan Tol)						
Entitas Diakusisi	Tahun Akusisi	2015	2016	2017	2018	2019	2019	Jumlah Setelah Hiperinflasi
		1,415	1,424	1,416	1,365	1,333		
Biaya Perolehan								
Ruas Jalan Tol :								
Pemalang - Batang	2018				Rp 942.529.269.442	Rp 8.592.057.579.042	Rp 7.136.152.231.222	Rp 9.534.586.848.484
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	2017			Rp 5.560.935.782.884			Rp 3.927.214.535.935	Rp 5.560.935.782.884
Ciawi - Sukabumi	2019					Rp 6.129.517.663.787	Rp 4.598.287.819.795	Rp 6.129.517.663.787
Sub Jumlah							Rp 15.661.654.586.952	Rp 21.225.040.295.155
Aset Dalam Penyelesaian								
Ruas Jalan Tol :								
Bekasi - Cawang - Kampung	2017			Rp 1.713.897.655.756	Rp 1.040.068.522.352	Rp 1.866.754.582.500	Rp 3.372.750.702.708	Rp 4.620.720.760.608
Cimanggis - Cibitung	2015	Rp 270.826.439.647	Rp 1.172.802.262.646	Rp 990.412.885.024	Rp 2.447.821.786.590	Rp 2.446.041.631.856	Rp 5.842.704.005.050	Rp 7.327.905.005.764
Ciawi - Sukabumi	2015	Rp 1.249.194.432.291	Rp 1.073.207.166.654	Rp 1.797.183.645.932	Rp 2.481.506.662.438	Rp (5.614.848.576.275)	Rp 511.441.247.848	Rp 986.243.331.041
Kayu Agung - Palembang - Betung	2016		Rp 1.716.005.419.074	Rp 4.733.914.778.326	Rp 4.854.589.214.541	Rp 3.054.572.398.900	Rp 10.596.197.929.257	Rp 14.359.081.810.841
Cibitung - Cilincing	2017			Rp 1.080.741.701.278	Rp 3.399.462.183.692	Rp 3.612.878.856.998	Rp 5.964.020.877.895	Rp 8.093.082.741.967
Pemalang - Batang	2016		Rp 687.493.647.748	Rp 4.419.622.817.451	Rp 3.856.010.956.867	Rp 3.054.572.398.900	Rp 118.405.412.132	Rp 12.017.699.820.966
Krian-Legundi-Bunder				Rp 6.448.887.137.102	Rp 4.204.962.770.430	Rp 2.969.856.417.874	Rp 9.862.806.932.544	Rp 13.623.706.325.407
Sub Jumlah							Rp 35.568.327.107.434	Rp 61.028.439.796.594
Akumulasi Amortisasi								
Ruas Jalan Tol :								
Pemalang - Batang					Rp 608.830.733	Rp 54.234.640.251	Rp 41.132.181.567	Rp 54.843.470.984
Bekasi - Cawang - Kp Melayu				Rp 1.165.651.075	Rp 12.318.072.166	Rp 13.632.873.419	Rp 20.074.640.472	Rp 27.116.596.660
Ciawi - Sukabumi						Rp 25.819.283.792	Rp 19.369.305.170	Rp 25.819.283.792
Sub Jumlah							Rp 80.576.127.209	Rp 107.779.351.435
Nilai Tercatat							Rp 51.149.405.567.177	Rp 82.145.700.740.314
		Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan						
Keterangan	Saldo Akhir 2018	Penyesuaian	Dikreditkan ke Laba Rugi/(Charged)	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi	
Deferred Tax Assets								
TJT	Rp 581.979.033	Rp (576.097.320)	Rp 28.087.051	Rp (33.968.764)				
CCT	Rp 143.819.850		Rp 71.551.133	Rp (7.757.046)	Rp 207.613.937	1,333	Rp 276.749.378	
CTP	Rp 133.048.726		Rp 6.938.653	Rp 1.838.328	Rp 141.825.707	1,333	Rp 189.053.667	
WTR	Rp 66.990.246		Rp 185.075.048	Rp (13.630.345)	Rp 238.434.949	1,333	Rp 317.833.787	
KKDM		Rp (1.672.195)	Rp (40.649.498)	Rp 42.321.693				
WBP	Rp 631.410.216				Rp 631.410.216	1,333	Rp 841.669.818	
Jumlah	Rp 1.557.248.071	Rp (577.769.515)	Rp 251.002.387	Rp (11.196.134)	Rp 1.219.284.809		Rp 1.625.306.650	
Liabilitas Pajak Tangguhan/								
WBP	--		Rp 1.022.753.973		Rp (1.022.753.973)	1,333	Rp (1.363.331.046)	
TJT	--	Rp 68.541.035	Rp (7.815.246.405)		Rp 7.883.787.440	1,333	Rp 10.509.088.658	
KKDM	Rp 50.323.695.776	Rp (658.212.089)	Rp (11.456.998.592)		Rp 61.122.482.279	1,333	Rp 81.476.268.878	
PBTR	Rp 1.315.064.304	--	Rp (20.154.888.526)		Rp 21.469.952.830	1,333	Rp 28.619.447.122	
WKR	Rp 2.723.876.393	64.103			Rp 2.723.940.496	1,333	Rp 3.631.012.681	
Jumlah	Rp 54.362.636.473	Rp (589.606.951)	Rp (38.404.379.550)		Rp 92.177.409.072		Rp 122.872.486.293	

Lampiran 8. Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
PT Jasamarga Semarang Batang	Rp 1.281.435.455.565	1,333	Rp 854.717.448.862
PT Jasamarga Solo Ngawi	Rp 1.226.073.887.522	1,333	Rp 817.791.282.977
PT Waskita Transjawa Toll Road	Rp 1.188.498.247.449	1,333	Rp 792.728.331.048
PT Jasamarga Nga-Kerto-Kediri	Rp 411.530.172.321	1,333	Rp 274.490.624.938
PT Jasamarga Kualanamu Tol	Rp 390.500.363.893	1,333	Rp 260.463.742.717
PT Citra Waspphutowan	Rp 340.094.152.841	1,333	Rp 226.842.799.945
PT Cinere Serpong Jaya	Rp 299.011.522.688	1,333	Rp 199.440.685.633
PT Utama Marga Waskita	Rp 25.789.005.087	1,333	Rp 17.201.266.393
PT Hotel Karya Indonesia	Rp 15.525.000.000	1,333	Rp 10.355.175.000
PT Waskita Bali Mandara	Rp 3.750.000.000	1,333	Rp 2.501.250.000
Jumlah/ Total	Rp 5.182.207.807.366		Rp 3.456.532.607.513
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Berelasi/ Related Parties			
WKR - RNI	Rp 287.359.550.281	1,333	Rp 191.668.820.037
Waskita - Adhi	Rp 58.073.762.527	1,333	Rp 38.735.199.606
Brantas - Waskita	Rp 54.429.337.059	1,333	Rp 36.304.367.818
Waskita - Adhi	Rp 44.205.457.718	1,333	Rp 29.485.040.298
Waskita - NK	Rp 38.473.287.580	1,333	Rp 25.661.682.816
Waskita - Wika	Rp 17.963.468.849	1,333	Rp 11.981.633.722
Waskita - HK - Wika	Rp 12.433.670.431	1,333	Rp 8.293.258.177
Waskita - Yodya Karya	Rp 7.849.919.710	1,333	Rp 5.235.896.447
Waskita - Wika - PP - HK	Rp 7.448.173.986	1,333	Rp 4.967.932.049
Waskita - HK	Rp 7.348.709.249	1,333	Rp 4.901.589.069
Waskita - PP	Rp 5.678.543.341	1,333	Rp 3.787.588.408
Wika - Waskita - Nindya	Rp 5.201.985.830	1,333	Rp 3.469.724.549
Waskita - PP - Wika	Rp 4.181.791.664	1,333	Rp 2.789.255.040
Waskita - Adhi	Rp 3.961.476.479	1,333	Rp 2.642.304.811
Waskita - HK	Rp 2.025.915.319	1,333	Rp 1.351.285.518
HK - Waskita	Rp 1.059.494.623	1,333	Rp 706.682.914
Wika - Waskita	Rp 271.701.933	1,333	Rp 181.225.189
Waskita - PP - HK	Rp 241.478.820	1,333	Rp 161.066.373
Waskita - Adhi	Rp 4.584.312.464	1,333	Rp 3.057.736.413
Sub Jumlah	Rp 562.792.037.863		Rp 375.382.289.255
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Ketiga/ Third Parties			
WKR - Asiana	Rp 338.768.620.995	1,333	Rp 225.958.670.204
WKR - Darmo Permai	Rp 382.768.822.776	1,333	Rp 255.306.804.792
Waskita - Acset	Rp 295.996.983.335	1,333	Rp 197.429.987.884
Waskita - Trinita	Rp 165.787.046.825	1,333	Rp 110.579.960.232
WKR - Sirius	Rp 124.466.068.144	1,333	Rp 83.018.867.452
Waskita - JPC	Rp 101.524.988.501	1,333	Rp 67.717.167.330
Waskita - Gorip Nanda Guna	Rp 94.268.774.680	1,333	Rp 62.877.272.712
Waskita - Wika - PP - Jaya	Rp 72.762.610.018	1,333	Rp 48.532.660.882
Dalawa - WKR	Rp 64.557.379.965	1,333	Rp 43.059.772.437
Waskita - Yasa	Rp 39.303.948.460	1,333	Rp 26.215.733.623
Waskita - Arkonin	Rp 35.776.715.544	1,333	Rp 23.863.069.268
Metallurgical - Wika - NK - Waskita	Rp 36.084.595.091	1,333	Rp 24.068.424.926
Waskita - Abdi Mulia Berkah	Rp 28.464.165.627	1,333	Rp 18.985.598.473
Waskita - Bawakaraeng	Rp 27.163.134.688	1,333	Rp 18.117.810.837
Waskita - Citra Mandiri	Rp 26.474.673.293	1,333	Rp 17.658.607.086
Waskita - Bahagia Bangun Nusa	Rp 37.563.538.197	1,333	Rp 25.054.879.977
Waskita - Penta	Rp 15.893.747.018	1,333	Rp 10.601.129.261
Waskita - Taruna Putra Pertiwi	Rp 15.245.087.088	1,333	Rp 10.168.473.088
Daelim - Wika - Waskita	Rp 17.442.362.817	1,333	Rp 11.634.055.999
Waskita - Surya Bakti	Rp 9.412.629.477	1,333	Rp 6.278.223.861
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	Rp 5.805.911.452	1,333	Rp 3.872.542.938
Waskita - Wika - Shanghai	Rp 3.614.891.099	1,333	Rp 2.411.132.363
Waskita - Cempaka	Rp 3.186.206.980	1,333	Rp 2.125.200.056
WKR - Ekatama	Rp 292.401.008	1,333	Rp 195.031.472
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 1.942.625.303.078		Rp 1.295.731.077.153
Total	Rp 2.505.417.340.941		Rp 1.671.113.366.408
Jumlah Total Seluruh Investasi	Rp 7.687.625.148.307		Rp 5.127.645.973.921

Lampiran 9. Kertas Kerja Properti Investasi, Kertas Kerja Investasi Jangka Panjang Lainnya, Kertas Kerja Aset Lain-lain

Kertas Kerja Properti Investasi			
Keterangan	2019	Indeks 2018	Setelah Hiperinflasi
Dinilai Pada Tahun 2018 oleh KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan			
Tanah	Rp 42.571.862.492	1,365	Rp 58.110.592.302
Bangunan	Rp 83.707.542.197	1,365	Rp 114.260.795.099
Jumlah	Rp 126.279.404.689		Rp 172.371.387.400
Investasi Jangka Panjang Lainnya			
Keterangan	Sebelum Hiperinflasi	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
PT Prima Multi Terminal	Rp 302.622.000.000	1,333	201.848.874.000
PT Citra Karya Jabar Tol	Rp 45.000.000.000	1,333	30.015.000.000
PT PP Sinergi Banjaratma	Rp 12.684.923.000	1,333	8.460.843.641
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Rp 200.000.000	1,333	133.400.000
Jumlah/ Total	Rp 360.506.923.000		240.458.117.641
Aset Lain-lain			
Keterangan	Sebelum Hiperinflasi	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Beban Kontrak Ditangguhkan	Rp 1.167.118.482.760	1,333	Rp 1.555.768.937.519
Kontrak Sewa Jangka Panjang	Rp 35.267.477.380	1,333	Rp 47.011.547.348
Perangkat Lunak	Rp 58.913.391.261	1,333	Rp 78.531.550.551
Aset Lain-lain Dalam Pengembangan (Catatan 14)	Rp 42.375.183.266	1,333	Rp 56.486.119.294
Tanah dan Bangunan	Rp 7.335.104.427	1,333	Rp 9.777.694.201
Uang Jaminan	Rp 1.701.722.000	1,333	Rp 2.268.395.426
Jumlah	Rp 1.312.711.361.094		Rp 1.749.844.244.338

Lampiran 10. Kertas Kerja Piutang Lain Lain Tak Lancar, Kertas Kerja Utang Usaha, dan Kertas Kerja Utang Bruto Subkontraktor - Jk Pendek

Piutang Lain Lain Tak Lancar			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Berelasi			
PT Istaka Karya (Persero)	74.914.307.748	1,333	49.967.843.268
PT Pejagan Pemalang Toll Road	38.681.366.117	1,333	25.800.471.200
Dikurangi:			
CKPN	(74.914.307.748)	1,333	(49.967.843.268)
Sub Jumlah/ Sub Total	38.681.366.117		25.800.471.200
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Ketiga			
PT Bakrie Toll Indonesia	69.697.329.695	1,333	46.488.118.907
PT Bakrie Toll Road	1.050.000.000	1,333	700.350.000
Dikurangi:			
CKPN	(30.383.893.165)	1,333	(20.266.056.741)
Sub Jumlah/ Sub Total	40.363.436.530		26.922.412.166
Jumlah/ Total	79.044.802.647		52.722.883.366
Kertas Kerja Utang Usaha			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pemasok	6.637.661.632.173	1,333	8.848.002.955.687
Subkontraktor	4.774.558.357.239	1,333	6.364.486.290.200
Sewa Alat	721.801.073.058	1,333	962.160.830.386
Upah Kerja	351.137.622.273	1,333	468.066.450.490
Lain-lain	427.838.539.492	1,333	570.308.773.143
Jumlah	12.912.997.224.235		17.213.025.299.905
Kertas Kerja Utang Bruto Subkontraktor - Jk Pendek			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Perusahaan/ The Company			
Divisi Infrastruktur I - Medan	692.072.640.837	1,333	922.532.830.236
Divisi Gedung/ Division Building - Jakarta	484.955.108.599	1,333	646.445.159.762
Divisi Infrastruktur II - Jakarta	85.731.189.668	1,333	114.279.675.827
Divisi EPC/ Division EPC - Jakarta	70.973.699.311	1,333	94.607.941.182
Divisi Infrastruktur III - Surabaya	40.249.915.633	1,333	53.653.137.539
Divisi/ Division VI			
Divisi/ Division I			
Divisi/ Division VII			
Divisi/ Division VIII			
Divisi/ Division III			
Divisi/ Division II			
Divisi/ Division IV			
Divisi/ Division V			
Sub Jumlah/ Sub Total	1.373.982.554.048		1.831.518.744.546
Entitas Anak/ Subsidiary			
PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)	378.089.437.020	1,333	503.993.219.548
Sub Jumlah/ Sub Total	378.089.437.020		503.993.219.548
Jumlah/ Total	1.752.071.991.068		2.335.511.964.094

Lampiran 11. Kertas Kerja Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Kertas Kerja Utang Pajak Jangka Pendek, dan Kertas Kerja Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Kertas Kerja Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Beban Bunga	385.250.154.600	1,333	513.538.456.082
Beban Umum	331.001.022.084	1,333	441.224.362.438
Beban Kantor	27.790.995.875	1,333	37.045.397.501
Beban Pegawai	10.260.769.298	1,333	13.677.605.474
Beban Operasional Proyek	183.447.923	1,333	244.536.081
Beban Gedung	194.800.323	1,333	259.668.831
Lain-lain	1.188.148.466	1,333	1.583.801.905
Jumlah	755.869.338.569		1.007.573.828.312

Kertas Kerja Utang Pajak Jangka Pendek

Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pasal 21	23.013.346.774	1,333	30.676.791.250
Pasal 22	8.802.867.879	1,333	11.734.222.883
Pasal 23	6.114.800.100	1,333	8.151.028.533
Pajak Final Konstruksi	1.636.017.941.593	1,333	2.180.811.916.143
Pajak Pertambahan Nilai	1.857.734.509.937	1,333	2.476.360.101.746
Pasal 4 (2) - Final	104.424.509.424	1,333	139.197.871.062
Pasal 29	122.674.688.628	1,333	163.525.359.941
Jumlah/ Total	3.758.782.664.335		5.010.457.291.559

Kertas Kerja Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Jasa Produksi dan Tantiem	55.535.370.057	1,333	74.028.648.286
2017 Kementerian PUPR	179.730.172.460	1,333	239.580.319.889
Iuran Dana Pensiun	10.233.842.424	1,333	13.641.711.951
Jamsostek	5.541.201.105	1,333	7.386.421.073
Lain-lain	966.835.352.062	1,333	1.288.791.524.299
Jumlah	1.217.875.938.108		1.623.428.625.498

Lampiran 12. Kertas Kerja Utang Bank Jk Pendek

Kertas Kerja Utang Bank Jk Pendek						
Keterangan	2018	Indeks 2018	Indeks 2019	2019	Setelah Hiperinflasi	
Pihak Berelasi		1,365	1,333			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp 4.789.214.194.112	Rp 6.537.277.374.963	Rp 930.175.960.254	Rp 5.487.020.615.908	Rp 7.467.453.335.217	
PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp 2.148.464.882.826	Rp 2.932.654.565.057	Rp 897.794.598.024	Rp 2.821.979.209.926	Rp 3.830.449.163.082	
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Rp 1.272.706.650.083	Rp 1.737.244.577.363	Rp 1.858.070.064.932	Rp 2.666.607.674.038	Rp 3.595.314.642.295	
PT Bank Syariah Mandiri	Rp 999.999.999.744	Rp 1.364.999.999.651	Rp 663.808.090.224	Rp 1.497.980.562.553	Rp 2.028.808.089.875	
Indonesia Eximbank	Rp 1.949.700.000.000	Rp 2.661.340.500.000	Rp (1.266.552.759.636)	Rp 999.547.892.246	Rp 1.394.787.740.364	
Sindikasi Transmisi Sumatera 500 KV						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp 592.291.027.654	Rp 808.477.252.748	Rp 129.254.994.995	Rp 689.256.515.272	Rp 937.732.247.743	
Indonesia Eximbank	Rp 270.725.279.811	Rp 369.540.006.942	Rp 73.551.688.665	Rp 325.902.840.700	Rp 443.091.695.607	
Sindikasi Jakarta - Cikampek II						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp 424.266.909.090	Rp 579.124.330.908	Rp 291.777.647.286	Rp 643.154.866.544	Rp 870.901.978.194	
Entitas Anak - WBP						
PT Bank BRIsyariah Tbk	Rp 512.000.000.000	Rp 698.880.000.000		Rp 512.000.000.000	Rp 698.880.000.000	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp -		Rp 581.006.389.802	Rp 435.863.758.291	Rp 581.006.389.802	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rp 600.000.000.000	Rp 600.000.000.000	Rp (266.600.000.000)	Rp 400.000.000.000	Rp 333.400.000.000	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp 670.359.467.938	Rp 915.040.673.735	Rp (388.248.870.764)	Rp 379.099.999.998	Rp 526.791.802.971	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rp 350.000.000.019	Rp 477.750.000.026	Rp (399.900.000.025)	Rp 50.000.000.000	Rp 77.850.000.001	
Entitas Anak - WTR						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp 1.259.252.695.484	Rp 1.718.879.929.336	Rp 1.502.643.701.929	Rp 2.386.517.288.079	Rp 3.221.523.631.265	
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 15.838.981.106.761			Rp 19.294.931.223.555	Rp 26.007.990.716.415	

Keterangan	2018	Indeks 2018	Indeks 2019	2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Ketiga		1,365	1,333		
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Rp 2.000.000.000.000	Rp 2.730.000.000.000	Rp 658.982.740.546	Rp 2.494.360.645.571	Rp 3.388.982.740.546
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	Rp 845.000.000.000	Rp 1.153.425.000.000	Rp 1.006.395.005.000	Rp 1.599.985.000.000	Rp 2.159.820.005.000
PT Bank DKI	Rp 1.000.000.000.000	Rp 1.365.000.000.000	Rp (3.280.001.436)	Rp 997.539.383.769	Rp 1.361.719.998.564
PT Bank BTPN Tbk	Rp 700.000.000.000	Rp 955.500.000.000	Rp 333.250.000.000	Rp 950.000.000.000	Rp 1.288.750.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Rp -	Rp -	Rp 1.265.813.560.068	Rp 949.597.569.443	Rp 1.265.813.560.068
PT Bank UOB Indonesia	Rp 335.666.043.122	Rp 458.184.148.862	Rp 711.853.080.300	Rp 869.689.359.176	Rp 1.170.037.229.162
PT Bank DBS Indonesia	Rp -	Rp -	Rp 1.143.894.621.500	Rp 858.135.500.000	Rp 1.143.894.621.500
Bank of China Ltd	Rp 500.000.000.000	Rp 682.500.000.000	Rp 133.300.000.000	Rp 600.000.000.000	Rp 815.800.000.000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Rp -	Rp -	Rp 664.833.750.000	Rp 498.750.000.000	Rp 664.833.750.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	Rp 362.562.066.828	Rp 494.897.221.220	Rp 73.310.322.363	Rp 417.558.557.723	Rp 568.207.543.583
PT Bank Mizuho Indonesia	Rp 280.138.925	Rp 382.389.633	Rp 435.204.009.992	Rp 326.764.767.576	Rp 435.586.399.624
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	Rp 168.112.661.042	Rp 229.473.782.322	Rp (224.093.292.298)	Rp 663.819	Rp 5.380.490.024
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Rp 500.000.000.000	Rp 682.500.000.000		Rp -	Rp 682.500.000.000
Sindikasi Transmisi Sumatera 500 KV					
PT Bank Central Asia Tbk	Rp 360.967.055.125	Rp 492.720.030.246	Rp 98.068.962.617	Rp 434.537.169.616	Rp 590.788.992.862
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Rp 126.338.463.910	Rp 172.452.003.237	Rp 34.324.121.377	Rp 152.087.992.325	Rp 206.776.124.614
Sindikasi Jakarta - Cikampek II					
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Rp 424.266.909.090	Rp 579.124.330.908	Rp 401.083.647.286	Rp 725.154.866.544	Rp 980.207.978.194
PT Bank Central Asia Tbk	Rp 424.266.909.090	Rp 579.124.330.908	Rp (165.459.160.154)	Rp 300.141.507.624	Rp 413.665.170.754
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	Rp 212.133.090.910	Rp 289.561.669.092	Rp (160.637.371.973)	Rp 91.624.934.891	Rp 128.924.297.119
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Rp 212.133.090.910	Rp 289.561.669.092	Rp 105.898.642.114	Rp 291.576.933.456	Rp 395.460.311.206
PT Bank KEB Hana Indonesia	Rp 90.800.000.000	Rp 123.942.000.000	Rp 149.302.131.800	Rp 202.804.600.000	Rp 273.244.131.800
Sindikasi Cinere Serpong					
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Rp 267.189.000.000	Rp 364.712.985.000	Rp 78.347.696.191	Rp 325.964.466.010	Rp 443.060.681.191
PT Bank DBS Indonesia	Rp 178.126.000.000	Rp 243.141.990.000	Rp 52.231.797.461	Rp 217.309.644.007	Rp 295.373.787.461
PT Bank KEB Hana Indonesia	Rp 81.685.000.000	Rp 111.500.025.000	Rp 23.952.451.498	Rp 99.653.830.831	Rp 135.452.476.498
Entitas Anak - WBP		1,365	1,333		
PT Bank DKI	Rp 644.200.000.000	Rp 879.333.000.000	Rp (85.578.600.000)	Rp 580.000.000.000	Rp 793.754.400.000
PT Bank BTPN Tbk	Rp 486.714.847.274	Rp 664.365.766.529	Rp 17.236.454.567	Rp 499.645.420.843	Rp 681.602.221.096
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	Rp 450.000.000.000	Rp 614.250.000.000		Rp 450.000.000.000	Rp 614.250.000.000
PT Bank UOB Indonesia	Rp -		Rp 599.850.000.000	Rp 450.000.000.000	Rp 599.850.000.000
PT Bank Permata Tbk	Rp 300.000.000.000	Rp 409.500.000.000		Rp 300.000.000.000	Rp 409.500.000.000
PT Bank CTBC Indonesia	Rp 300.000.000.000	Rp 409.500.000.000		Rp 300.000.000.000	Rp 409.500.000.000
PT Bank BCA Syariah	Rp 100.000.000.000	Rp 136.500.000.000		Rp 100.000.000.000	Rp 136.500.000.000
PT Bank ICBC Indonesia	Rp 700.000.000.000	Rp 955.500.000.000	Rp (816.567.476.273)	Rp 87.421.248.107	Rp 138.932.523.727
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Rp 299.824.895.228			Rp -	
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	Rp 50.000.000.000			Rp -	
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 12.120.266.171.454			Rp 16.170.304.061.331	Rp 22.598.169.434.594
Jumlah/ Total	Rp 27.959.247.278.215			Rp 35.465.235.284.886	Rp 48.606.160.151.009

Lampiran 13. Kertas Kerja Utang Lembaga Keuangan Non Bank dan Kertas Kerja Utang Uang Muka Kontrak Jangka Pendek

Kertas Kerja Utang Lembaga Keuangan Non Bank						
Keterangan	2018	Indeks 2018	Indeks 2019	2019	Setelah Hiperinflasi	
Pihak Berelasi		1,365	1,333			
PT. Sarana Multi Infrastruktur	Rp 392.616.610.781	Rp 535.921.673.716	Rp 154.933.101.224	Rp 508.845.493.920	Rp 690.854.774.940	
Jumlah/ Total	Rp 392.616.610.781			Rp 508.845.493.920	Rp 690.854.774.940	
Kertas Kerja Utang Uang Muka Kontrak Jangka Pendek						
Keterangan	2018	Indeks 2018	Indeks 2019	2019	Setelah Hiperinflasi	
Pihak Berelasi		1,365	1,333			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			Rp 122.379.391.817	Rp 91.807.495.737	Rp 122.379.391.817	
Lain-lain/ Others	Rp 10.080.783.551	Rp 13.760.269.547	Rp (12.148.116.674)	Rp 4.646.903.700	Rp 1.612.152.873	
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 10.080.783.551			Rp 96.454.399.437	Rp 123.991.544.690	
Pihak Ketiga/ Third Parties						
Pemerintah Daerah			Rp 100.559.713.840	Rp 75.438.645.041	Rp 100.559.713.840	
Kementerian PUPT			Rp 84.579.031.409	Rp 63.450.136.091	Rp 84.579.031.409	
PT Royal Abadi Dentalindo	Rp 73.197.759.090	Rp 99.914.941.158	Rp (97.572.612.867)		Rp 2.342.328.291	
Lain-lain/ Others	Rp 204.401.487.665	Rp 279.008.030.663	Rp (197.374.216.897)	Rp 56.333.808.072	Rp 81.633.813.765	
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 277.599.246.755			Rp 195.222.589.204	Rp 269.114.887.305	
Jumlah/ Total	Rp 287.680.030.306			Rp 291.676.988.641	Rp 393.106.431.995	

Lampiran 14. Kertas Kerja Utang Pembelian Aset Tetap, Kertas Kerja Surat Utang Jangka Menengah, dan Kertas Kerja Utang Obligasi

Kertas Kerja Utang Pembelian Aset Tetap						
Keterangan	2018	Indeks 2018	Indeks 2019	2019	Setelah Hiperinflasi	
		1,365	1,333			
PT Toyota Astra Financial	Rp 204.705.835	Rp 279.423.465	Rp (181.647.070)	Rp 68.436.465	Rp 97.776.395	
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	Rp (198.479.272)		Rp (90.744.947)	Rp (68.075.729)	Rp (90.744.947)	
Jumlah	Rp 6.226.563			Rp 360.736	Rp 7.031.448	
Kertas Kerja Surat Utang Jangka Menengah						
Keterangan	Indeks 2017	Indeks 2018	Indeks 2019	2019	Setelah Hiperinflasi	
	1,416	1,365	1,333			
PT. Waskita Toll Road	Rp 1.113.501.950.013	Rp 79.213.913.734	Rp 331.728.992.379	Rp 1.093.262.563.883	Rp 1.524.444.856.126	
PT. Waskita Karya Realty		Rp 409.500.000.000		Rp 300.000.000.000	Rp 409.500.000.000	
Biaya Transaksi Diamortisasi			Rp (56.498.247.028)	Rp (42.384.281.341)	Rp (56.498.247.028)	
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			Rp (1.400.820.750.628)	Rp (1.050.878.282.542)	Rp (1.400.820.750.628)	
Jumlah				Rp 300.000.000.000	Rp 476.625.858.470	
Kertas Kerja Utang Obligasi						
Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2019
	1,415	1,424	1,416	1,365	1,333	
Nominal	Rp 3.785.125.000.000	Rp 4.129.600.000.000	Rp 4.930.512.000.000	Rp 6.557.801.250.000	Rp 455.613.859.715	Rp 14.203.045.843.747
Biaya Emisi Obligasi	Rp (10.710.713.743)	Rp (18.980.661.252)	Rp (30.857.845.109)	Rp (29.338.441.801)	Rp (26.110.908.230)	Rp (19.588.078.192)
Akumulasi Amortisasi	Rp 4.533.589.408	Rp 8.336.552.700	Rp 14.235.688.059	Rp 12.145.095.296	Rp 11.547.468.136	Rp 8.662.766.794
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun					Rp (995.751.000.000)	Rp (747.000.000.000)
Jumlah						Rp 13.445.120.532.349
Biaya Emisi Obligasi	Rp 10.710.713.743	Rp 18.980.661.252	Rp 30.857.845.109	Rp 29.338.441.801	Rp 26.110.908.230	Rp 19.588.078.192
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi	Rp (4.533.589.408)	Rp (8.336.552.700)	Rp (14.235.688.059)	Rp (12.145.095.296)	Rp (11.547.468.136)	Rp (8.662.766.794)
Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi						Rp 10.925.311.398

Lampiran 15. Kertas Kerja Utang Bank Jangka Panjang

Kertas Kerja Utang Bank Jangka Panjang							
Keterangan	2018	2017		2018		2019	
			1,416	1,365	1,333	2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Berelasi							
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rp 2.644.000.000.000		Rp 3.609.060.000.000	Rp (96.843.073.076)	Rp 2.571.349.532.576	Rp 3.512.216.926.924	
Entitas anak/ Subsidiaries							
WTR							
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk							
Kredit investasi	Rp 6.111.500.126.769	Rp 5.036.349.809.263	Rp 3.487.241.818.772	Rp (3.543.636.242.535)	Rp 3.453.108.346.923	Rp 4.979.955.385.500	
Kredit IDC	Rp 106.699.789.831	Rp 103.910.388.490	Rp 45.477.359.808	Rp 6.313.191.268	Rp 111.435.867.301	Rp 155.700.939.565	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk							
Kredit investasi	Rp 5.624.429.058.646	Rp 1.497.030.643.283	Rp 6.234.233.498.328	Rp 473.551.576.583	Rp 5.979.681.554.207	Rp 8.204.815.718.194	
Kredit Dana Talangan Tanah				Rp 4.919.834.602.404	Rp 3.690.798.651.466	Rp 4.919.834.602.404	
Kredit IDC	Rp 116.382.922.643	Rp 105.698.219.569	Rp 56.971.397.238	Rp 9.656.638.727	Rp 123.627.212.761	Rp 172.326.255.535	
PT Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero) Tbk							
Kredit investasi	Rp 94.580.673.879		Rp 129.102.619.845	Rp 167.241.182.417	Rp 220.042.926.255	Rp 296.343.802.262	
PT Bank BNI Syariah							
Kredit Investasi				Rp 321.551.358.726	Rp 241.223.825.001	Rp 321.551.358.726	
PT Bank BRIsyariah Tbk							
Kredit Investasi				Rp 22.771.297.521	Rp 17.082.743.827	Rp 22.771.297.521	
WKR							
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	460.000.000.000	Rp 169.920.000.000	Rp 464.100.000	Rp 67.280.509.000	510.473.000.000	Rp 237.664.609.000	
Sub Jumlah/ Sub Total	15.157.592.571.768				16.918.823.660.317	22.823.180.895.631	
Keterangan	2018	2017		2018		2019	
			1,416	1,365	1,333	2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Ketiga/ Third Parties							
Sindikasi Modal Kerja							
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	1.102.500.000.000	Rp 867.300.000.000	Rp 696.150.000.000		1.102.500.000.000	Rp 1.563.450.000.000	
Bank of China Ltd	1.102.500.000.000	Rp 867.300.000.000	Rp 696.150.000.000		1.102.500.000.000	Rp 1.563.450.000.000	
PT Bank KEB Hana Indonesia	450.000.000.000	Rp 354.000.000.000	Rp 273.000.000.000		450.000.000.000	Rp 627.000.000.000	
PT Bank Permata Tbk	450.000.000.000	Rp 354.000.000.000	Rp 273.000.000.000		450.000.000.000	Rp 627.000.000.000	
PT Bank OCBC NISP Tbk	450.000.000.000	Rp 354.000.000.000	Rp 273.000.000.000	Rp (4.481.026.053)	446.638.390.058	Rp 622.518.973.947	
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	360.000.000.000	Rp 283.200.000.000	Rp 218.400.000.000		360.000.000.000	Rp 501.600.000.000	
PT Bank CTBC Indonesia	270.000.000.000	Rp 70.800.000.000	Rp 300.300.000.000		270.000.000.000	Rp 371.100.000.000	
PT Shinhan Bank Indonesia	180.000.000.000	Rp 141.600.000.000	Rp 109.200.000.000		180.000.000.000	Rp 250.800.000.000	
PT Bank SBI Indonesia	135.000.000.000	Rp 106.200.000.000	Rp 81.900.000.000		135.000.000.000	Rp 188.100.000.000	
Sindikasi Modal Kerja/ Working Capital Syndication							
PT Bank BTPN Tbk (d/h /formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	277.800.000.000		Rp 379.197.000.000	Rp 962.692.600.000	1.000.000.000.000	Rp 1.341.889.600.000	
PT Bank Permata Tbk	138.900.000.000		Rp 189.598.500.000	Rp 481.346.300.000	500.000.000.000	Rp 670.944.800.000	
PT Bank Resona Perdana Indonesia	55.500.000.000		Rp 75.757.500.000	Rp 192.618.500.000	200.000.000.000	Rp 268.376.000.000	
PT Shinhan Bank Indonesia	27.800.000.000		Rp 37.947.000.000	Rp 162.892.600.000	150.000.000.000	Rp 200.839.600.000	
Bank QNB Indonesia				Rp 666.500.000.000	500.000.000.000	Rp 666.500.000.000	
PT CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah				Rp 666.500.000.000	500.000.000.000	Rp 666.500.000.000	

Entitas anak/ Subsidiaries							
WTR							
PT CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah							
Kredit Investasi				Rp	631.708.673.601	473.899.980.196	Rp 631.708.673.601
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara							
Kredit Investasi				Rp	30.361.730.028	22.776.991.769	Rp 30.361.730.028
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk							
Kredit Investasi				Rp	427.248.425.409	320.516.448.169	Rp 427.248.425.409
Kredit IDC				Rp	1.377.527.573	1.033.404.031	Rp 1.377.527.573
PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha/ Business Unit Syariah							
Kredit Investasi				Rp	7.590.432.507	5.694.247.942	Rp 7.590.432.507
PT Bank Aceh Syariah							
Kredit Investasi				Rp	521.695.710.505	391.369.625.285	Rp 521.695.710.505
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri - Unit Usaha/ Business Unit Syariah							
Kredit Investasi				Rp	97.825.429.438	73.387.418.933	Rp 97.825.429.438
PT Bank Bank Pembangunan Daerah DIY - Unit Usaha/ Business Unit Syariah							
Kredit Investasi				Rp	65.207.536.586	48.917.881.910	Rp 65.207.536.586
PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten							
Kredit Investasi				Rp	69.761.234.172	52.334.009.131	Rp 69.761.234.172
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur - Unit Usaha/ Business Unit Syariah							
Kredit Investasi				Rp	120.465.643.949	90.371.825.918	Rp 120.465.643.949
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat							
Kredit Investasi	171.699.000.000		Rp	234.369.135.000		171.699.000.000	Rp 234.369.135.000
Kredit IDC				Rp	12.523.264.338	9.394.796.953	Rp 12.523.264.338
PT Bank Kalimantan Selatan - Unit Usaha/ Business Unit Syariah							
Kredit Investasi				Rp	72.807.385.465	54.619.193.897	Rp 72.807.385.465
PT Bank Aceh							
Kredit Investasi				Rp	46.366.520.550	34.783.586.309	Rp 46.366.520.550
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara							
Kredit Investasi				Rp	183.999.643.586	138.034.241.250	Rp 183.999.643.586
Kredit IDC				Rp	15.700.418.914	11.778.258.750	Rp 15.700.418.914
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat							
Kredit Investasi				Rp	21.062.199.461	15.800.599.746	Rp 21.062.199.461
Kredit IDC				Rp	1.275.610.163	956.946.859	Rp 1.275.610.163
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi							
Kredit Investasi				Rp	183.999.643.586	138.034.241.250	Rp 183.999.643.586
Kredit IDC				Rp	15.700.418.914	11.778.258.750	Rp 15.700.418.914
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu							
Kredit Investasi				Rp	105.284.778.934	78.983.330.033	Rp 105.284.778.934
Kredit IDC				Rp	4.397.127.559	3.298.670.337	Rp 4.397.127.559
PT Bank Pembangunan Daerah DIY							
Kredit Investasi				Rp	61.333.214.529	46.011.413.750	Rp 61.333.214.529
Kredit IDC				Rp	5.233.472.971	3.926.086.250	Rp 5.233.472.971
PT Bank Pembangunan Daerah Bali							
Kredit Investasi				Rp	207.815.034.791	155.900.251.156	Rp 207.815.034.791
Kredit IDC				Rp	12.969.149.820	9.729.294.689	Rp 12.969.149.820
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah							
Kredit Investasi				Rp	183.999.643.586	138.034.241.250	Rp 183.999.643.586
Kredit IDC				Rp	15.700.418.914	11.778.258.750	Rp 15.700.418.914

PT Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara								
Kredit Investasi				Rp	10.531.099.731		7.900.299.873	Rp 10.531.099.731
Kredit IDC				Rp	637.805.084		478.473.431	Rp 637.805.084
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan								
Kredit Investasi				Rp	299.815.522.251		224.917.871.156	Rp 299.815.522.251
Kredit IDC				Rp	20.750.402.253		15.566.693.363	Rp 20.750.402.253
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah								
Kredit Investasi				Rp	61.333.214.529		46.011.413.750	Rp 61.333.214.529
Kredit IDC				Rp	5.233.472.971		3.926.086.250	Rp 5.233.472.971
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat								
Kredit Investasi				Rp	91.999.156.126		69.016.621.250	Rp 91.999.156.126
Kredit IDC				Rp	7.850.875.124		5.889.628.750	Rp 7.850.875.124
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung								
Kredit Investasi	171.699.000.000		Rp	234.369.135.000	Rp	231.276.636.383	345.199.852.500	Rp 465.645.771.383
Kredit IDC					Rp	32.257.624.515	24.199.268.203	Rp 32.257.624.515
PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau								
Kredit Investasi	128.774.000.000		Rp	175.776.510.000	Rp	275.998.799.713	335.824.862.500	Rp 451.775.309.713
Kredit IDC					Rp	32.943.724.060	24.713.971.538	Rp 32.943.724.060
PT Bank Pembangunan Daerah Papua								
Kredit Investasi	85.849.000.000		Rp	117.183.885.000	Rp	562.528.699.156	507.851.024.873	Rp 679.712.584.156
Kredit IDC					Rp	54.085.330.918	40.574.141.724	Rp 54.085.330.918
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara								
Kredit Investasi	55.802.000.000		Rp	76.169.730.000	Rp	69.231.539.327	107.738.638.655	Rp 145.401.269.327
Kredit IDC					Rp	9.838.723.200	7.380.887.622	Rp 9.838.723.200
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur								
Kredit Investasi	42.925.000.000		Rp	58.592.625.000	Rp	174.412.732.328	173.767.259.811	Rp 233.005.357.328
Kredit IDC					Rp	8.222.078.086	6.168.100.590	Rp 8.222.078.086
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur								
Kredit investasi	354.413.305.370	Rp	44.484.013.175	Rp	(405.410.716.486)	Rp	364.082.545.308	627.543.496.899
Kredit IDC						Rp	39.658.982.624	29.751.674.887
PT Bank Nagari								
Kredit investasi						Rp	245.331.526.781	184.044.656.250
Kredit IDC						Rp	20.935.223.219	15.705.343.750
PT Bank Pan Indonesia Tbk								
Kredit investasi						Rp	625.119.828.936	468.957.110.980
Kredit IDC								
PT Bank Artha Graha International Tbk								
Kredit investasi						Rp	38.654.926.680	28.998.444.621
Kredit IDC						Rp	183.999.643.586	138.034.241.250
Kredit IDC						Rp	15.700.418.914	11.778.258.750
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah								
Kredit investasi						Rp	317.197.172.374	237.957.368.623
Kredit IDC						Rp	26.888.511.994	20.171.426.852
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun								
						Rp	(555.194.500.000)	-416.500.000.000
Sub Jumlah/ Sub Total	5.594.661.305.370							Rp 17.060.335.296.656
Jumlah	20.752.253.877.138						30.073.871.672.339	Rp 39.883.516.192.287

Lampiran 16. Kertas Kerja Utang Ventura Bersama Jangka Panjang dan Kertas Kerja Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang

Kertas Kerja Utang Ventura Bersama Jangka Panjang							
Keterangan	Sebelum Hiperinflasi	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi				
Ventura Bersama	770.564.755.648	1,333	1.027.162.819.279				
Jumlah/Total	770.564.755.648		1.027.162.819.279				
Kertas Kerja Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang							
Keterangan	2018	2016	2017	2018	2019	2019	Setelah Hiperinflasi
		2,382	2,368	2,283	2,229		
Pihak Berelasi							
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)	160.965.118.242	416.850.000.000	-14.830.200.006	-17743769085	-13.651.307.175	154.840.709.460	370.624.723.734
PT Shalawat Power	821.700.000		1.945.785.600			821.700.000	1.945.785.600
Entitas anak/ Subsidiary - WTR							
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)							
Kredit Investasi					410.237.764.995	184.045.655.000	410.237.764.995
Kredit IDC					35.004.985.005	15.704.345.000	35.004.985.005
Jumlah/ Total	161.786.818.242					355.412.409.460	817.813.259.334



Lampiran 17. Kertas Kerja Utang Bruto Jangka Panjang dan Kertas Kerja Uang Muka Kontrak Jangka Panjang

Kertas Kerja Utang Bruto Jangka Panjang			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Perusahaan/ The Company			
Divisi Infrastruktur I - Medan	Rp 622.367.701.311	1,333	Rp 829.616.145.848
Divisi Infrastruktur II - Jakarta	Rp 472.822.746.048	1,333	Rp 630.272.720.482
Divisi Gedung/ Division Building - Jakarta	Rp 227.995.453.841	1,333	Rp 303.917.939.970
Divisi Infrastruktur III I - Surabaya	Rp 68.923.616.518	1,333	Rp 91.875.180.818
Divisi EPC/ Division EPC - Jakarta	Rp 32.367.880.485	1,333	Rp 43.146.384.687
Jumlah/ Total	Rp 1.424.477.398.203		Rp 1.898.828.371.805
Kertas Kerja Uang Muka Kontrak Jangka Panjang			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Lain-lain/ Others (di bawah Rp 20 Milyar)	Rp 4.985.756.856	1,333	Rp 6.646.013.889
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 4.985.756.856		Rp 6.646.013.889
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 51.287.531.184	1,333	Rp 68.366.279.068
Kementrian Agama	Rp 45.855.893.825	1,333	Rp 61.125.906.469
Lain-lain/ Others (di bawah Rp 20 Milyar)	Rp 50.120.222.568	1,333	Rp 66.810.256.683
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 147.263.647.577		Rp 196.302.442.220
Jumlah/ Total	Rp 152.249.404.433		Rp 202.948.456.109

Lampiran 18. Kertas Kerja Utang Lain-lain Jk Panjang dan Kertas Kerja Liabilitas Imbalan Kerja

Kertas Kerja Utang Lain-lain Jk Panjang			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Pihak Berelasi			
PT Sarana Multi Infrastruktur	Rp 825.671.398.210	1,333	Rp 1.100.619.973.814
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 825.671.398.210		Rp 1.100.619.973.814
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 1.600.192.407.144	1,333	Rp 2.133.056.478.723
Lain-lain/ Others	Rp 625.820.000	1,333	Rp 834.218.060
Sub Jumlah/ Sub Total	Rp 1.600.818.227.144		Rp 2.133.890.696.783
Jumlah/ Total	Rp 2.426.489.625.354		Rp 3.234.510.670.597
Kertas Kerja Liabilitas Imbalan Kerja			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Perusahaan/ the Company	Rp 73.837.509.628	1,333	Rp 98.425.400.334
PT Waskita Beton Precast Tbk	Rp 14.354.823.173	1,333	Rp 19.134.979.290
PT Trans Jabar Tol	Rp 2.577.685.523	1,333	Rp 3.436.054.802
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Rp 1.543.304.411	1,333	Rp 2.057.224.780
PT Waskita Toll Road	Rp 1.313.583.944	1,333	Rp 1.751.007.397
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Rp 659.773.309	1,333	Rp 879.477.821
PT Waskita Karya Realty	Rp 471.422.904	1,333	Rp 628.406.731
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Rp 443.081.518	1,333	Rp 590.627.663
Jumlah/ Total	Rp 95.201.184.410		Rp 126.903.178.819

Lampiran 19. Komponen Ekuitas

		Modal Saham			
Keterangan	Jumlah Saham	%	Jumlah Modal Disetor	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Modal Dasar	Rp 26.000.000.000		Rp 2.600.000.000.000	1,333	Rp 1.734.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)					
Pemerintah Republik Indonesia Saham Biasa (Seri B)	Rp 1	0,00%	Rp 100	1,333	Rp 67
Pemerintah Republik Indonesia	Rp 8.963.697.886	66,04%	Rp 896.369.788.600	1,333	Rp 597.878.648.996
Masyarakat (kepemilikan <0,5%)	Rp 4.610.204.713	33,96%	Rp 461.020.471.299	1,333	Rp 307.500.654.356
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	Rp 13.573.902.600	100,00%	Rp 1.357.390.259.999		Rp 905.379.303.419

		Tambahan Modal Disetor	
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Agio Saham			
Tambahan modal disetor dari penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat sebesar 3.082.315.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang ditawarkan Rp 380 per saham	Rp 863.048.200.000	1,333	Rp 575.653.149.400
Tambahan modal disetor dari eksekusi opsi saham karyawan	Rp 118.826.375.828	1,333	Rp 79.257.192.677
Tambahan modal disetor dari Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perusahaan kepada masyarakat sebesar 3.653.498.200 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang ditawarkan Rp 1.450 per saham	Rp 4.969.551.418.508	1,333	Rp 3.314.690.796.145
Dikurangi dengan biaya emisi saham	Rp (31.910.365.455)	1,333	Rp (21.284.213.758)
Dikurangi dengan biaya emisi saham penawaran umum terbatas	Rp (37.328.848.507)	1,333	Rp (24.898.341.954)
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan atas Entitas Anak	Rp (330.160.517.937)	1,333	Rp (220.217.065.464)
Saldo Tambahan modal disetor	Rp 5.552.026.262.437		Rp 3.703.201.517.045
Modal Disetor Lainnya Opsi Saham			
Saldo Awal			
Penambahan (Pengurangan)			
Seb Jumlah			
Jumlah Total	Rp 5.552.026.262.437		Rp 3.703.201.517.045
Saldo Laba			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Telah Ditentukan Penggunaannya			
Saldo Awal	Rp 1.583.494.837.349	1,333	Rp 1.056.191.056.512
Penambahan Dana Cadangan	Rp 88.899.090.863	1,333	Rp 59.295.693.606
Saldo Akhir	Rp 1.672.393.928.212		Rp 1.115.486.750.117
Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo Awal Tahun	Rp 8.763.909.422.956	1,333	Rp 5.845.527.585.112
Dividen	Rp (990.709.507.966)	1,333	Rp (660.803.241.813)
Pembentukan Cadangan Umum	Rp (88.899.090.863)	1,333	Rp (59.295.693.606)
Laba (Rugi) Bersih	Rp 1.150.330.832.978		Rp (13.934.791.917.248)
Pengukuran Kembali Program Imbalan PastI	Rp 3.817.342.992	1,333	Rp 2.546.167.776
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan atas Entitas Anak			
Saldo Akhir Tahun	Rp 8.838.449.000.097		Rp (8.806.817.099.779)
Ekuitas Lainnya			
Keterangan	2019	Indeks 2019	Setelah Hiperinflasi
Komponen Ekuitas Lainnya	Rp 739.633.269.559	1,333	Rp 493.335.390.796

Kepentingan Non Pengendali

Keterangan	Persentase Kepemilikan	Saldo Awal	Penyesuaian Indeks	Bagian Laba/Rugi	Penyesuaian Indeks	Penambahan/Pengurangan di Tahun 2019	Penyesuaian Indeks	2019	Setelah Hiperinflasi
			1,333		1,333		1,333		
Masyarakat Umum (Untuk/ for WBP)	40,00%	Rp 4.871.879.999.188	Rp 3.249.543.959.458	Rp 204.693.572.147	Rp 136.530.612.622	Rp (195.731.595.000)	Rp (130.552.973.865)	Rp 4.880.841.976.335	Rp 3.255.521.598.215
PT Sarana Multi Infrastruktur (Untuk/ for WTR)	12,46%	Rp 2.510.058.087.631	Rp 1.674.208.744.450	Rp (88.765.149.565)	Rp (59.206.354.760)	Rp 165.754.555.272	Rp 110.558.288.366	Rp 2.587.047.493.338	Rp 1.725.560.678.056
PT Dana Tabungan dan Asuransi Negeri (Persero) (Untuk/ for WTR)	10,23%	Rp 2.045.632.252.472	Rp 1.364.436.712.399	Rp (72.861.096.996)	Rp (48.598.351.696)			Rp 1.972.771.155.476	Rp 1.315.838.360.702
PT Sumber Mitra Jaya (Untuk/ for PBTR)	40,00%	Rp 809.759.717.909	Rp 540.109.731.845	Rp (97.070.528.434)	Rp (64.746.042.465)			Rp 712.689.189.475	Rp 475.363.689.380
PT Akses Pelabuhan Indonesia (Untuk/ for CTP)	45,00%	Rp 417.360.969.654	Rp 278.379.766.759	Rp 1.328.366.001	Rp 886.020.123	Rp 133.447.860.000	Rp 89.009.722.620	Rp 552.137.195.655	Rp 368.275.509.502
PT Bagasasi Inti Pratama (untuk/ for WMR)	40,00%	Rp 160.581.870.537	Rp 107.108.107.648	Rp (197.019.752)	Rp (131.412.175)	Rp 124.608.000.000	Rp 83.113.536.000	Rp 284.992.850.785	Rp 190.090.231.474
PT Graha Jasa Ekatama (Untuk/ for WFPR)	40,00%	Rp 34.287.298.623	Rp 22.869.628.182	Rp 6.740.479.288	Rp 4.495.899.685			Rp 41.027.777.911	Rp 27.365.527.867
PT Shalawat Power (Untuk/ for WSE)	6,00%	Rp 15.862.734.475	Rp 10.580.443.895	Rp (523.106.635)	Rp (348.912.126)			Rp 15.639.627.840	Rp 10.231.531.769
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Untuk/ for KKDM)	0,46%	Rp 6.024.308.232	Rp 4.018.213.591	Rp (938.964.374)	Rp (626.289.237)			Rp 5.085.343.858	Rp 3.391.924.353
PT Bakrie and Brothers Tbk (Untuk/ for CCT)	5,00%	Rp 3.478.360.767	Rp 2.320.066.632	Rp 57.497.748	Rp 38.350.998			Rp 3.535.858.515	Rp 2.358.417.630
PT Bakrie Toll Indonesia (Untuk/ for CCT)	5,00%	Rp 3.478.360.767	Rp 2.320.066.632	Rp 57.497.748	Rp 38.350.998			Rp 3.535.858.515	Rp 2.358.417.630
PT Panca Wira Usaha (Untuk/ for WBW)	0,19%	Rp 2.856.196.707	Rp 1.905.083.204	Rp 2.260.282	Rp 1.507.608			Rp 2.858.456.989	Rp 1.906.590.812
Perusahaan Daerah Prodekim (Untuk/ for WST (dh/ formerly SRIMP))	1,00%	Rp 2.562.376.520	Rp 1.709.105.139	Rp 12.957.830	Rp 8.642.873			Rp 2.575.334.350	Rp 1.717.748.011
PT Kaltim Binasarana Konstruksi (Untuk/ for TTB)	20,00%	Rp 1.593.411.839	Rp 1.062.805.697	Rp 42.006.375	Rp 28.018.252			Rp 1.635.418.214	Rp 1.090.823.949
Perusda Benuo Taka (Untuk/ for TTB)	15,00%	Rp 1.195.058.879	Rp 797.104.272	Rp 31.504.781	Rp 21.013.689			Rp 1.226.563.660	Rp 818.117.961
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for SMR)	0,00%	Rp 1.077.033.715	Rp 718.381.488					Rp 1.077.033.715	Rp 718.381.488
Kayson Company (Untuk/ for WST (dh/ formerly SRIMP))	5,00%	Rp 945.603.312	Rp 630.717.409					Rp 945.603.312	Rp 630.717.409
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TJJT)	10,14%	Rp 154.284.720	Rp 102.907.908					Rp 154.284.720	Rp 102.907.908
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TPJT)	0,00%	Rp 144.413.504	Rp 96.323.807					Rp 144.413.504	Rp 96.323.807
Perusda Komaba (Untuk/ for TTB)	5,00%		Rp -	Rp 10.501.594	Rp 7.004.563			Rp 10.501.594	Rp 7.004.563
Koperasi Waskita (Untuk/ for WBP)	0,01%	Rp 2.721.050	Rp 1.814.940	Rp 270.512	Rp 180.432			Rp 2.991.562	Rp 1.995.372
Koperasi Waskita (Untuk/ for TJJT)	0,00%	Rp 2.469.663	Rp 1.647.265	Rp (1.796.621)	Rp (1.198.346)	Rp 500.000	Rp 333.500	Rp 1.173.042	Rp 782.419
Koperasi Waskita (Untuk/ for WKR)	0,01%	Rp 1.088.970	Rp 726.343	Rp 32.083	Rp 21.399			Rp 1.121.053	Rp 747.742
Koperasi Waskita (Untuk/ for WWE)	0,05%	Rp (633.103)	Rp (422.280)					Rp (633.103)	Rp (422.280)
PT Sriwijaya Marga Persada (Untuk/ for WST (dh/ formerly SRIMP))	0,81%	Rp (104.112.806)	Rp (69.443.242)					Rp (104.112.806)	Rp (69.443.242)
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKI (dh/ formerly WKE)	0,01%	Rp (143.219.146)	Rp (95.527.170)	Rp (29.755)	Rp (19.847)			Rp (143.248.901)	Rp (95.547.017)
PT Jasa Sarana (Untuk/ for TJJT)	8,21%	Rp (153.701.404)	Rp (102.518.836)					Rp (153.701.404)	Rp (102.518.836)
Koperasi Waskita (Untuk/ for WTR)	0,01%	Rp (677.676.817)	Rp (452.010.437)					Rp (677.676.817)	Rp (452.010.437)
PT Persada Tanjung Api-api (Untuk/ for WST (dh/ formerly SRIMP))	1,00%	Rp (1.856.590.368)	Rp (1.238.345.775)					Rp (1.856.590.368)	Rp (1.238.345.775)
Jumlah		Rp 10.886.002.685.490	Rp 7.260.963.791.222	Rp (47.380.745.743)	Rp (31.602.957.411)	Rp 228.079.320.272	Rp 152.128.906.621	Rp 11.066.701.260.019	Rp 7.381.489.740.433

	Laba Per Saham	
Keterangan	2019	Setelah Hiperinflasi
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk	Rp 1.150.330.832.978	Rp (13.935.918.707.141)
Rata - rata Bertimbang Saham	Rp 13.573.902.600	Rp 13.573.902.600
Laba Per Saham Dasar	84,75	Rp (1.027)



Lampiran 20. Komponen Laba / Rugi

Kertas Kerja Pendapatan Usaha			
Keterangan	Sebelum Hiperinflasi	Indeks 2019	Sesudah Hiperinflasi
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek	1.893.542.732.797	1,333	Rp 1.262.993.002.775,60
PT Utama Karya (Persero)	1.986.362.113.236	1,333	Rp 1.324.903.529.528,41
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.616.294.376.513	1,333	Rp 1.078.068.349.134,17
PT Cinere Serpong Jaya	468.768.589.699	1,333	Rp 312.668.649.329,23
PT Angkasa Pura II (Persero)	404.439.575.664	1,333	Rp 269.761.196.967,89
PT Utama Marga Waskita	215.674.440.612	1,333	Rp 143.854.851.888,20
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	198.625.116.034	1,333	Rp 132.482.952.394,68
PT Jasamarga Solo Ngawi	171.540.422.951	1,333	Rp 114.417.462.108,32
PT Jasamarga Semarang Batang	164.010.175.361	1,333	Rp 109.394.786.965,79
PT Jasamarga Japek Selatan	126.556.690.112	1,333	Rp 84.413.312.304,70
PT Angkasa Pura I (Persero)	123.144.694.349	1,333	Rp 82.137.511.130,78
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	55.139.338.186	1,333	Rp 36.777.938.570,06
PT Pejagan Pemalang Tol Road			
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri			
PT Prima Multi Terminal (Pelindo)			
KSO Waskita Trinita 2			
KSO/ JO RNI Waskita			
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Miliar/ Billion)	173.126.952.182	1,333	Rp 115.475.677.105,39
Sub Jumlah/ Sub Total	7.597.225.217.696		Rp 5.067.349.220.203,23
Keterangan	Sebelum Hiperinflasi	Indeks 2019	Sesudah Hiperinflasi
Pihak Ketiga/ Third Parties			
BPJT - PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	2.710.336.726.930	1,333	Rp 1.807.794.596.862,31
BPJT - PT Waskita Bumi Wira	2.116.233.454.428	1,333	Rp 1.411.527.714.103,48
BPJT - PT Waskita Sriwijaya Tol (dh/ formerly PT S)	2.291.502.174.719	1,333	Rp 1.528.431.950.537,57
BPJT - PT Cimanggis Cibitung Tollways	1.996.456.291.853	1,333	Rp 1.331.636.346.665,95
BPJT - PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	1.173.723.525.107	1,333	Rp 782.873.591.246,37
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	572.705.599.857	1,333	Rp 381.994.635.104,62
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	510.523.148.072	1,333	Rp 340.518.939.764,02
BPJT - PT Trans Jabar Tol	386.098.340.219	1,333	Rp 257.527.592.926,07
PT Marga Trans Nusantara	229.799.739.381	1,333	Rp 153.276.426.167,13
PT Kukuh Mandiri Lestari	210.220.193.241	1,333	Rp 140.216.868.891,75
BPJT - PT Pemalang Batang Toll Road	135.150.520.480	1,333	Rp 90.145.397.160,16
KSO Utama-Marga-Waskita	63.236.060.854	1,333	Rp 42.178.452.589,62
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation			
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Timor Leste/ The Ministry of Public Work of Republica Democratica de Timor Leste			
Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi RI/ The Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic Indonesia			
Pemerintah Daerah/ District Governments			
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Miliar/ Billion)	2.021.685.419.267	1,333	Rp 1.348.464.174.651,09
Sub Jumlah/ Sub Total	14.417.671.194.408		Rp 9.616.586.686.670,14
Jumlah/ Total	22.014.896.412.104		Rp 14.683.935.906.873,40

Beban Pokok Pendapatan			
Keterangan	Sebelum Hiperinflasi	Indeks 2019	Sesudah Hiperinflasi
Jasa Konstruksi			
Bahan Baku	4.054.857.509.135	1,333	Rp 2.704.589.958.593,04
Subkontraktor	4.242.183.694.711	1,333	Rp 2.829.536.524.372,24
Upah	1.445.162.315.657	1,333	Rp 963.923.264.543,22
Beban Tidak Langsung	6.866.997.943.936	1,333	Rp 4.580.287.628.605,31
Jumlah Jasa Konstruksi	16.609.201.463.439		Rp 11.078.337.376.113,80
Jalan Tol	127.935.305.824	1,333	Rp 85.332.848.984,61
Properti dan Hotel	172.568.986.618	1,333	Rp 115.103.514.074,21
Energi	8.034.127.726	1,333	Rp 5.358.763.193,24
Produk Beton			
Persediaan Awal	464.822.769.306	1,333	Rp 310.036.787.127,10
Pembelian	229.802.993.644	1,333	Rp 153.278.596.760,55
Barang tersedia untuk Dijual	694.625.762.949	1,333	Rp 463.315.383.887,65
Persediaan Akhir	358.211.395.986	1,333	Rp 238.927.001.122,66
Beban Bahan Baku	336.414.366.963	1,333	Rp 224.388.382.764,99
Beban Upah	36.549.129.003	1,333	Rp 24.378.269.045,00
Beban Overhead	567.903.830.592	1,333	Rp 378.791.855.004,86
Jumlah Produk Beton	940.867.326.558		Rp 627.558.506.814,85
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	17.858.607.210.165		Rp 11.911.691.009.180,70
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi			
Keterangan	Sebelum Hiperinflasi	Indeks 2019	Sesudah Hiperinflasi
Beban Penjualan/ Selling Expenses			
Pemasaran/ Marketing	17.386.198.704	1,333	11.596.594.536
Tender/ Tender	14.561.618.390	1,333	9.712.599.466
Iklan/ Advertising	6.061.906.620	1,333	4.043.291.716
Sub Jumlah/ Sub Total	38.009.723.714		25.352.485.717
Beban Umum dan Administrasi/General and Administrative Expenses			-
Gaji Pegawai/ Employee's Salaries	359.850.095.820	1,333	240.020.013.912
Umum/ General	112.943.676.904	1,333	75.333.432.495
Penyusutan (Catatan 16)/ Depreciation (Note 16)	50.761.290.440	1,333	33.857.780.723
Kantor/ Office	38.225.598.557	1,333	25.496.474.238
Perjalanan Dinas/ Travelling	41.632.862.542	1,333	27.769.119.316
Gedung/ Building	30.266.372.053	1,333	20.187.670.159
Jamsostek/ Jamsostek	10.670.995.985	1,333	7.117.554.322
Pesangon/ Severance	30.203.267.833	1,333	20.145.579.645
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Allowance	9.313.181.652	1,333	6.211.892.162
Bonus/THR / Bonus/ THR Allowance	27.749.285.669	1,333	18.508.773.541
DPLK/ DPLK	36.986.174	1,333	24.669.778
Lain-lain/ Others	25.136.060.896	1,333	16.765.752.618
Sub Jumlah/ Sub Total	736.789.674.525		491.438.712.908
Jumlah/ Total	774.799.398.239		516.791.198.625

Beban Pajak Penghasilan dan Final			
Keterangan	Sebelum Hiperinflasi	Indeks 2019	Sesudah Hiperinflasi
Beban Pajak Penghasilan			
Pajak atas Pendapatan Non Final			
Perusahaan	25.882.575.250	1,333	17.263.677.692
Entitas Anak	134.761.418.781	1,333	89.885.866.327
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	38.153.377.163	1,333	25.448.302.568
Jumlah	198.797.371.194		132.597.846.586
Beban Pajak Final			
Pendapatan Perusahaan			
Pendapatan Jasa Konstruksi	15.920.040.893.621	1,333	10.618.667.276.045
Dikurangi Pendapatan Usaha yang Dibiayai Luar Negeri	(48.124.225.468)	1,333	(32.098.858.387)
Pendapatan Usaha Luar Negeri Tidak Kena Pajak dan KSO	(1.699.558.507.816)	1,333	(1.133.605.524.713)
Pendapatan Beda Waktu		1,333	-
Pengenaan Pajak - Bersih	(6.476.098.298.419)	1,333	(4.319.557.565.045)
Pendapatan Jasa Konstruksi Kena Pajak			
Telah Terealisasi	7.696.259.861.918	1,333	5.133.405.327.899
Belum Terealisasi	8.240.632.306.769	1,333	5.496.501.748.615
Pendapatan Gedung yang Disewakan	854.501.367	1,333	569.952.412
Jumlah Pendapatan Kena Pajak	15.937.746.670.054		10.630.477.028.926
Beban Pajak Final			
3% atas Pendapatan Jasa Konstruksi	478.106.765.061		318.914.310.868
10% atas Pendapatan Gedung yang Disewakan	85.450.137		56.995.241
Jumlah Beban Pajak Final	478.192.215.198		318.971.306.109
Pendapatan dan Beban Lain-Lain			
Keterangan	Sebelum Hiperinflasi	Indeks 2019	Sesudah Hiperinflasi
Beban			
Beban Lain-lain KSO/ Others JV Expenses	20.089.717.300	1,333	13.399.841.439
Beban dan Denda Pajak/ Tax Expenses and Penalty	24.210.707.979	1,333	16.148.542.222
Beban Lain-lain Proyek/ Others Project Expenses	15.524.357.499	1,333	10.354.746.452
Lain-lain/ Others	2.054.400.669	1,333	1.370.285.246
Jumlah/ Total	61.879.183.447		41.273.415.359
Pendapatan			
Pemulihan Piutang/ Recovery of Receivables	52.138.533.962	1,333	34.776.402.153
Lain-lain KSO/ Others JV	21.041.228.513	1,333	14.034.499.418
Lain-lain Proyek/ Others Project	210.663.641.178	1,333	140.512.648.666
Klaim Asuransi/ Insurance Claims	532.993.960	1,333	355.506.971
Lain-lain/ Others	91.645.758.286	1,333	61.127.720.777
Jumlah/ Total	376.022.155.899		250.806.777.985
Keuntungan/Kerugian Posisi Moneter Neto			
Keterangan	Sebelum Hiperinflasi	Indeks 2019	Sesudah Hiperinflasi
Penyesuaian Terhadap Seluruh Aset, Liabilitas, dan Modal Dalam kondisi Hiperinflasi			(14.670.442.526.861)

Lampiran 21. Halaman Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Adam Axelrio Hartoyo
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 30 September 1998
Alamat Asal : Dsn. Ngadirenggo RT 2 RW 1 No. 9 Kecamatan Wlingi
Kabupaten Blitar
Alamat Kos : Jl. Mertojoyo Blok I No.4
Telepon/Hp : 0812 6752878
E-mail : adamaxelrio1998@gmail.com

Pendidikan Formal

2004 – 2010 : SDL YBBSU Balikpapan
2010 – 2013 : SMPN 1 Wlingi - Kabupaten Blitar
2013 – 2016 : SMAN 1 Talun - Kabupaten Blitar
2016 – 2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016 – 2017 : Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
2018 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang
2019 : Praktek Kerja Lapangan di PLN UP3 Malang
2019 : Pelatihan E- Faktur Fakultas Ekonomi UIN Maliki
Malang
2019 : Pelatihan E- Filing Tax Center UIN Maliki Malang
2019 : Brevet A & B IAI Tax Center UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Kepanitiaan HMJ Akuntansi
- Kepanitiaan Angkatan 2016 Akuntansi UIN Malang
- Asisten Laboratorim Jurusan Akuntansi UIN Malang
- Relawan Pajak Tax Center UIN Malang
- Relawan Pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil 3 Jawa Timur

Lampiran 22. Halaman Bukti Konsultasi**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Adam Axelrio Hartoyo
 NIM / Jurusan : 16520087 / Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak
 Judul Skripsi : Implementasi PSAK 63 Tentang Pelaporan
 Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi
 (Studi Kasus: Pt Waskita Karya Tbk)

Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
5/9/19	Pengajuan Outline Skripsi	
21/10/19	Memberikan draft berupa kertas kerja dan melanjutkan mengerjakan Bab 1-3	
29/12/19	Menyerahkan Bab 1-3 dan Revisi	
10/1/20	Menyerahkan revisi bab 1-3 beserta lembar pengesahan untuk Acc proposal skripsi	
31/1/20	Seminar Proposal	
12/1/20	Acc Seminar Proposal	
30/4/20	Revisi Bab 4 dan 5 Pertama	
2/5/20	Revisi Bab 4 dan 5 Kedua	
6/5/20	Revisi kertas kerja (Bab 4&5) Ketiga	
8/5/20	Penyerahan bab 1 – 5 dan Acc untuk ujian skripsi	
10/5/20	Pembuatan Abstrak dan Penyesuaian Buku Pedoman	
18/5/20	Sidang Skripsi	

Malang, 18 Mei 2020
 Mengetahui
 Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA
 NIP. 19720322 200801 2 005